



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG

Jalan. Wr. Supratman 1, Bandar Lampung 35212 Bandar Lampung, 17 Februari 2022

Nomor : B/339/II/REN.4.1.6./2022

Klasifikasi: BIASA

Lampiran : -

Perihal : Mengirimkan Laporan Kinerja
Polda Lampung T.A. 2021.

Kepada

Yth. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Di

Jakarta

u. p. Asrena

1. Rujukan :
 - a. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 tanggal 24 Juli 2015, tentang Perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Polri;
 - b. surat Asisten Bidang Perencanaan Umum Dan Anggaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/1680/XII/REN.3.1./202/Srena tanggal 30 Desember 2021 tentang penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021;
 - c. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor: Kep/464/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Rencana Strategis Kepolisian Daerah Lampung tahun 2020-2024;
 - d. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor: Kep / 465 / VI / 2020 tanggal 30 Juni 2010 tentang Rencana Kerja Kepolisian Daerah Lampung TA. 2020.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini disampaikan kepada Jenderal Laporan Kinerja Polda Lampung Tahun Anggaran 2020 (terlampir).
3. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG



Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Tembusan :

1. Irwasum Polri.
2. Distribusi A, B dan C Polda Lampung.



LAPORAN KINERJA 2021

POLDA LAMPUNG

Bandar Lampung, 15 Februari 2022



LAPORAN KINERJA 2021

POLDA LAMPUNG

Bandar Lampung, 17 Februari 2022

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
UNIT KERJA POLDA LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2021

Kami telah mereviu laporan kinerja unit kerja **Polda Lampung** untuk tahun anggaran 2020 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Polri.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Bandar Lampung, 11 Februari 2022

IRWASDA POLDA LAMPUNG



Drs. EDDY HERMANTO, M.M., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 68110215

DAFTAR ISI

	HAL
PERNYATAAN TELAH DIREVIU OLEH ITWASDA POLDA LAMPUNG	
BAB I	PENDAHULUAN 1
A.	Umum 1
B.	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 3
1.	Tugas 3
2.	Fungsi 4
3.	Struktur Organisasi 6
C.	Peran Strategis 6
BAB II	PERENCANAAN KINERJA 8
A.	Visi 8
B.	Misi 8
C.	Tujuan 9
D.	Sasaran Prioritas 9
E.	Sasaran Strategis 10
F.	Penetapan Kinerja Poldal Lampung T.A. 2021 12
G.	Anggaran DIPA T.A. 2021 13
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA 17
A.	Capaian Kinerja Poldal Lampung 17
B.	Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja 18
0.	Sasaran Strategis <i>Impack</i> 18
1.	Sasaran Strategis Pertama 22
2.	Sasaran Strategis Kedua 27
3.	Sasaran Strategis Ketiga 33
4.	Sasaran Strategis Keempat 36
5.	Sasaran Strategis Kelima 44
C.	Realisasi Anggaran 67
BAB IV	PENUTUP 76
A.	Kesimpulan 76
B.	Saran 78

LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja Polda Lampung T.A. 2021.
2. Kep Kapolda Lampung Nomor : Kep/467/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 perihal penetapan IKU di lingkungan Polda Lampung 2020-2024.
3. Penghargaan yang diperoleh Satker Polda Lampung T.A. 2021.

DAFTAR TABEL

NO	JUDUL	HAL
1.	Perjanjian Kinerja Polda Lampung T.A. 2021	13
2.	<i>Dashboard</i> Nilai NPSS Polda Lampung Tahun 2021	17
3.	NPSS Polda Lampung Tahun 2019-2021	17
4.	Capaian Kinerja Polda Lampung T.A. 2021	18
5.	Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKU indeks keamanan dan ketertiban	19
6.	Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKU indeks pemeliharaan kamtibmas yang partisipatif	22
7.	Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKU indeks penegakkan hukum	28
8.	Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKP Indeks profesionalitas personel	34
9.	Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKU indeks dukungan sarpras dan peralatan	37
10.	Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKP indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	39
11.	Rekapitulasi nilai indeks SPBE satker di Polda Lampung	40
12.	Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKP nilai pengelolaan informasi dan pemberitaan	42
13.	Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKP indeks penguatan implementasi kebijakan	45
14.	Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKP Indeks Tatakelola Kepolisian TAB 2020	49
15.	Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKU indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan administrasi kepolisian	51
16.	Hasil kajian IKM Polda Lampung T.A. 2021	52
17.	Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKP persentase penanganan pengaduan masyarakat	55
18.	Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKP persentase Persentase penyelesaian pelanggaran personel	59
19.	Data perbandingan jumlah penyelesaian pelanggaran dengan jumlah	60

NO	JUDUL	HAL
	pelanggaran personel yang terjadi TAB	
20.	Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKP persentase penyelesaian masalah hukum	62
21.	Data jumlah masalah hukum yang terjadi TAB 2021	64
22.	Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKP nilai kinerja anggaran	66
23.	Perbandingan nilai kinerja anggaran empat tahun terakhir	67
24.	Perbandingan pagu dan realisasi anggaran Polda Lampung 2019-2021	69
25.	Program anggaran Polda Lampung T.A. 2021	69
26.	Realisasi anggaran persatker Polda Lampung T.A. 2020	71
27.	Sasaran Strategis Polda Lampung	76
28.	IKU dan IKP Polda Lampung	77

DAFTAR GAMBAR

NO	JUDUL	HAL
1.	Peta Strategi Polda Lampung tahun 2020-2024	10
2.	Sebaran kinerja indeks keamanan dan ketertiban T.A. 2021	20
3.	Dinamika indeks keamanan dan ketertiban selama TAB 2021	21
4.	Dinamika indeks kamtibmas pada 14 Polres	21
5.	Sebaran kinerja indeks harkamtibmas T.A. 2021	23
6.	Dinamika indeks harkamtibmas selama TAB 2021	24
7.	Kontribusi komponen penyusunan indeks harkamtibmas	25
8.	Dinamika Indeks harkamtibmas pada 14 Polres	26
9.	Sebaran kinerja indeks penegakan hukum TAB 2021	28
10.	Dinamika indeks penegakan hukum selama TAB 2021	29
11.	Kontribusi komponen penyusun indeks penegakan hukum	30
12.	Dinamika indeks penegakan hukum pada 14 Polres	31
13.	Dinamika kasus menonjol T.A. 2021	32
14.	Dinamika kasus kejahatan jalanan T.A. 2021	32
15.	Dinamika kasus penyalahgunaan narkoba T.A. 2021	32
16.	Dinamika indeks profesionalitas SDM selama TAB 2021	34
17.	Kontribusi kinerja komponen penyusunan indeks Profesionalitas personel TAB 2021	35
18.	Dinamika indeks dukungan sarpras dan peralatan pada TAB 2021 ...	37
19.	Kontribusi kinerja komponen indeks dukungan sarpras dan peralatan	38
20.	Dinamika pengelolaan informasi dan pemberitaan pada TAB 2021 ..	42
21.	Kontribusi kinerja komponen nilai pengelolaan informasi dan pemberitaan	43
22.	Dinamika indeks penguatan implementasi kebijakan 2021	46
23.	Kotribusi penyusunana indeks penguatan implementasi kebijakan TAB 2021.....	46
24.	Kontribusi kinerma penyusun nilai penguatan kapabilitas organisasi TAB 2021	47
25.	Kontribusi penyusunan nilai penguatan kapasitas organisasi TAB	48

NO	JUDUL	HAL
	2021	
26.	Tujuh prinsip dalam penilaian ITK	48
27.	Timeline kegiatan penilaian ITK	49
28.	Sebaran skor ITK pada 12 Polres Polda Lampung TAB 2021	50
29.	Sebaran kinerja indeks pelayanan kepolisian Polda Lampung TAB 2021	53
30.	Perbandingan IKM pelayanan administrasi kepolisian satker TAB 2021	53
31.	Pencapaian realisasi IKM dibanding target nasional tahun 2021	54
32.	Dinamika realisasi kinerja presentase penanganan dumas dan konversi kinerja penanganan dumas TAB 2021	56
33.	Perbandingan penanganan/penyelesaian dumas dalam tiga tahun terakhir	56
34.	Perbandingan persentase penyelesaian dumas tiga tahun terakhir	57
35.	Dinamika realisasi kinerja persentase penyelesaian pelanggaran personel TAB 2021	59
36.	Perbandingan penyelesaian jenis pelanggaran personel 2019-2021	60
37.	Dinamika realisasi kinerja persentase penyelesaian masalah hukum TAB 2020	62
38.	Kontribusi IKP persentase penyelesaian masalah hukum TAB 2021 ..	63
39.	Perbandingan nilai kinerja anggaran Polda Lampung periode 2019-2021	67



LAPORAN KINERJA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG T.A. 2021

I. Pendahuluan

A. Umum.

Kepolisian di negara Republik Indonesia memiliki posisi dan peran yang sangat strategis dalam memelihara situasi keamanan dan ketertiban. Saat ini institusi Polri memiliki satuan kewilayahan sebanyak tiga puluh empat kepolisian daerah (Polda), hal ini sejalan dengan sistem pemerintahan daerah. Oleh karena itu keberadaan Kepolisian Daerah Lampung, memegang peran penting dalam memelihara situasi keamanan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum di Provinsi Lampung. Hal ini tidak lepas dari eksistensi Polda Lampung dalam mendukung mewujudkan sasaran strategis Polri. Oleh karena itu laporan kinerja Polda Lampung, menjadi salah satu bagian penting dari keberhasilan Polri dalam menjalankan amanat Undang-undang Kepolisian.

Tahun 2021 merupakan tahun kedua dari Renstra Polda 2020-2024, dan melihat perkembangan lingkungan strategis, terdapat beberapa permasalahan sangat kompleks dan terkait dengan berbagai pemangku kepentingan pada skala lokal kedaerahan, yang berdampak pada situasi keamanan secara nasional, terlebih khusus dalam menghadapi pandemi Covid19 dan intoleransi radikalisme. Situasi ini dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain secara internal evaluasi terhadap tataran struktur organisasi tingkat Polres dan Polsek yang dihadapkan pada dinamika situasi lingkungan strategis yang mengalami anomali, sehingga fungsi dan ukuran organisasi perlu adanya penyesuaian, demikian juga pola pikir dan budaya kerja harus optimal berorientasi pada kinerja, implementasi kebijakan organisasi yang harus prediktif, kualitas peningkatan pelayanan kepolisian

yang perlu dikembangkan dengan memanfaatkan sarana TIK, terlebih pelayanan administrasi kepolisian sebagai layanan dasar publik, seperti pada pelayanan di SPKT, pelayanan SKCK, pelayanan Satpas dan pelayanan Samsat.

Sedangkan pada sisi lain secara eksternal, situasi global yang ditandai dengan banyak dan mudahnya saluran masyarakat untuk menyerap informasi dan budaya global tanpa batas. Hal ini lambat laun berdampak pada pola tindak dan perilaku masyarakat dalam memandang tatanan sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, ditambah lagi budaya permisif dan mudah dipicunya masyarakat dengan isu yang memancing terjadinya konflik sosial yang bernuansa perselisihan sosial budaya, SARA, batas wilayah dan sumber daya alam. Kesemuanya itu distimulan oleh tekanan kebutuhan hidup, situasi perekonomian sampai pada timbul persaingan yang tidak sehat, disamping pertambahan jumlah penduduk dan kerusakan alam.

Trend indeks pembangunan manusia (IPM) tahun 2021 provinsi Lampung masih menunjukkan yang terendah di Pulau Sumatera, yakni sebesar 69,90, tetapi kondisi ini menunjukkan kemajuan yang cukup baik di dalam internal provinsi Lampung, status pembangunan manusia masih tetap berstatus "sedang", walaupun masih berada dibawah level nasional, yang saat ini telah berstatus "tinggi", mencapai angka 71,94. Peningkatan IPM di tingkat provinsi Lampung ini juga tercermin pada level kabupaten/kota. Selama periode 2020 hingga 2021, seluruh kab/kota di prov. Lampung mengalami peningkatan. Pada periode ini, tercatat empat kabupaten dengan kemajuan pembangunan manusia yang meningkat, yaitu Kota Metro naik sebesar 0,647%, Kabupaten Mesuji 0,644%, kabupaten Pesisir Barat 0,610% dan Kabupaten Pesawaran 0,532%. Kemajuan pembangunan manusia di empat kabupaten tersebut dikarenakan perbaikan dimensi standar hidup layak. Sementara itu, kemajuan pembangunan manusia mengalami pelambatan di empat Kabupaten, yaitu Lampung Barat turun 0,68%, Pringsewu sebesar 0,55%, Way Kanan turun sebesar 0,48% dan Lampung Tengah sebesar 0,42%

Secara umum IPM periode 2020-2021, memberikan indikasi bahwa kondisi masyarakat Lampung mengalami peningkatan dibanding tahun 2019-2020, hal ini dimungkinkan karena dampak dari pandemi covid19 mulai dapat dikendalikan dimana kesehatan masyarakat terutama yang terkena covid19 banyak yang sembuh dan mulai menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan kemasyarakatan lainnya. Perekonomian provinsi Lampung tercatat pada triwulan III 2021 tumbuh sebesar 3,05% apabila dibandingkan dengan triwulan III 2020, ditandai dengan meningkatnya PDRB berdasarkan harga konstan dari triwulan III 2020 sebesar Rp. 62.536,85 milyar menjadi Rp. 64.443,67 milyar.

Dari fakta situasional tersebut, maka aktualisasi tupoksi Polri baik pelayanan administrasi kepolisian, maupun tindakan operasional kepolisian yang bersifat pre-emptif, preventif dan penegakan hukum Polda Lampung berupaya untuk menjaga kesetabilan dalam pembangunan di Provinsi Lampung khususnya kontribusi terhadap mempertahankan dan meningkatkan sektor perekonomian. Selanjutnya untuk menghadapi pembangunan berikutnya pada tahun 2022 dalam Renstra 2020-2024, maka Polda Lampung sejalan dengan kebijakan Kapolri Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prawbowo, M.Si. menuju Polri yang presisi dengan transformasi pada empat bidang mulai dari organisasi, operasional, pelayanan dan pengawasan, hal ini sebagai upaya yang terus menerus meningkatkan performa kinerja guna memenuhi ekspektasi masyarakat. Terutama dalam menghadapi kompleksitas permasalahan dan beragam keinginan masyarakat, khususnya dalam peningkatan pemeliharaan kamtibmas, peningkatan pelayanan kepolisian dan optimalisasi penegakan hukum yang berkeadilan. Oleh karena itu menjadi salah satu pertimbangan penting bagi Polda Lampung untuk terus melakukan introspeksi, melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, penataan organisasi yang tepat dan memperkuat fungsi pengawasan, guna memantapkan jati diri Polri yang seutuhnya. Selanjutnya dengan disajikannya Laporan Kinerja Polda Lampung ini, menjadi representasi dari wujud pertanggungjawaban kinerja dari segenap personel Kepolisian Daerah Lampung tahun anggaran 2021.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.

Sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, dimana dalam peraturan tersebut diterangkan mengenai kedudukan, tugas dan fungsi kepolisian daerah, dan struktur organisasi Polda Lampung sebagai berikut :

1. Tugas

Tugas pokok Polri secara umum sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a) memelihara Keamanan dan Ketertiban masyarakat;
- b) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;
- c) menegakan hukum.

Selanjutnya Kepolisian Daerah sebagaimana Perpol Nomor 14 Tahun 2018 adalah alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan

ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan lingkup tugas sebagai berikut :

- a) Melaksanakan fungsi kepolisian umum baik di bidang preventif maupun di bidang represif.
- b) Melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan koordinasi serta pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) berdasarkan UU Nomor 8 tahun 1981 dan peraturan perundang undangan lainnya.
- c) Membina dan mengawasi pelaksanaan fungsi kepolisian khusus yang diemban oleh alat/badan pemerintah yang mempunyai kewenangan kepolisian terbatas berdasarkan undang-undang.
- d) Membina kemampuan dan kekuatan serta pelaksanaan fungsi penertiban dan penyelamatan masyarakat dalam rangka mengemban system kamtibmas yang bersifat Swakarsa.
- e) Melakukan tugas-tugas lain yang diemban oleh peraturan perundang-undangan.
- f) Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

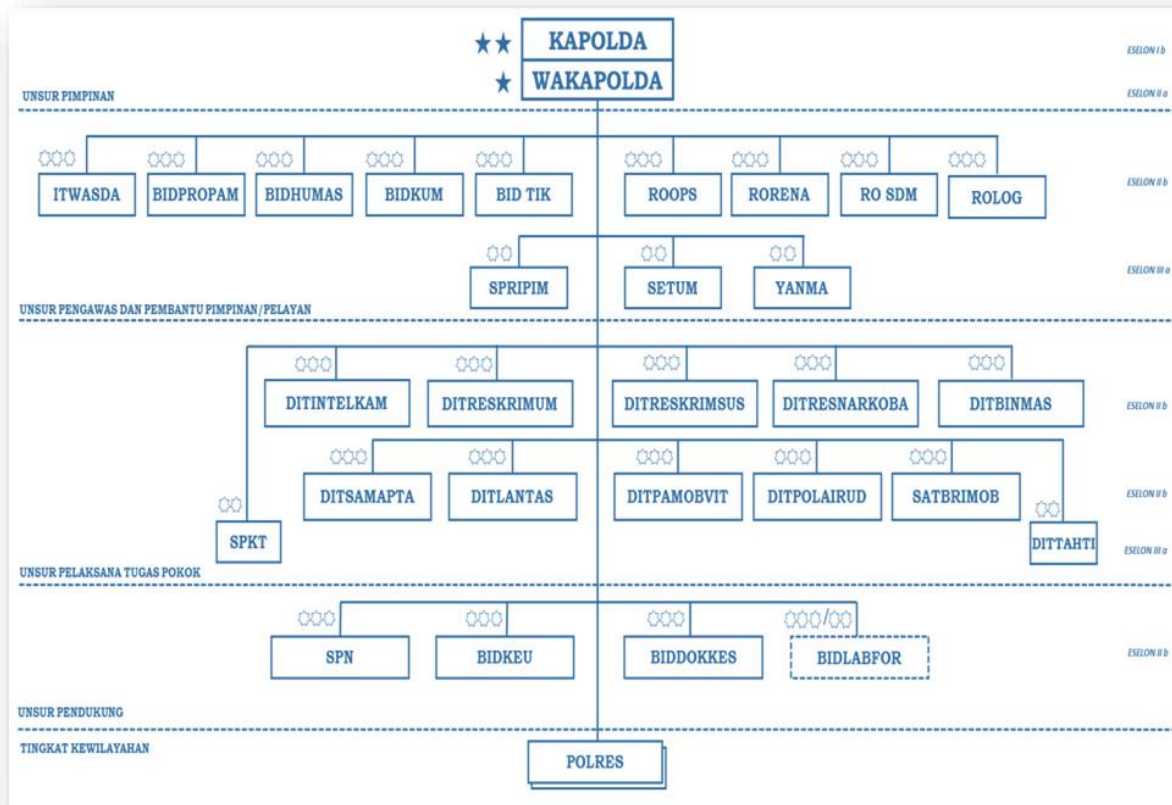
2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Perpol Nomor 14 Tahun 2018, maka Polda Lampung menyelenggarakan fungsi kepolisian sebagai berikut :

- a) pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, permintaan bantuan atau pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri, dan pelayanan surat-surat izin atau keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) pelaksanaan intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian dan intelijen teknologi, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas, maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polda dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri;

- c) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi, laboratorium forensik lapangan, pembinaan dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta pengawasan proses penyidikan;
- d) pelaksanaan sabhara kepolisian, yang meliputi kegiatan patroli mencakup pengaturan, penjagaan, pengawalan, pengamanan kegiatan masyarakat, dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa, serta pengamanan objek khusus yang meliputi *Very Very Important Person (VVIP)*, *Very Important Person (VIP)*, tempat pariwisata, dan objek vital khusus lainnya;
- e) pelaksanaan lalu lintas kepolisian, yang meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli (turjawali) lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, serta registrasi dan identifikasi (regident) pengemudi dan kendaraan bermotor, dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas);
- f) pelaksanaan kepolisian perairan, yang meliputi kegiatan patroli termasuk penanganan pertama tindak pidana, pencarian dan penyelamatan kecelakaan/Search and Rescue
- g) (SAR) di wilayah perairan, pembinaan masyarakat pantai atau perairan dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan;
- h) pembinaan masyarakat, yang meliputi perpolisian masyarakat (polmas), pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum, tumbuh kembangnya peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban, terjalinnya hubungan Polri dengan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas kepolisian, serta pembinaan teknis dan pengawasan kepolisian khusus termasuk satuan pengamanan; dan
- i) pelaksanaan fungsi-fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Struktur Organisasi Polda Lampung



C. Peran Strategis.

Polda Lampung memiliki peran yang strategis dalam mendukung tugas fungsi institusi Polri, yakni sebagai satuan kewilayahan di pulau Sumatera yang menjadi pintu gerbang lalu lintas angkutan manusia, barang dan jasa dari dan antar Pulau Jawa-Sumatera, secara spesifik peran ini terkait dengan tugas mengawal, memelihara dan menjaga situasi kamtibmas mulai dari perjalanan angkutan manusia, barang dan jasa sepanjang melewati daerah hukum Polda Lampung. Tentunya dalam pelaksanaan tugas ini Polda Lampung memberikan kontribusi dalam merumuskan, mengkoordinasikan dalam pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan tugas kepolisian di daerah hukum Polda Lampung dan jajaran satuan kewilayahan yang terdiri dari satu Polresta, dan tiga belas Polres, agar dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Tugas dalam menyiapkan perumusan kebijakan dipandang sangat strategis, karena berkaitan dengan menyiapkan berbagai kebijakan kewilayahan dalam mendukung institusi Polri dengan merealisasikan berbagai petunjuk dan arahan pelaksanaan tupoksi preemtif, preventif dan penegakan hukum di daerah hukum Polda Lampung. Oleh karena itu dalam menyiapkan kebijakan dan instrumen harus dilakukan secara cermat. Kesalahan dalam

menyiapkan kebijakan akan memiliki dampak yang besar bagi kegagalan pelaksanaan tugas sebagai mana tersebut di atas.

Sedangkan dalam perjalanan tupoksi tersebut berperan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan serta tidak kalah pentingnya adalah kualitas keberhasilan dari kebijakan kewilayahan tersebut dapat optimal diimplementasikan oleh semua satuan kerja di lingkungan Polda Lampung, sehingga dampak dari kebijakan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu Polda Lampung sebagai koordinator pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian di daerah Lampung harus mampu berperan optimal sebagai penggerak (*trigger mechanism*).

II. Perencanaan Kinerja

Dalam Rencana Strategis Polda Lampung tahun 2020-2024 perubahan telah ditetapkan dalam menjalankan visi, misi dan tujuan organisasi. Polda Lampung merupakan bagian dari Polri sebagai institusi yang mandiri, berwawasan global, berorientasi nasional dan bertindak lokal, terus meningkatkan sinergitas dan koordinasi dengan semua *stakeholder* dalam memberikan dan melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan menegakkan hukum demi rasa keadilan bagi masyarakat. Adapun visi, misi dan tujuan yang telah dirumuskan tersebut, diarahkan dengan semangat soliditas untuk membangkitkan dan mendorong seluruh personel Polda Lampung, guna mewujudkan personel Polri yang prediktif, responsibilitas dan transparansi yang berkeadilan dalam melaksanakan tupoksi, dengan menjunjung tinggi budaya dan kearifan lokal, yang diimbangi dengan akhlak dan moral yang tinggi serta mampu meningkatkan daya kreativitas dan inovasi dalam menghadapi tantangan tugas dan kehidupan masyarakat dalam menegakkan hukum yang profesional dan proporsional.

A. Visi

“Terwujudnya daerah hukum Polda Lampung yang aman dan tertib.”

Visi tersebut diatas merupakan turunan dari Visi Polri dan dioperasionalkan melalui penjelasan kata-kata kunci dari kalimat visi tersebut, mengandung makna:

- Daerah hukum Polda Lampung sebagai bagian wilayah negara Indonesia yang aman, bebas dari segala bentuk ancaman.
- Daerah hukum Polda Lampung sebagai wilayah negara Indonesia yang tertib.

B. Misi

Mengacu pada tugas, fungsi dan kewenangan yang telah diamanatkan UU Polri dan Perpol Nomor 14 Tahun 2018 tentang SOTK satuan kewilayahan tingkat Polda dan Perkap Nomor 12 Tahun 2017 tentang syarat dan tatacara pembagian daerah hukum Polri, serta penjabaran dari misi dan tujuan dari Renstra Polri 2020-2024, maka terdapat tiga pilar yang menjadi misi Polda Lampung yaitu:

- **Melindungi**, yakni:
Meningkatkan upaya pencegahan dari gangguan kamtibmas, guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat, pemerintah dan segenap sumber daya provinsi Lampung yang terbebas dari gangguan kamtibmas.

- **Mengayomi**, yakni:
Memberikan jaminan terhadap kehidupan masyarakat Lampung dengan meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan daya dukung dan kerja sama untuk mengantisipasi segala bentuk gangguan kamtibmas.
- **Melayani**, yakni:
membantu masyarakat untuk memperoleh pelayanan kepolisian, baik dalam penegakan hukum maupun layanan dasar publik secara profesional dan berkeadilan.

Melindungi diartikan sebagai tanggung jawab preventif dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya Polda Lampung dalam memperkuat Polri (satuan induk) dalam melakukan pencegahan demi mewujudkan keamanan dan ketertiban. **Mengayomi** diartikan sebagai tanggung jawab preemtif bahwa pengelolaan sumber daya Polda Lampung sebesar-besarnya untuk mewujudkan perlindungan pengayoman dan pelayanan dalam kehidupan masyarakat, dengan dukungan kesadaran hukum yang partisipatif. Maka dengan misi ini Polda Lampung berharap senantiasa memberikan perhatian penuh kepada seluruh *stakeholder*, mulai dari komunitas/pranata sosial masyarakat, instansi pemerintahan, dunia usaha, dan segenap sumber daya kehidupan yang ada. **Melayani** diartikan baik sebagai aparatur pengelola penegakan hukum yang berprinsip azas legalitas dalam memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kepolisian.

Ketiga hal di atas dilakukan secara bertanggung jawab berlandaskan pedoman hidup Tribrata dan pedoman kerja Catur Prasetya, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah bagi jati diri Polri untuk kepentingan bersama

C. Tujuan

Menjabarkan misi Polri menjadi tujuan Polda Lampung, maka tujuan Polda Lampung adalah:

1. Terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan hukum secara berkeadilan;
3. Mewujudkan Polda Lampung yang profesional.
4. Modernisasi pelayanan Polda Lampung.
5. Menerapkan manajemen yang terintegrasi dan terpercaya.

D. Sasaran Prioritas

1. Harkamtibmas yang kondusif guna menjaga stabilitas Kamtibmas

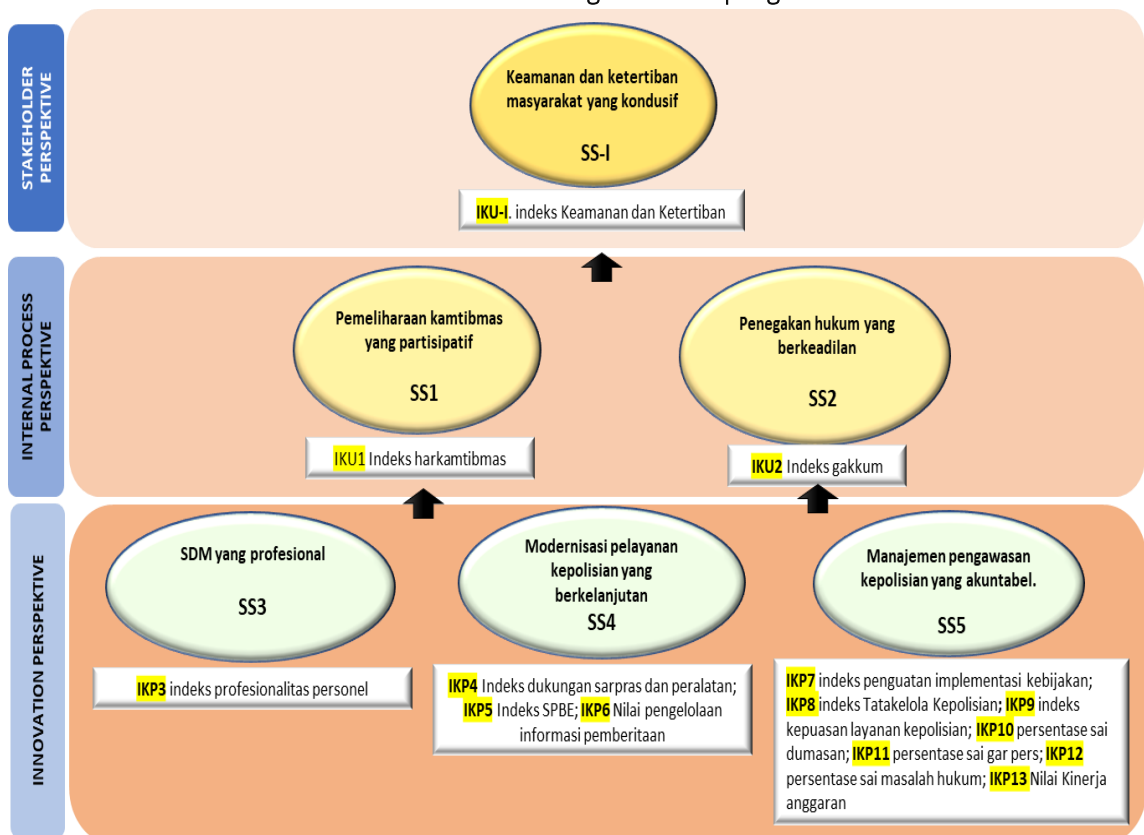
dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial;

2. Mengoptimalkan Pelayanan publik Polri;
3. Penegakkan hukum secara berkeadilan dan terpercaya;
4. Meningkatkan Profesionalisme dan kesejahteraan SDM Polri;
5. Pengembangan Almitsus Kepolisian yang modern secara bertahap dan berkelanjutan;
6. Regulasi dan sistem pengawasan yang efektif dan terpercaya;

E. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Polda Lampung sesuai dengan Kep Kapolda Lampung Nomor: Kep/464/IV/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Renstra Polda Polda Lampung 2020-2024, menggunakan pendekatan metode *Balance Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif yakni *stakeholder perspective*, *customers prespective*, *internal process perspective* dan *innovation perspective* yang tergambar dalam peta strategis renstra Polda Lampung 2020-2024 sebagai berikut;

Gambar 1. Peta Strategi Polda Lampung tahun 2020-2024



Mengait gambar tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa sasaran-sasaran strategis Polda Lampung saling terkait mendukung pencapaian Visi dan Misi

Polri yang selaras dengan *Grand Strategi* Polri. Sasaran strategis (SS) Polda Lampung yang merupakan rumusan kalimat pernyataan yang menggambarkan pernyataannya singkat, jelas dan mudah dipahami; merupakan sasaran-sasaran yang bersifat penting dan prioritas tinggi pada Renstra 2020-2024, merupakan kalimat pernyataan kondisional dan bersifat kualitatif, bukan kuantitatif.

Peta Strategi yang telah disusun ini menggambarkan juga hubungan sebab akibat antar perspektif. Pengecekan hubungan sebab akibat pencapaian SS pada satu perspektif mendukung pencapaian SS pada perspektif di atasnya, dilakukan dengan membaca dari bawah ke atas, yakni perspektif *inovasi* harus menjawab "apa yang harus dimiliki Polda Lampung", perspektif *internal process* harus menjawab "apa yang harus dilakukan Polda Lampung untuk menghasilkan untuk kebutuhan rasa aman dan keadilan masyarakat Lampung", dan perspektif *stakeholders* harus menjawab "apa yang diharapkan masyarakat dan negara, dalam hal ini masyarakat dan pemerintahan provinsi Lampung atas eksistensi Polda Lampung"

Selanjutnya dalam SS tersebut tersusun atas indikator-indikator kinerja yang dipilih secara tepat, jelas dan terukur, yang menggambarkan pencapaian keberhasilan dari misi dan tujuan Polda Lampung, dalam metodologi *Balance scorecard* ini terbagi dalam dua jenis indikator kinerja yakni Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Pendukung/penunjang (IKP). Kemudian sasaran strategis pada tiga perspektif pada Peta Strategi Polda Lampung dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Stakeholder Perspective*: Sudut pandang organisasi yang berfokus pada bagaimana organisasi memenuhi harapan *stakeholder* atau Bagaimana Polda Lampung berorientasi pada ekspektasi masyarakat dan pemerintahan. Pada perspektif ini terdiri dari satu sasaran strategis yaitu:

(SS-impack) keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, dengan satu indikator kinerja impack "Indeks keamanan dan ketertiban".

2. *Internal Process Perspective*: Sudut pandang organisasi yang berfokus pada rangkaian proses tupoksi untuk memenuhi keinginan masyarakat, baik pihak eksternal (masyarakat dan pemerintah) yang terkait langsung dengan merasakan atas pelaksanaan tupoksi kepolisian yang diselenggarakan Polda Lampung. dalam memelihara kamtibmas dan penegakan hukum. Pada perspektif ini terdiri dari dua sasaran strategis yaitu:

(SS1) pemeliharaan kamtibmas yang partisipatif, dengan satu indikator kinerja, dengan indikator kinerja utama "Indeks

harkamtibmas”.

(SS2) penegakan hukum yang berkeadilan, dengan satu indikator kinerja utama yaitu “Indeks penegakan hukum”.

3. *Learn and growth Perspective*: yakni Sudut pandang Polda Lampung yang berfokus rangkaian proses pengelolaan kondisi sumber daya internal yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh Polda Lampung untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan *output* atau *outcome* yang sesuai dengan keinginan dan harapan baik dari *internal process* maupun *stakeholder* melalui pengembangan dan pembangunan kapasitas dan kapabilitas organisasi. Pada perspektif ini terdiri dari tiga sasaran strategis yaitu:

(SS3) **sumber daya manusia yang profesional**”, dengan Indikator Kinerja Pendukung yakni; “**Indeks profesionalitas personel**”.

(SS4) **Modernisasi pelayanan Kepolisian yang berkelanjutan**, dengan tiga indikator kinerja pendukung yaitu;

- a) Indeks dukungan sarpras dan peralatan, .
- b) Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik.
- c) Nilai pengelolaan informasi pemberitaan.

(SS5) **Manajemen pengawasan kepolisian akuntabel**, dengan tujuh indikator kinerja pendukung yaitu:

- a) indeks penguatan implementasi kebijakan;
- b) Indeks Tatakelola Kepolisian;
- c) Indeks kepuasan layanan Kepolisian.
- d) Persentase penyelesaian dumas;
- e) Persentase penyelesaian pelanggaran personel;
- f) Persentase penyelesaian masalah hukum.
- g) Nilai kinerja anggaran.

F. Penetapan Kinerja Polda Lampung T.A. 2021

Perjanjian Kinerja Polda merupakan pelaksanaan dari Peraturan Kapolri tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja di Lingkungan Polri. Hal ini merupakan tekad dan janji akan dicapai antar pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberi amanah/tanggung jawab/kinerja. Penetapan kinerja

Polda Lampung T.A. 2021 secara terperinci:

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Polda Lampung T.A. 2021.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target 2021
<i>Stakeholder Perspective</i>			
0.	Keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.	0) Indeks keamanan dan ketertiban	3,2
<i>Internal Process Perspective</i>			
1.	Harkamtibmas yang partisipatif.	1) Indeks pemeliharaan kamtibmas.	72
2.	Penegakan hukum yang berkeadilan	2) Indeks penegakan hukum.	67
<i>learn and growth Perspective</i>			
3.	Sumber daya manusia yang profesional.	3) Indeks profesionalitas personel.	74
4.	Modernisasi pelayanan akepolisian yang berkelanjutan	4) Indeks dukungan sarpras dan peralatan.	70
		5) Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik.	2,2
		6) Nilai pengelolaan informasi dan pemberitaan.	51
5.	Manajemen pengawasan yang akuntabel	7) Indeks penguatan implementasi kebijakan.	72
		8) Indeks Tatakelola Kepolisian.	5,2
		9) Indek kepuasan pelayanan kepolisian.	80
		10) Persentase penanganan pengaduan masyarakat.	63
		11) Persentase penyelesaian pelanggaran personel.	82
		12) Persentase penyelesaian masalah hukum.	91,4
		13) Nilai kinerja anggaran.	74

Sumber : dokumen Rencana Kerja Polda Lampung T.A.2021.

G. Anggaran DIPA T.A. 2021

Target Polda Lampung yang hendak dicapai pada T.A. 2021 merupakan target tahun pertamat dari Renstra Polda Lampung 2020-2024. Adapun jumlah anggaran yang tersedia untuk Polda Lampung menurut DIPA T.A. 2021 adalah sebesar Rp. 1.271.995.008.000,- (satu triliun dua ratus tujuh puluh satu milyar delapan ribu rupiah). **Anggaran tersebut terdiri dari atas 5 (lima) program, yaitu:**

1. Program Profesionalisme SDM Polri.

- a) Tujuan: Terwujudnya postur SDM Polri yang profesional, modern dan terpercaya berdasarkan kompetensi dan kinerja yang optimal melalui infrastruktur SDM yang berkualitas, bermanfaat dan berkelanjutan guna mendukung produktivitas kerja, disiplin dan tanggung jawab personel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya guna

meningkatkan value organisasi.

- b) Kegiatan meliputi:
 - (1) dukungan Manajemen dan Teknis Pengembangan SDM Polri;
 - (2) penyelenggaraan administrasi perawatan pegawai Polri;
 - (3) pengendalian pegawai Polri;
 - (4) pembinaan karier personel Polri;
 - (5) pelayanan psikologi anggota Polri.

2. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.

- a) Tujuan: Terwujudnya stabilitas politik dan keamanan melalui penegakkan hukum yang profesional, proporsional dan akuntabel serta menjunjung tinggi Hak asasi manusia;
- b) Kegiatan:
 - (1) penindakan tindak pidana perairan;
 - (2) penindakan tindak pidana lakalantas
 - (3) dukungan manajemen dan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
 - (4) penindakan tindak pidana umum;
 - (5) penindakan tindak pidana narkoba ;
 - (6) penindakan tindak pidana ekonomi khusus;
 - (7) penindakan tindak pidana korupsi;
 - (8) penindakan tindak pidana siber;
 - (9) penindakan tindak pidana tertentu;
 - (10) koordinasi dan pengawasan PPNS;
 - (11) pengawasan penyidikan.

3. Program modernisasi almatsus dan sarana prasarana Polri.

- a) Tujuan: terpeliharanya Harkamtibmas melalui tata kelola dan modernisasi sarana dan prasarana aparatur Polri guna mendukung pelaksanaan tugas fungsi pembinaan dan operasional;
- b) Kegiatan:
 - (1) pengembangan peralatan Polri;
 - (2) dukungan manajemen dan teknik Sarpras;

(3) pengembangan fasilitas dan konstruksi Polri.

4. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

- a) Tujuan: terpelihara Kamtibmas melalui peningkatan kemampuan manajemen operasional dan informasi kepolisian serta integrasi lintas sektoral yang fokus pelaksanaan tugas fungsi preemtif dan preventif;
- b) Kegiatan:
- (1) dukungan manajemen dan teknis pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - (2) analisis keamanan;
 - (3) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang politik;
 - (4) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang ekonomi;
 - (5) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang sosial budaya;
 - (6) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan negara.
 - (7) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan khusus;
 - (8) kerjasama keamanan dan ketertiban K/L;
 - (9) pembinaan potensi keamanan;
 - (10) pembinaan pelayanan fungsi sabhara;
 - (11) penyelenggaraan pengamanan objek vital ;
 - (12) peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang lalulintas ;
 - (13) penyelenggaraan kepolisian perairan;
 - (14) pengendalian operasi Kepolisian;
 - (15) pelacakan dan penangkalan keamanan dan ketertiban;
 - (16) penanggulangan keamanan dalam negeri.

5. Program Dukungan Manajemen.

- a) Tujuan: terwujudnya *good governance* dan *clean government* melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan kemampuan manajemen dan informasi Kepolisian , sinkronisasi perencanaan kebijakan program dan

anggaran dan integrasi lintas sektor.

- b) Kegiatan meliputi:
- (1) pelayanan administrasi keuangan Polri;
 - (2) penerangan masyarakat;
 - (3) penyelenggaraan teknologi informasi;
 - (4) pelayanan kesehatan Polri;
 - (5) dukungan pelayanan internal perkantoran polri;
 - (6) pengelolaan multimedia;
 - (7) penyusunan kebijakan Polri;
 - (8) penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Polri;
 - (9) reformasi birokrasi Polri;
 - (10) manajemen anggaran;
 - (11) pengelolaan informasi dan dokumentasi
 - (12) pertanggungjawaban profesi;
 - (13) penyelenggaraan pengamanan internal Polri;
 - (14) penegakkan tata tertib dan disiplin Polri;
 - (15) penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan;
 - (16) pemberian bantuan dan nasehat hukum;
 - (17) penyusunan dan penyuluhan hukum.

III. Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Polda Lampung

Akuntabilitas kinerja Polda Lampung merupakan kinerja secara kolektif yang diperoleh dari tiga puluh sembilan satuan kerja, dengan didasari atas Perjanjian Kinerja pada seluruh level satuan kerja yang dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala sehingga diperoleh capaian kinerja Polda Lampung Tahun 2021 sebagai berikut ini:

Tabel 2. *Dashboard* Nilai Pencapaian sasaran strategis (NPSS) Polda Lampung 2021

Perspektif	Bobot	Kode SS	Nama SS	Jml IKU	NSS	Status NSS ¹	Skors NSS	NKP	Status NKP
<i>Stakeholder</i>	33,33%	SS0	Keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.	1	120,00%		120,00%	40,00%	
<i>Internal Proses</i>	33,33%	SS1	Harkamtibmas yang partisipatif	1	120,00%		120,00%	40,00%	
		SS2	Penegakan hukum yang berkeadilan.	1	120,00%				
<i>Learn and growth</i>	33,33%	SS3	Sumber daya manusia yang profesional	1	110,99%		113,58%	37,86	
		SS4	Modernisasi pelayanan kepolisian yang berkelanjutan	3	114,70%				
		SS5	Manajemen pengawasan kepolisian yang akuntabel	7	115,05%				
Nilai Pencapaian Sasaran Strategis								117,85%	

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan. NPSS Polda Lampung selama tiga tahun terakhir dari 2019-2021 sebagai berikut:

Tabel 3. NPSS Polda Lampung 2019-2021

No	Kinerja	Tahun			Kenaikan 2020 Ke 2021
		2019	2020	2021	
1.	NPSS	112,31%	114,38%	117,85%	3,03%
2.	<i>Stakeholder Perspective</i>	27,54%	40,00%	40,00%	0,00%
3.	<i>Internal Perspective</i>	26,96%	36,82%	40,00%	8,63%
4.	<i>Learn & growth Perspective</i>	29,10%	37,56%	37,86%	0,80%

NPSS tahun 2021 sebesar 117,85%, hal ini lebih tinggi dibandingkan NPSS tahun 2020, naik sebesar 2,83%. Selanjutnya nilai perspektif *stakeholders* 2021 konstan, tidak mengalami kenaikan, untuk perspektif *internal process* 2021 naik sebesar 8,63%. dan Perspektif *learn & growth* juga naik sebesar 0,18% dari tahun 2020. Secara terperinci capaian indikator kinerja Utama pada masing-masing Sasaran Strategis dapat dilihat pada tabel berikut ini:

¹ Status NSS dan Status NKP adalah status yang menunjukkan ekspektasi dari pencapaian dari NSS dan NKP, yang dibagi dalam tiga warna status sebagai berikut:

Hijau	Kuning	Merah
100 ≤ X ≤ 120	80 ≤ X < 100	X < 80
Memenuhi ekspektasi	Belum memenuhi ekspektasi	Tidak memenuhi ekspektasi

Tabel 4. Capaian Kinerja Polda Lampung T.A. 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target 2021	Realisasi	Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>					
0.	Keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif	0) Indeks keamanan dan ketertiban	3,2	4,69	120,00%
<i>Internal Process Perspective</i>					
1.	Harkamtibmas yang partisipatif	1) Indeks pemeliharaan kamtibmas.	72	97,54	120,00%
2.	Penegakan hukum yang berkeadilan	2) Indeks penegakan hukum.	67	89,18	120,00%
<i>Learn & growth Perspective</i>					
3.	Sumber daya manusia yang profesional	3) Indeks profesionalitas personel.	74	82,13	110,99%
4.	Modernisasi pelayanan kepolisian yang berkelanjutan	4) Indeks dukungan sarpras dan peralatan.	70	82,27	117,53%
		5) Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik.	2,2	2,29	104,10%
		6) Nilai pengelolaan informasi dan pemberitaan.	51	73,49	120,00%
5.	Manajemen pengawasan kepolisian yang akuntabel	7) Indeks penguatan implementasi kebijakan.	72	89,42	120,00%
		8) Indeks Tatakelola Kepolisian.	5,2	5,25	100,96%
		9) Indeks kepuasan pelayanan kepolisian.	80	96,19	120,00%
		10) Persentase penanganan pengaduan masyarakat.	63%	78,82%	120,00%
		11) Persentase penyelesaian pelanggaran personel.	82%	100%	120,00%
		12) Persentase penyelesaian masalah hukum.	91,4%	100%	109,41%
		13) Nilai kinerja anggaran.	74	85,10	115,00%

B. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja.

Analisa dan evaluasi capai kinerja dari masing-masing sasaran strategis pada setiap perspektif menggambarkan penjelasan dari keberhasilan maupun kendala kegagalan sebagaimana yang telah ditargetkan dalam pernyataan perjanjian kinerja T.A. 2021, selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut :

Stakeholder Perspective

0. Sasaran Strategis (SS-Impack) :

Keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.

Sasaran Strategis (SS-Impack) Keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, memiliki satu IKU (indikator kinerja utama) yakni **Indeks keamanan dan ketertiban**, yang merupakan sasaran dampak dari sasaran strategis pemeliharaan keamanan dan ketertiban yang partisipatif dan penegakan hukum yang berkeadilan, sebagai amanat Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia, yang diatur dalam Pasal 2, 4, 5 dan 13 yang menunjukkan suatu situasi keamanan dimana masyarakat terjaga, terawat, terpelihara, selamat, terhindar dari mara bahaya serta tingkat terlindunginya masyarakat dari berbagai macam ancaman keamanan, perasaan aman nyaman masyarakat secara psikis dengan keberadaan atau kehadiran peran Polri di tengah masyarakat. Oleh karena itu Polda Lampung memberikan perhatian penuh pada *perspektif stakeholder* ini.

IKU 0 - Indeks keamanan dan ketertiban.

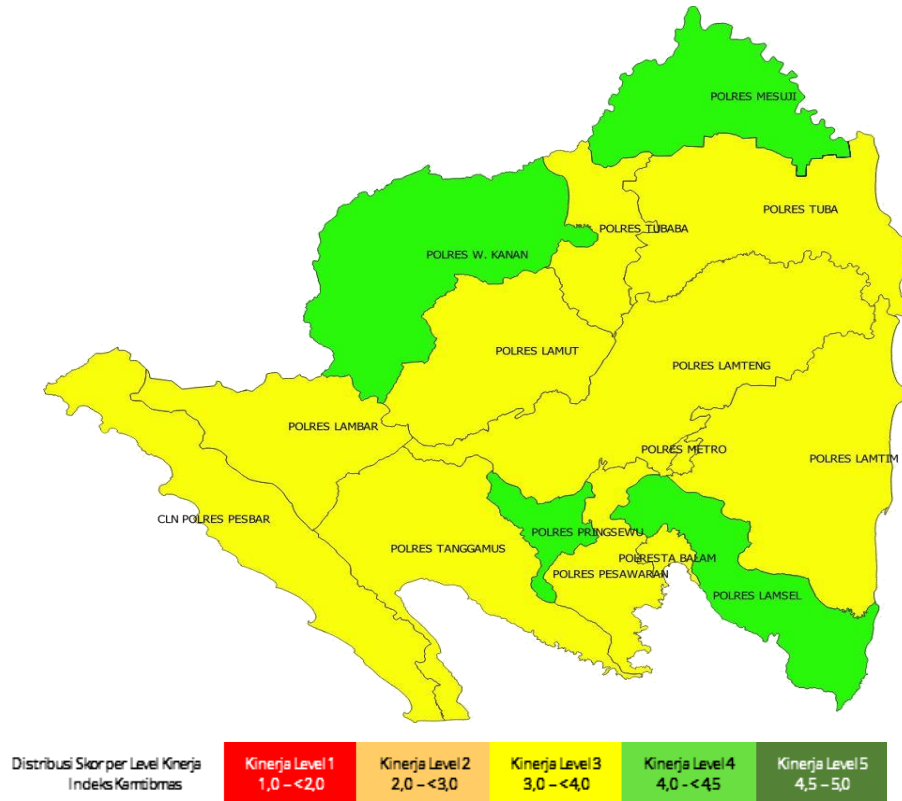
Indeks keamanan dan ketertiban adalah suatu ukuran dalam mengelola situasi keamanan dan ketertiban guna mewujudkan situasi yang kondusif, nilai indeks ini diperoleh dari nilai komposit yang dihasilkan dari dampak keseluruhan tupoksi kepolisian berdasarkan dimensi harkamtibmas dan dan penegakan hukum. Kinerja ini bermanfaat bagi *stakeholder* internal sebagai masukan dalam meningkatkan aktualisasi tupoksi maupun bagi *stakeholder* eksternal dalam mendukung pembangunan di daerah Lampung. Adapun analisis dan evaluasi capaian indikator kinerja ini sebagai berikut:

Tabel 5. Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKU Indeks keamanan dan ketertiban.

<i>SS-impact</i> Keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif						
IKU-0	Indeks keamanan dan ketertiban					
realisasi 2020	2021			kenaikan dari 2020-2021 (%/tahun)	% capaian dengan target jangka menengah	
	target	realisasi	capaian		Target 2022 (3,3)	Target 2023 (3,4)
3,75	3,2	4,69	120,00%	32,27%	120,00%	120,00

Apabila dilihat dari realisasi tahun 2020, maka capaian indeks keamanan dan ketertiban menunjukkan tren kenaikan sebesar 32,27%. Keberhasilan pengelolaan situasi keamanan dan ketertiban ini tentunya didukung oleh kiprah dari seluruh satuan kepolisian di lingkungan Polda Lampung dalam melaksanakan kegiatan operasional kepolisian, baik preemtif, preventif dan penegakan hukum yang sesuai dinamika lingkungan strategis, sehingga memberikan dukungan dan kontribusi bagi keberhasilan program pembangunan pemerintahan daerah provinsi Lampung khususnya, ditandai dengan kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), walaupun hanya naik beberapa digit desimal dari 69,69 menjadi 69,90 apalagi hal di tengah kondisi pandemi *covid19*. Bersama ini pemetaan keamanan dan ketertiban di daerah hukum Polda Lampung berdasarkan kinerja indeks keamanan dan ketertiban dengan skala *likert* 1-5 sebagai berikut:

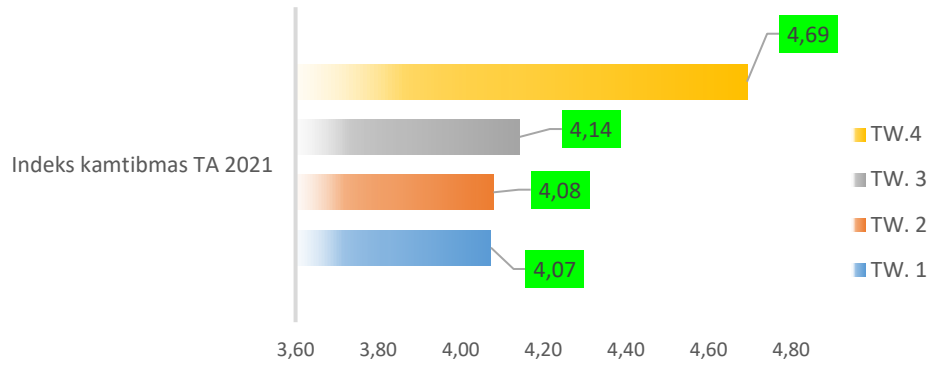
Gambar 2. Sebaran kinerja indeks keamanan dan ketertiban T.A. 2021.



Terlihat seluruh daerah hukum Polda Lampung berwarna kuning berada pada level kinerja 3, artinya indeks keamanan dan ketertiban pada 14 satuan kewilayahan Polres jajaran Polda Lampung berada pada kisaran angka indeks 3,0-<4,0 dan terdapat Polres Lampung Utara yang sudah mencapai level kinerja 4.

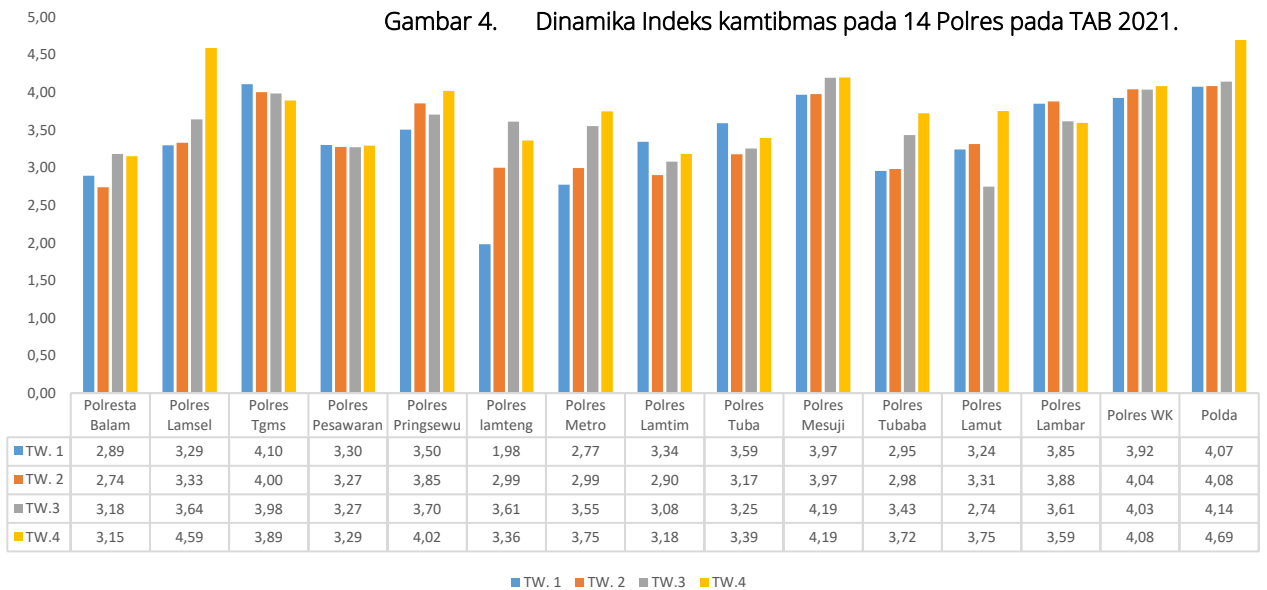
Secara umum beberapa faktor yang mempengaruhi **keberhasilan** dalam pengelolaan situasi keamanan dan ketertiban adalah keterpaduan kegiatan kepolisian; mulai dari pengelolaan dalam kamseltibcar lantas, peningkatan kegiatan *community policing*, peningkatan kegiatan patroli pada daerah rawan gangguan kamtibmas, pengelolaan antisipasi terhadap potensi gangguan kamtibmas, serta penegakan hukum yang berupaya untuk transparan dan berkeadilan, juga didukung peran serta kerjasama pengamanan swakarsa dan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam memelihara situasi kamtibmas setempat. Di samping itu berusaha mendukung dan berupaya optimal bersinergi dengan program-program pembangunan baik pemerintahan pusat maupun daerah dalam meningkatkan pertumbuhan kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan masyarakat di provinsi Lampung. Bersama ini adalah perkembangan indeks keamanan dan ketertiban selama TAB setiap triwulannya dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 3. Dinamika Indeks keamanan dan ketertiban selama TAB 2021



Dari gambar di atas, terlihat bahwa grafik dinamika indeks kamtibmas TAB 2021 berjalan terus naik setiap triwulannya, melebihi target tahun 2021 pada angka indeks 3,2 dengan realisasi mencapai 4,69 dari skala 1-5. Target Indikator kinerja utama ini pada tahun kedua Renstra 2020-2024 berhasil diselesaikan Polda Lampung dan jajaran dengan baik dan lancar. Demikian juga apabila dibandingkan dengan target nasional indeks kamtibmas sebesar 3,2 maka realisasi indeks kamtibmas Polda Lampung sebesar 4,69 atau capaian dari target Polri sebesar 120%. Selanjutnya sebaran indeks keamanan dan ketertiban pada setiap satuan kewilayahan dapat dilihat berikut ini:

Gambar 4. Dinamika Indeks kamtibmas pada 14 Polres pada TAB 2021.



Dari 14 Polres yang ada terlihat beberapa Polres pada triwulan pertama level kinerjanya berada pada kisaran angka indeks 3-4, seperti Polres Lampung Selatan, Tanggamus, Pesawaran, Pringsewu, Lampung Timur, Tulang Bawang, Lampung Utara, Lampung Barat, Way Kanan, tetapi ada tiga Polres berada pada kisaran indeks 1-2 yakni Polresta Bandar Lampung, Polres Tulang Bawang Barat dan Polres Lampung Tengah, sampai memasuki triwulan II, lalu pada triwulan III dan IV sudah stabil semua Polres berada level indeks 3-4. Sehingga akhirnya mengakhiri

tahun 2021 Polda Lampung dan jajaran mampu mengimplementasi amanat visi dan misi pemerintahan presiden Joko Widodo dengan ukuran capaian Indeks kamtibmas yang melebihi target nasional 3,2 yaitu ditutup pada level indeks 4,69.

Internal Process Perspective

1. Sasaran Strategis (SS1) : Harkamtibmas yang partisipatif.

Sasaran Strategis (SS1) Harkamtibmas yang partisipatif, memiliki satu IKU yaitu Indeks pemeliharaan kamtibmas, sasaran kinerja ini merupakan sasaran yang ingin dihasilkan oleh Polda Lampung dalam menciptakan kondusivitas daerah hukumnya melalui pemeliharaan kamtibmas partisipatif sepanjang Renstra 2020-2024 melalui pendekatan kamseltibcar lalu lintas, kegiatan *community policing*, pemenuhan kegiatan patroli, termasuk kegiatan harkamtibmas perairan yang khas, kualitas penanggulangan keamanan berkadar tinggi, pengeolaan antisipasi potensi gangguan, pengamanan objek vital dan pengelolaan tingkat kriminalitas pada 10.000 penduduk. Selanjutnya hasil capaian kinerja pada indikator kinerja pada sasaran strategis ini dijelaskan sebagai berikut:

IKU-1 Indeks pemeliharaan kamtibmas.

Pada indikator kinerja ini, penilaiannya didasari pada ukuran capaian kinerja yang disepakati Polda Lampung dalam memelihara kamtibmas dengan serangkaian pengelolaan daya pencegahan terhadap gangguan kamtibmas ketertiban masyarakat, melalui perhitungan komposit dari delapan komponen yakni; *road savety index*, *Index community policing*, persentase pemenuhan kegiatan patroli, persentase pemenuhan aktivitas harkamtibmas perairan, kualitas penanggulangan keamanan berkadar tinggi, persentase antisipasi potensi gangguan, persentasi pelayanan pengamanan objek vital dan *crime rate*. Adapun analisis dan evaluasi capaian kinerja sebagai berikut:

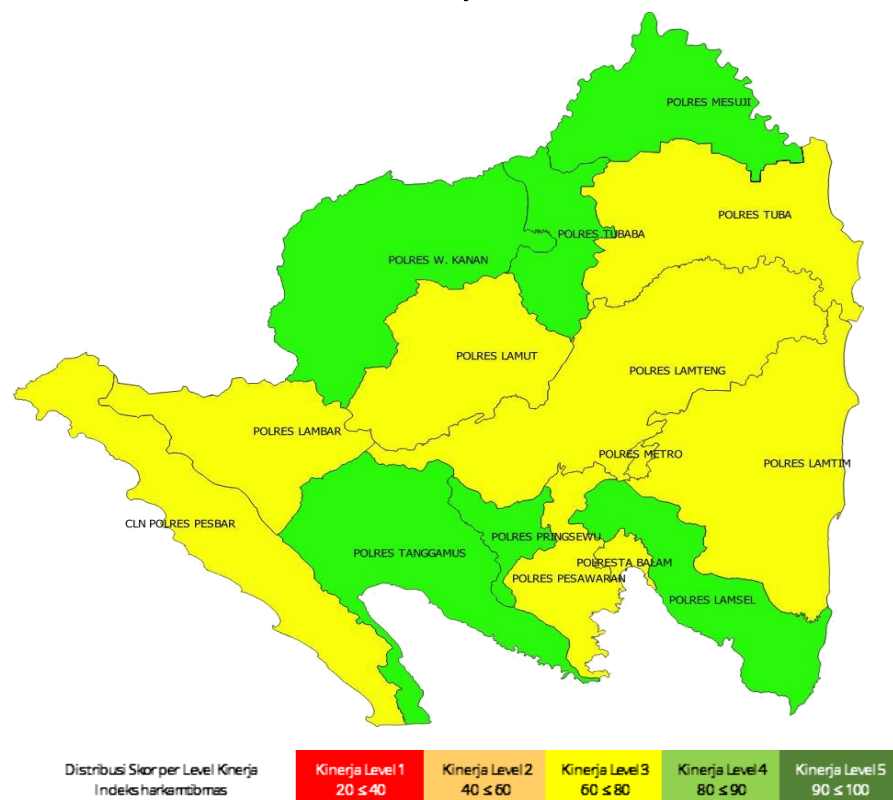
Tabel 6. Analisa dan evaluasi capaian kinerja IKU Indeks pemeliharaan kamtibmas yang partisipatif.

SS-1		Harkamtibmas yang partisipatif				
IKU-1		Indeks pemeliharaan kamtibmas				
Realisasi 2020	2021			kenaikan dari 2020-2021 (%/tahun)	% capaian dengan target jangka menengah	
	target	realisasi	capaian		Target 2022 (73)	Target 2023 (74)
71,68	72	97,54	120%	36,08%	120%	120%

Apabila dilihat dari realisasi TAB, maka capaian pemeliharaan kamtibmas target TAB 2021 tercapai 120%. Keberhasilan dari Indeks pemeliharaan kamtibmas merupakan fakta yang menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2021, kegiatan preemtif dan preventif yang diselenggarakan fungsi lalu lintas, fungsi Binmas, fungsi Samapta, fungsi Polairud, fungsi Pamobvit, dan fungsi Intelkam, secara komplemen berkontribusi dalam pemeliharaan situasi kamtibmas yang partisipatif. Kegiatan operasional fungsi lintas efektif menekan laju fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas, kegiatan fungsi binmas dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk ikut aktif menjaga, memelihara dan mencari solusi pemecahan masalah yang mengganggu kamtibmas, demikian juga fungsi samapta efektif mempersempit ruang gerak pelaku gangguan kamtibmas apapun bentuknya sehingga masyarakat merasakan kenyamanan dalam beraktifitas.

Kemudian fungsi kepolisian perairan, peningkatan aktivitas harkamtibmas perairannya (sambang, patroli dan binlud perairan) ikut andil di dalamnya, kesiapsiagaan pasukan Satbrimob yang tersebar di daerah hukum Polda Lampung juga memudahkan memberikan bantuan *back up* kepada Polres dalam menghadapi gangguan kamtibmas yang berkadar tinggi. Operasi kepolisian yang terselenggara pada TAB 2020 dapat dilaksanakan sesuai perkiraan intelijen, terutama dalam memutus penyebaran virus *covid19*. Berikut ini pemetaan pemeliharaan karmtibmas yang partisipatif berdasarkan kinerja indeks harkamtibmas berdasarkan skala *likert* 1-5 sebagai berikut:

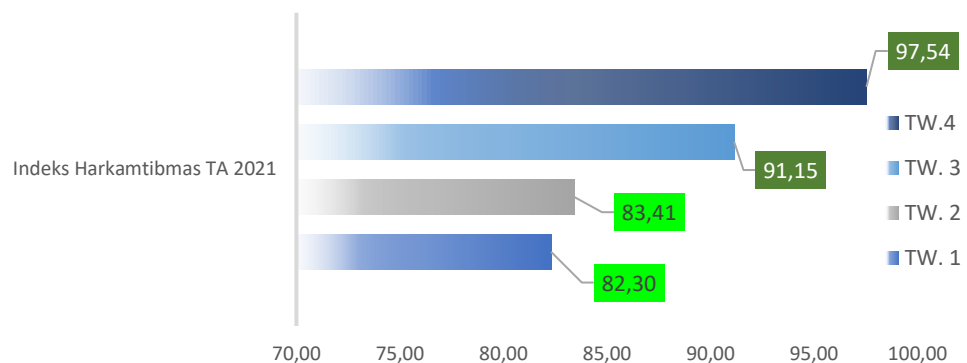
Gambar 5. Sebaran kinerja indeks harkamtibmas T.A. 2021



Terlihat hasil kinerja pemeliharaan kamtibmas di daerah hukum Polda Lampung didominasi oleh warna kuning dan I warna hijau muda, hal ini menunjukkan level kinerja indeks harkamtibmas pada kinerja level 3 dan 4, kinerja level 3 diperoleh Polresta Bandar Lampung, , Polres Lampung Tengah, Metro. Lampung Timur Tulang Bawang, Lampung Utara, dan Lampung Barat. Dan kinerja level 4 diperoleh Polres Lampung Selatan, Pringsewu, Tanggamus, Polres Mesuji, Polres Way Kanan dan Polres Tulang Bawang Barat.

Secara umum beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap keberhasilan dalam pemeliharaan kamtibmas yang partisipatif ini adalah fungsi lalu lintas mampu menekan terjadinya kecelakaan lalu lintas sehingga berpengaruh terhadap *road safety index*, kegiatan *community policing* yang terselenggara selama TAB 2021 memberikan peran aktif masyarakat berpartisipasi dalam harkamtibmas di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing, patroli samapta dapat menekan daerah rawan gangguan kamtibmas, demikian pula aktivitas kegiatan kepolisian perairan secara preemtif dan preventif dapat melindungi, mengayomi masyarakat perairan. Pelayanan pengaman objek vital terselenggara dengan baik di samping meningkatkan PNPB, dan terutama sekali peran fungsi intel dalam memberikan informasi terkait kegiatan deteksi aksi yang diselenggarakan oleh fungsi kepolisian lainnya, termasuk memberikan masukan kepada *stakeholder* dalam mencapai tujuan pembangunan. Selanjutnya penyelenggaraan operasi kepolisian membantu, khususnya dalam menekan dan memutus penyebaran virus covid19 di wilayah Lampung. Bersama ini adalah perkembangan indeks pemeliharaan keamanan dan ketertiban setiap triwulan selama TAB 2021, dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

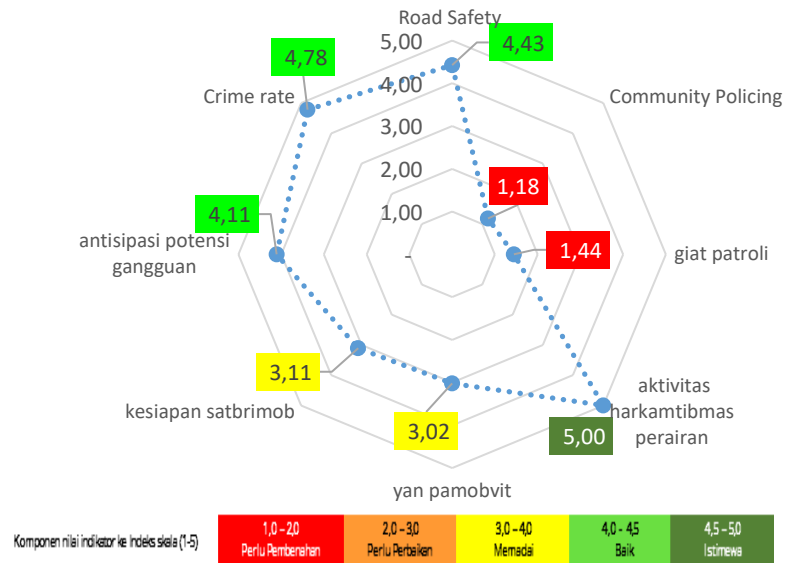
Gambar 6. Dinamika Indeks harkamtibmas selama TAB 2021



Dari gambar di atas, terlihat bahwa grafik dinamika indeks harkamtibmas TAB 2021 berjalan terus naik setiap triwulannya, dan melebihi dari target TAB 2021 pada angka indeks 72, dengan realisasi mencapai angka indeks 97,54 dari skala 1-5. Target Indikator kinerja utama pada tahun kedua Renstra 2020-2024 ini, berhasil ditunaikan Polda Lampung dan jajaran dengan baik dan lancar. **Demikian juga**

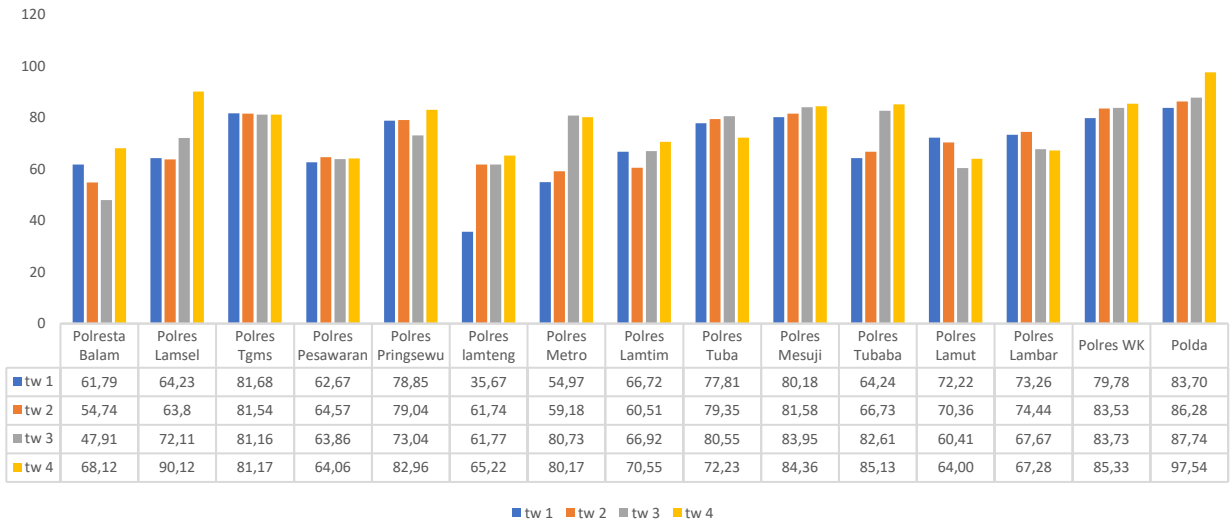
dengan target indeks harkamtibmas secara nasional dengan angka indeks 63, berhasil direalisasikan Polda Lampung sebesar 97,54% atau capainnya sebesar 120% dari target Polri. Kemudian untuk melihat kontribusi dari kinerja komponen penyusun indeks harkamtibmas, mulai dari *road savety index*, *community policing*, pemenuhan kegiatan patroli, aktivitas harkamtibmas perairan, tingkat kesiapan satbrimob, antisipasi potensi gangguan, pelayanan pamobvit dan *crime rate* selama TAB 2021, dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 7. Kontribusi komponen penyusun indeks harkamtibmas



Terlihat komponen level kinerja aktivitas harkamtibmas perairan berada pada level 5, disusul crime rate dengan level 4,78 dan antisipasi potensi gangguan pada level 4,11 dan *road savety index* dengan level 4,43, kesiapan brimob dalam *backup* satwil pada level 3,11 dan kegiatan pelayanan pamobvit dengan level kinerja 3,02, tetapi kegiatan *community policing* 1,18 dan giat patroli 1,44. Level kinerja komponen indeks harkamtibmas ini merupakan nilai yang menentukan, oleh karena level kinerja yang masih dibawah 3, seperti *community policing* dan kegiatan patroli perlu dilakukan pembenahan kinerja. *Community policing* dan kegiatan patroli perlu dilakukan perbaikan dengan penguatan kapasitas dan kapabilitas kemampuan, di samping muatan materi pendekatan kamtibmas yang selalu dilakukan pemutahiran kegiatan dan data sehingga menjadi lebih berbobot, sesuai dengan tantangan tugas preemtif dan preventif. Fungsi Binmas dan samapta dituntut untuk berinovasi, konsisten dan fokus perhatian. Tetapi dari semua komponen indeks harkamtibmas untuk pencapaian T.A. 2021 adalah berkat usaha bersama dari segenap sumber daya yang ada, dan diharapkan menjadi bekal *feed back* dalam meningkatkan peran dan tupoksi dimasa yang akan datang.

Gambar 8. Dinamika Indeks harkamtibmas pada 14 Polres

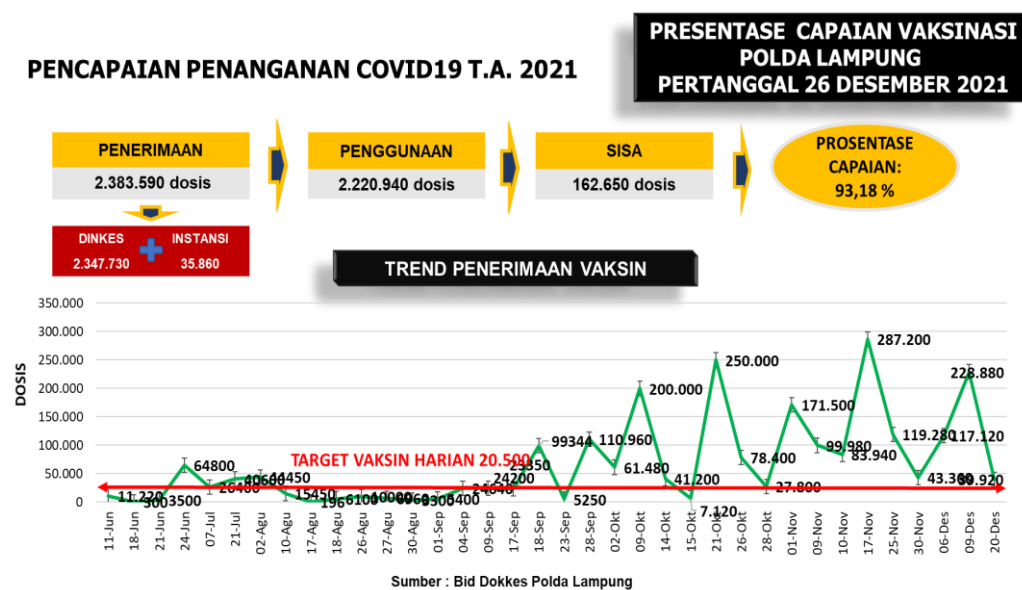


Dari 14 satuan kewilayahan, terlihat beberapa Polres pada triwulan pertama, level kinerja harkamtibmas berada pada kisaran indeks $35 \leq 60$ yaitu Polres Lampung Tengah. Kemudian memasuki triwulan II level kinerja indeks $40 \leq 60$ menjadi Polresta Bandar Lampung sampai dengan triwulan III. Memasuki triwulan IV semua Polres sudah dalam keadaan performa kinerja harkamtibmas pada level 3 dan level 5. Sehingga mengakhiri tahun 2021 indeks harkamtibmas memberikan kontribusi positif terhadap indeks kamtibmas Polda Lampung pada khususnya dan institusi Polri pada umumnya. Sebagai *evidence* pada TAB 2021 Polda Lampung berhasil mengelola keamanan dan ketertiban, khususnya agenda pengamanan pilkada serentak pada delapan kabupaten/kota serta agenda lokal pemilihan kepala desa di jajaran kewilayahan. Empat puluh lima potensi konflik berhasil dikelola dengan baik, tidak menimbulkan gangguan terhadap jalannya pembangunan baik skala nasional maupun provinsi Lampung.

Kegiatan pengamanan lainnya adalah menyangkut mengawal program Pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi *covid-19*, antara lain: Program Keluarga Harapan (PKH), program sembako, program bansos tunai, program vaksinasi dalam menciptakan *herd immunity* di lingkungan masyarakat di provinsi Lampung. Khusus untuk upaya penanganan pandemi *covid19* ini Polda Lampung menggelar Polisi peduli covid19, dengan menyelenggarakan; bakti sosial dengan melaksanakan pendistribusian beras sebanyak 310,6 ton; bakti sosial dengan melaksanakan pendistribusian sembako sebanyak 564.208 paket; pendistribusian bantuan oksigen cair dari PT. PUSRI total 37,4 ton oksigen untuk masyarakat Provinsi Lampung yang terdampak *covid-19*; dapur umum dengan membagikan 29.425 kotak makanan kepada masyarakat yang terdampak pandemi *covid-19* dan pembagian masker sebanyak 254.052 pcs; melaksanakan sekolah partikelir bekerja sama dengan komunitas buku unila di daerah pesisir

dalam rangka menambah ilmu pengetahuan bagi anak yatim piatu, yang orang tuanya meninggal dunia akibat *covid-19*; mobil cinema anak untuk melaksanakan hiburan bagi anak yatim piatu yang orang tuanya meninggal dunia akibat *covid-19*;

Untuk percepatan terciptanya *herd immunity*, Polda Lampung menggelar gerai vaksin; menyediakan gerai vaksinasi sebanyak 64 gerai vaksin yang diadakan Polda Lampung dan Polres/ta jajaran; mengadakan kegiatan vaksinasi *mobile* ke pulau-pulau terluar di daerah hukum Polda Lampung yang tidak terjangkau fasilitas kesehatan; menyediakan satu unit kendaraan mobil vaksin yang digunakan untuk pemberian vaksin kepada masyarakat; tersedia 3 (tiga) unit kendaraan *masker mobile* Ditlantas Polda Lampung yang digunakan untuk



membagikan masker kepada masyarakat; pembentukan KTN (kampung tangguh nusantara) yang didirikan dalam rangka ketahanan pangan di tengah pandemi *covid-19* yang dilaksanakan oleh 14 Polres/ta jajaran yang terbentuk sebanyak 2640 KTN; Polda Lampung juga bekerjasama dengan IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dan PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia) membentuk 44 tim relawan vaksinator dari 264 orang tenaga kesehatan .

2. IKU-2 Indeks penegakan hukum.

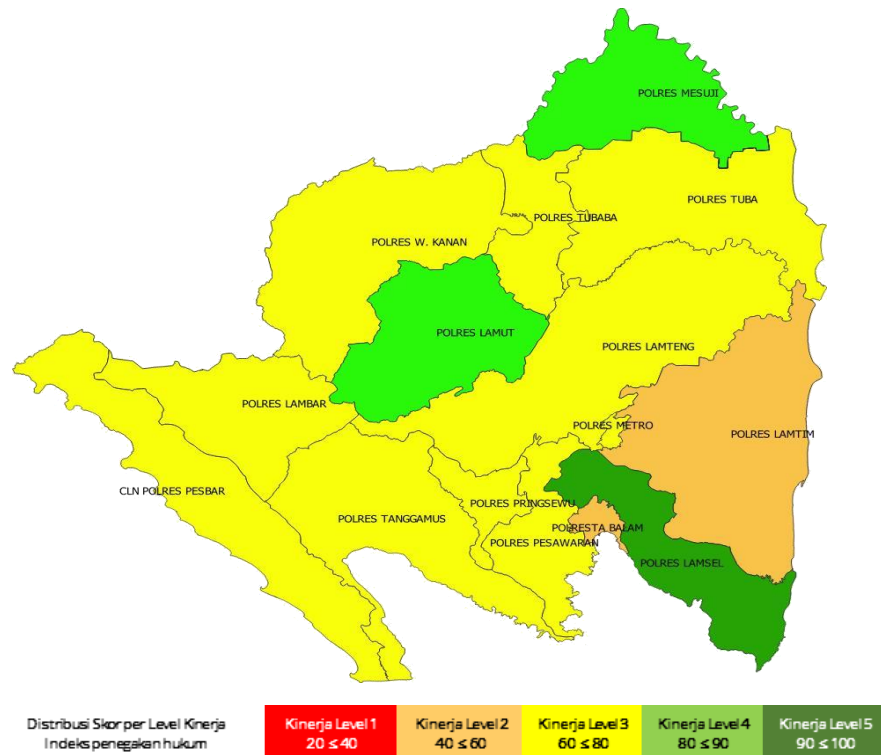
Pada indikator kinerja ini penilaian didasari pada penyelesaian tindak pidana pada setiap jenis tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polda Lampung (konvensional, transnasional, kekayaan negara dan tindak pidana yang berimplikasi kontijensi, penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dan tindak pidana perairan pada setiap TAB. Adapun hasil capaian kinerjanya sebagai berikut :

Tabel 7. Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKU Persentase penyelesaian kasus tindak pidana.

SS-2 Penegakan hukum yang berkeadilan						
IKU-2	Indeks penegakan hukum					
Realisasi 2020	2021			kenaikan dari 2020-2021 (%/tahun)	% capaian dengan target jangka menengah	
	target	realisasi	capaian		Target 2022 (68)	Target 2023 (69)
79,33	67	891,18	120%	12,43%	120%	102%

Apabila dilihat dari realisasi TAB 2021, maka capaian indeks penegakan hukum pada target TAB 2020 tercapai 120,00%. Keberhasilan dari Indeks penegakan hukum ini merupakan fakta yang menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2021, kegiatan penyelesaian tindak pidana mulai dari kasus konvensional, transnasional, kekayaan negara, kasus laka lintas dan penyelesaian tindak pidana perairan yang diselenggarakan fungsi reserse baik reskrimum, reskrimsus, resnarkoba, gakkum lintas maupun gakkum polairud, secara komplemen berkontribusi dalam menyelesaikan tindak pidana yang terjadi di Polda Lampung dan jajaran pada TAB 2021 sesuai target yang telah ditentukan dalam Renstra Polda Lampung 2020-2024. Berikut ini pemetaan penegakan hukum yang berkeadilan berdasarkan kinerja indeks penegakan hukum berdasarkan skala *likert* 1-5 sebagai berikut:

Gambar 9. Sebaran kinerja indeks penegakan hukum TAB 2021.

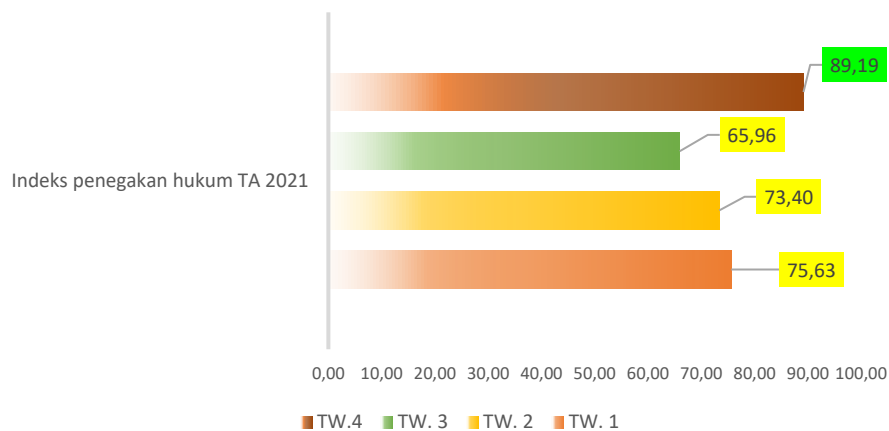


Terlihat terdapat empat warna hasil kinerja penegakan hukum di daerah hukum Polda Lampung, warna kuning, warna oranye dan disusul warna hijau muda dan hijau, hal ini menunjukkan level kinerja indeks

penegakan pada kinerja level 2-5. kinerja level $2 \leq 3$ diperoleh Polresta Bandar Lampung, Polres Lampung Timur. Semetara itu kinerja level $3 \leq 4$ diperoleh Polres Tanggamus, Polres Pesawaran, Lampung Selatan, Pringsewu, Lampung Barat, Way Kanan, Metro, Lampung Tengah, tulang Bawang Barat dan Polres Tulang Bawang. Kemudian yang kinerja level $4 \leq 4,5$ diperoleh Polres Lampung Utara dan Polres Mesuji dan Polres Lampung Selatan warna hijau dengan level kinerja 5.

Secara umum beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap keberhasilan dalam penegakan hukum yang berkeadilan ini adalah upaya kerja keras dari jajaran fungsi reskrim, lantas dan kepolisian perairan baik di Polda maupaun Polres dan Polsek untuk meningkatkan kegiatan pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana dalam rangka memberikan harapan kepada masyarakat/ pelapor mendapat rasa adil atas perbuatan kejahatan/tindak pidana yang dilakukan pelaku. Tantangan terbesar dalam kinerja penyelesaian terhadap tindak pidana selama TAB 2021 adalah suasana pandemi *covid19*, diperlukan kehati-hatian dalam melakukan pengungkapan. Bersama ini adalah perkembangan indeks penegakan hukum setiap triwulan selama TAB 2021, dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

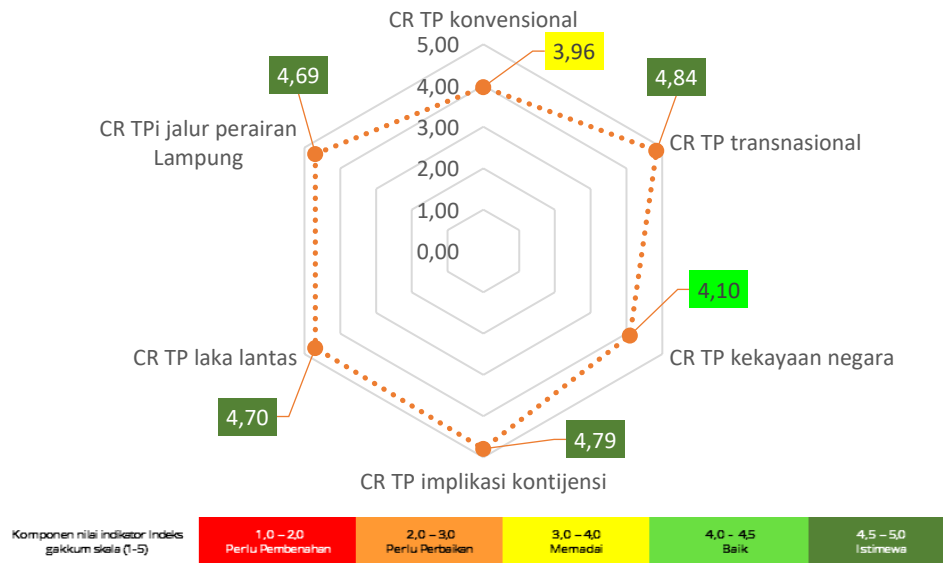
Gambar 10. Dinamika Indeks penegakan hukum selama TAB 2021



Dari gambar di atas, terlihat bahwa grafik dinamika indeks penegakan hukum TAB 2021 berjalan terus naik setiap triwulannya, dan melebihi dari target TAB 2021 pada angka indeks 67, dengan realisasi mencapai angka indeks 89,19 dari skala 1-5. Target Indikator kinerja utama pada tahun kedua Renstra 2020-2024 ini, berhasil ditunaikan Polda Lampung dan jajaran dengan baik dan lancar. **Demikian juga dengan target indeks penegakan hukum secara nasional dengan angka indeks 63, berhasil direalisasikan Polda Lampung sebesar 89,19% atau capaiannya sebesar 120% dari target Polri.** Kemudian untuk melihat kontribusi dari kinerja komponen penyusun indeks penegakan hukum, mulai dari; persentase penyelesaian tindak pidana konvensional, transnasional, kekayaan negara dan tindak pidana yang berimplikasi kontijensi, kasus kecelakaan

lalu lintas dan tindak pidana perairan selama TAB 2020, dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 11. Kontribusi komponen penyusun indeks penegakan hukum

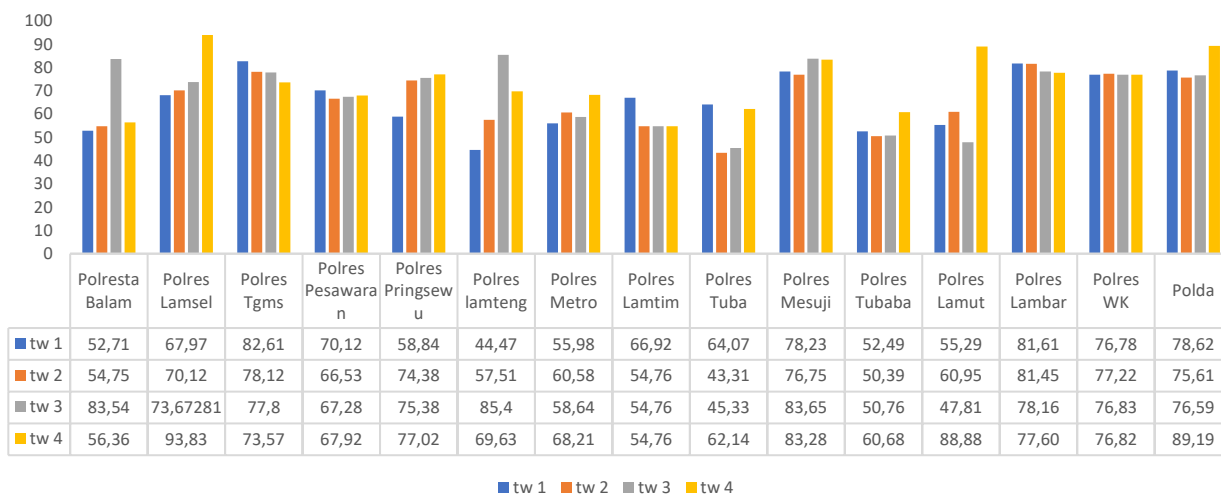


Terlihat komponen level kinerja penyelesaian tindak pidana dominan berada pada level 5, yaitu penyelesaian tindak pidana transnasional, penyelesaian tindak pidana laka lintas dan penyelesaian tindak pidana dijalur perairan, sedangkan penyelesaian tindak pidana kekayaan negara berada pada level kinerja 4 dan penyelesaian tindak pidana konvensional yang berada pada kinerja level 3. Kinerja ini perlu dipertahankan, penyidik harus optimal dalam mengimplementasikan manajemen penyidikan sesuai dengan target yang ditentukan, walaupun dalam prosesnya tentunya akan menemukan adanya pengaduan masyarakat, tetapi hal tersebut merupakan bagian dari dinamika dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan mengambil sisi positifnya, bahwa setiap proses, pasti menemukan hambatan, tantangan dan ancaman yang secara umum sudah merupakan bagian dari manajemen resiko institusi Polri, untuk selalu berbenah dan meningkatkan kapasitas organisasi.

Poin penting lainnya yang dihadapi proses pengungkapan dan penyidikan tindak pidana di daerah hukum Polda Lampung adalah *crime indeks* (curat, curas, curanmor) dan situasi pasca pandemi covid19 yang belum menunjukkan gejala penurunan yang signifikan, apalagi terdapat generalisasi di media massa bahwa sumber pelaku begal selama ini yang berada di Pulau Jawa dan sekitarnya itu berasal dari Lampung. Diperlukan sinergi dari fungsi preemtif dan preventif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan lingkungan. Oleh karena itu upaya peningkatan pengungkapan kasus, perlu dilakukan revitalisasi kring reskrim, disamping modernisasi peralatan almasus fungsi reskrim dan pemanfaatan teknologi CCTV pada fasilitas

umum dan di lingkungan dunia usaha melalui regulasi pemerintah daerah. Diperlukan juga usaha-usaha inovasi dalam memanfaatkan teknologi dengan mengadopsi satuan kesatuan lain sebagai bagian dari peningkatan kapasitas dan kapabilitas fungsi reskrim. Selanjutnya sebaran indeks penegakan hukum pada satuan kewilayahan setiap periode triwulan, dapat dilihat pada gambar berikut ini:

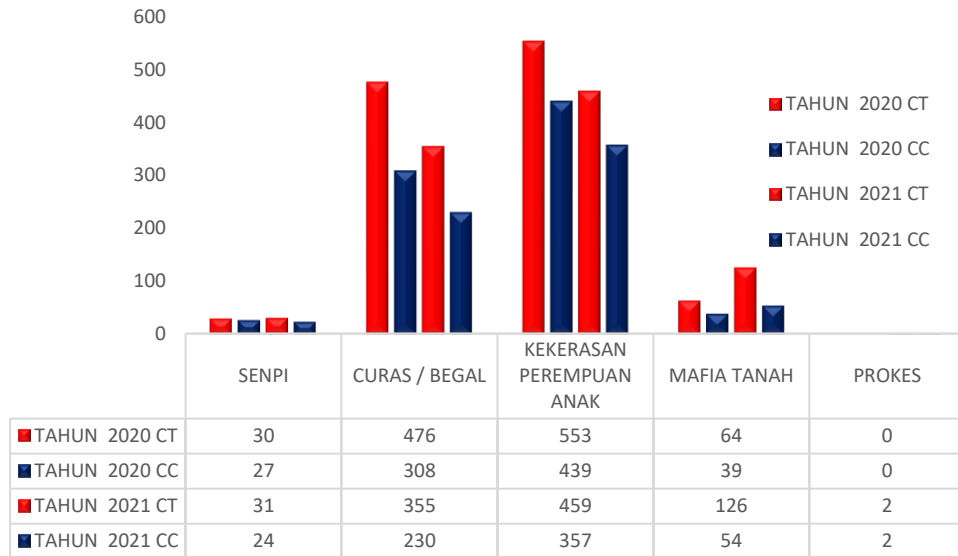
Gambar 12. Dinamika Indeks penegakan hukum pada 14 Polres



Dari 14 satuan kewilayahan, terlihat beberapa Polres pada triwulan pertama, level kinerja harkamtibmas berada pada kisaran indeks $40 \leq 60$ yaitu Polresta Bandar Lampung, Polres Pringsewu, Lampung Tengah, Metro, Tulang Bawang Barat dan Lampung Utara. Kemudian memasuki triwulan II level kinerja indeks $40 \leq 60$ tinggal Polresta Bandar Lampung, Lampung Tengah, Lampung Timur, Tulang Bawang Barat dan Polres Tulang Bawang mengalami penurunan performa, lalu pada triwulan III masih Polres Lampung Timur ditambah yang mengalami penurunan kinerja yaitu Polres Metro, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Lampung Utara. Memasuki triwulan IV kinerja kisaran indeks $40 \leq 60$ yaitu Polresta Bandar Lampung dan Polres Lampung Timur, sementara Polres lainnya berada pada kinerja level $60 \leq 80$ yaitu Polres Tanggamus, Pesawaran, Pringsewu, Lampung Tengah, Metro, Tulang Bawang Tulang Bawang Barat, Lampung Barat dan Polres Way Kanan. Selanjutnya Polres lainnya berada pada kinerja level $80 \leq 90$ yaitu Polres Mesuji dan Lampung Utara dan Polres Lampung Selatan berada pada level kinerja $90 \leq 100$.

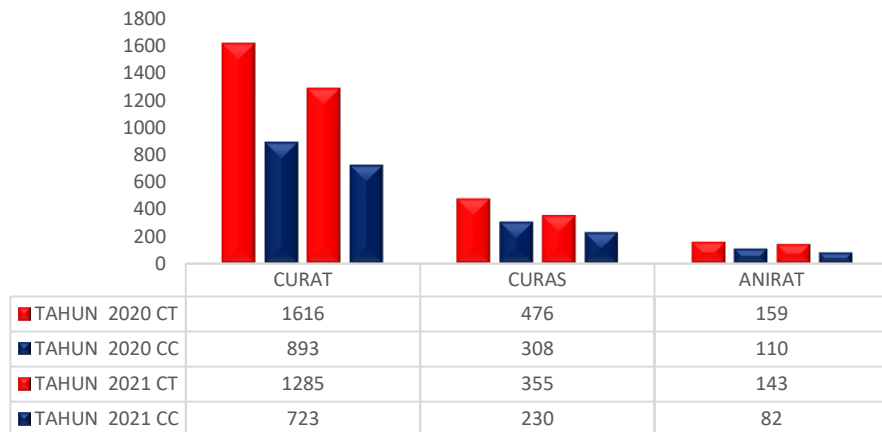
Mengakhiri tahun 2021 secara umum indeks penegakan hukum Polres memberikan kontribusi positif terhadap indeks penegakan hukum Polda Lampung pada khususnya dan institusi Polri pada umumnya. Sebagai *evidence* pada TAB 2021 Polda Lampung berhasil mengungkap kasus yang menjadi perhatian publik atau kasus menonjol sebagai berikut:

Gambar 13. Dinamika kasus menonjol T.A. 2021.



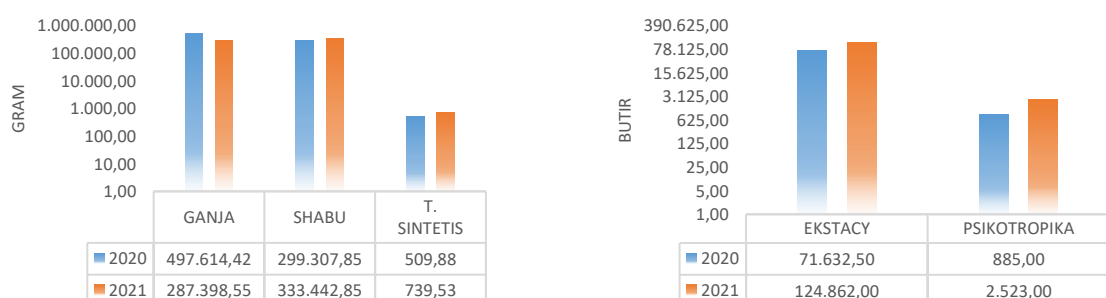
Dari kasus menonjol ini untuk crime total 2021 mengalami penurunan dari 2020, demikian pulan untuk penyelesaian kasus menonjol ini mengalami penurunan. Selanjutnya untuk kejahatan jalanan tahun 2020-2021 b=perkembangannya sebagai berikut:

Gambar 14. Dinamika kasus kejahatan jalanan T.A. 2021



Untuk kejahatan jalanan tahun 2021 mengalama penurunan dibanding 2020, demikian juga untuk penyelesaian kasusnya mengalami penurunan. Dampak pandemi covid19 ini masih menjadi faktor penghambat bagi penyelesaian kasus. Berlanjut pada penanggulangan narkoba perkembangan tahun 2021 sebagai berikut:

Gambar 15. Dinamika kasus penyalahgunaan narkoba T.A. 2021



Untuk barang bukti narkoba yang diamankan dan dimusnahkan untuk ganja tahun 2021 mengalami penurunan dibanding 2020, sedangkan untuk barang bukti narkoba jenis shabu dan narkoba sintetis mengalami peningkatan dibanding tahun 2020. Lalu pil ekstasi dan psikotropika barang bukti yang dapat diamankan tahun 2021 lebih banyak dibanding tahun 2021, walaupun untuk tersangka yang diamankan tahun 2021 mengalami penurunan dari 2724 tersangka menjadi 2255 tersangka. Hal ini menjadi perhatian Polda Polda Lampung untuk terus bergiat melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkoba.

Berlanjut pada penanganan kasus kekayaan negara, khususnya kasus korupsi, tahun 2021 Polda Lampung berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp. 70.000.000,- menurun dibanding 2020 sebesar Rp.556.000.000,-.

Learn and growth perspective

3. Sasaran Strategis (SS3)

Sumber daya manusia yang profesional.

Sasaran ini memberikan gambaran tentang profesionalitas kinerja yang ingin diwujudkan melalui peningkatan kompetensi/ kemampuan, yang tidak hanya sebatas memiliki keterampilan (*skill*) tetapi lebih dari itu paham secara mendetail, sehingga benar-benar menguasai dan mengerti kemampuannya dari titik kelemahan hingga cara mengatasinya. Hal ini melalui bagaimana satker Polda Lampung mampu memanfaatkan segenap sumber daya, terutama personel yang ada mampu mendukung proses bisnis yang terbaik dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis organisasi. Selanjutnya terhadap capaian indikator kinerja pendukung dapat dijelaskan sebagai berikut:

IKP-3 Indeks profesionalitas personel.

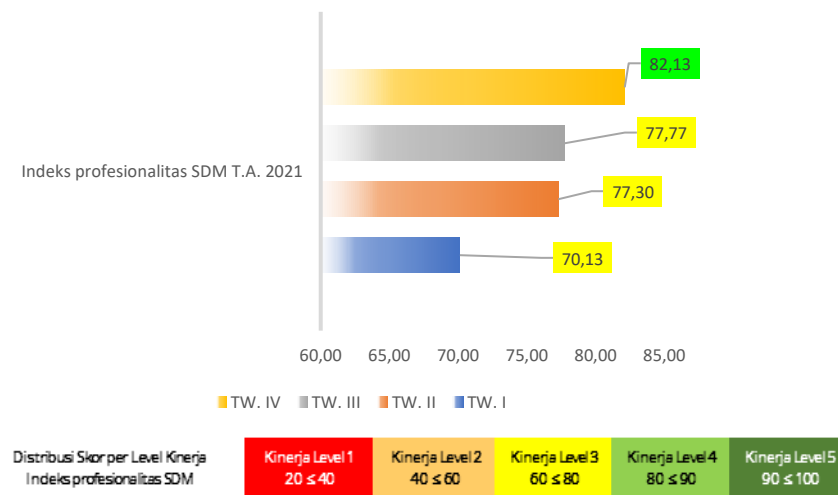
Pada indikator kinerja pendukung ini penilaian didasari pada dimensi pemenuhan kebutuhan personel, dimensi manajemen kompetensi yang dipersyaratkan untuk mengisi kompetensi jabatan yang dibutuhkan pada struktur organisasi melalui penyelenggaraan *assessment center*, dimensi peningkatan kompetensi melalui diklat, dimensi pencapaian kinerja personel dan dimensi prestasi yang capai melalui pemberian penghargaan . Hal yang diharapkan dari indikator kinerja pendukung ini adalah adanya peningkatan kualitas kemampuan personel Polda Lampung yang mempunyai bekal manajemen pengetahuan dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Adapun capaian dari indikator kinerja ini sebagai berikut:

Tabel 8. Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKP Indeks profesionalitas personel.

SS-3 Sumber daya manusia yang profesional..						
IKU-3 Indeks profesionalitas personel						
Realisasi 2020	2021			kenaikan dari 2020-2021 (%/tahun)	% capaian dengan target jangka menengah	
	target	realisasi	capaian		Target 2022 (75)	Target 2023 (76)
81,29	74	82,13	110,99%	1,03%	109,50%	108,06%

Apabila dilihat dari realisasi TAB 2021, maka capaian indeks profesionalitas personel tercapai 110,99%. Keberhasilan dari Indeks profesionalitas personel ini merupakan fakta keberhasilan dari kegiatan pembinaan personel yang secara komplementer berkontribusi dalam penguatan personel yang harus dimiliki Polda Lampung, sesuai dengan kebijakan SDM unggul yang telah ditargetkan dalam tahun anggaran 2020. Bersama ini dinamika indeks profesionalitas personel per triwulan, sebagai berikut:

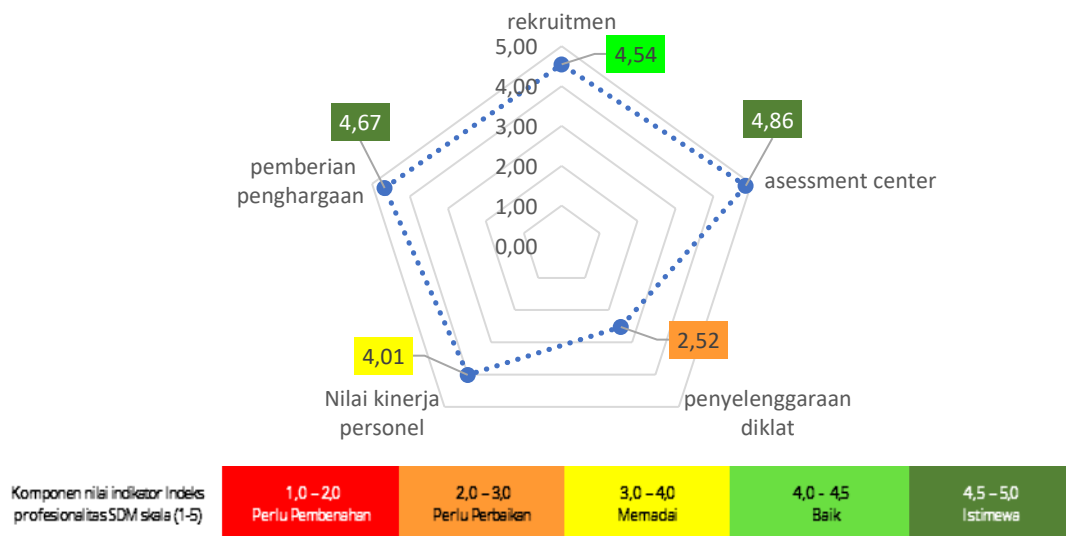
Gambar 16. Dinamika indeks profesionalitas personel selama TAB 2021.



Dari gambar di atas, terlihat bahwa grafik dinamika indeks profesionalitas SDM TAB 2021 berjalan terus naik dari TW I sampai ke TW IV melebihi dari angka indeks 74 target TAB 2021 dengan realisasi sebesar angka indeks 82,13. Target Indikator kinerja pendukung pada tahun kedua Renstra 2020-2024 ini merupakan IKP mandiri yang dibuat sendiri untuk mengukur proses pembelajaran dan pertumbuhan sumber daya manusia yang harus dimiliki oleh Polda Lampung melalui peran tugas pokok fungsi SDM dan SPN, hal ini diukur untuk mendukung kelancaran dalam menyelesaikan sasaran strategis pada peta strategi yang di atasnya yaitu *internal process business perspective* dan *stakeholder perspective*. Kemudian untuk melihat kontribusi dari kinerja komponen penyusun indeks profesionalitas personel yang terdiri dari pemenuhan rekrutmen, pemenuhan kompetensi jabatan melalui assessment center, pemenuhan kompetensi jabatan melalui diklat nilai kinerja melalui SMK

dan SKP, pemberian penghargaan, dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 17. Kontribusi kinerja komponen penyusun indeks Profesionalitas personel TAB 2021.



Komponen penyusun dari indeks profesionalitas personel yakni *assessment center* dan pemberian penghargaan berdasarkan skala *likert* 1-5 berada pada konversi kinerja diatas 4 artinya dorongan untuk berprestasi dari personel meningkat hal melalui membangun kerja sama hubungan yang kerja yang harmonis, pemberian penghargaan sebagai stimulan untuk bekerja dari pemimpin menimbulkan semangat kerja, untuk rekrutmen berada pada level kinerja 4,54 patut untuk dipertahankan mengingat rekrutmen sangat menentukan terhadap kualitas personel. Sementara yang lainnya nilai kinerja personel sudah cukup memadai dan patut dipertahankan dan untuk penyelenggaraan diklat karena faktor pandemi covid19 menjadi kualitas kinerja pada level 2,52, perlu upaya perbaikan mutu pembelajaran.

Secara umum keberhasilan dari Indeks profesionalitas personel adalah dari komitmen bersama Polda Lampung dalam transformasi organisasi menuju SDM Polri yang siap menghadapi tantangan tugas di masa yang akan datang. Kegiatan penyelenggaraan diklat di SPN saat pandemi memang menjadi tidak optimal, mengingat design pembelajaran yang harus dimodifikasi sedemikian rupa, sehingga upaya kedepan upaya perbaikan penyusunan design pembelajaran perlu direvitalisasi melalui fungsi pembina Lemdiklat Polri. Kegiatan *assessment center* secara umum dapat memberikan masukan pada penempatan personel terhadap jabatan yang tepat. Kendala dan hambatan yang dihadapi selama penyelenggaraan *assessment center* ini adalah kendala teknis jadwal kegiatan para *assessor* dengan tugas rutin yang ada, sehingga berhubungan dengan analisa beban kerja masing-masing personel yang menjadi *assessor*. Lainnya kendala berupa *update tools* yang perlu penyiapan yang tepat dengan jabatan

yang akan dilakukan *assessment*. Upaya yang telah dan terus ditingkatkan adalah dengan mengefektifkan sistem perencanaan kegiatan *assessment center* yang tepat, melalui forum komunikasi assesor dengan admin, guna memastikan waktu yang tepat. Disamping dengan terbitnya Perpol Nomor 14 Tahun 2018, telah terdapat jabatan Kasubagkompeten yang tupoksinya adalah menyelenggarakan kegiatan *assessment center*.

4. Sasaran strategis (SS4)

Modernisasi pelayanan kepolisian yang berkelanjutan.

Sasaran ini memberikan gambaran tentang kapasitas dan kondisi fasilitas gedung dan sarana angkut sebagai bagian yang sangat vital dalam penyelenggaraan kegiatan tupoksi kepolisian yang dimiliki Polda Lampung sebagai komponen dasar dalam menentukan keberhasilan tugas. Adapun ruang lingkup yang dibutuhkan dalam indikator kinerja pendukung ini adalah menyangkut dimensi kondisi gedung layak pakai, dimensi kondisi alat angkut layak pakai, dimensi penambahan fasilitas gedung hasil rehab dan usulan pengadaan baru dan dimensi penambahan alat angkut dan usulan pengadaan baru.

Dengan pengembangan modernisasi sarpras dan peralatan kepolisian yang berkelanjutan diharapkan diperoleh kuantitas dan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas. Seiring dengan itu kesiapan sarana prasarana dan peralatan kepolisian yang selaras dengan tantangan dalam dinamika lingkungan strategis, yang memerlukan sistem modernisasi sebagai dukungan dalam proses pembelajaran dan pertumbuhan dari fasilitas sarana dan prasarana yang harus dimiliki Polda Lampung dan jajaran. Selanjutnya terhadap hasil capai kinerja Indeks dukungan sarpras dan peralatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

IKP-4 Indeks dukungan sarpras dan peralatan.

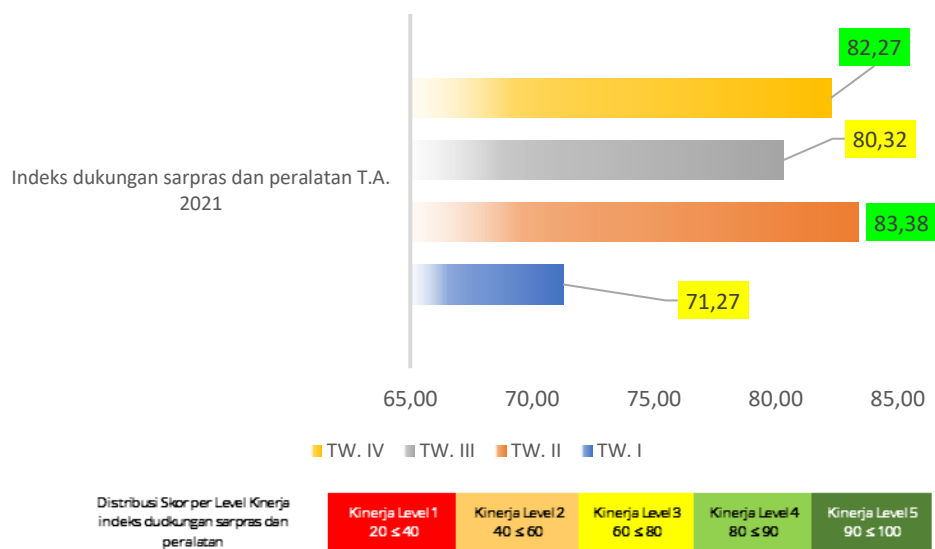
Pada indikator kinerja ini penilaian didasari pada dukungan sarana dan prasarana berupa fasilitas barang tidak bergerak berupa gedung (perkantoran dan rumah dinas) dan alat angkut berupa kendaraan, karena dengan penambahan jumlah fasilitas sarana prasarana barang tidak bergerak (BTB) dan penambahan alat angkut sangat menunjang bagi keberhasilan pelaksanaan tugas kepolisian. Maka dengan indikator ini menjadi alat ukur untuk mengetahui penambahan fasilitas baik gedung perkantoran /rumah dinas dan alat angkut yang menunjang terhadap keberhasilan tupoksi. Adapun capaian dari indikator kinerja ini sebagai berikut:

Tabel 9. Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKP Indeks dukungan Sarpras dan peralatan

SS-4 Modernisasi pelayanan kepolisian yang berkelanjutan..						
IKU-4 Indeks dukungan sarpras dan peralatan						
Realisasi 2020	2021			kenaikan dari 2020-2021 (%/tahun)	% capaian dengan target jangka menengah	
	target	realisasi	capaian		Target 2022 (70,5)	Target 2023 (71)
84,90	70	82,27	117,53%	-3,01%	116,69%	115,87%

Apabila dilihat dari realisasi TAB 2021, maka capaian indeks dukungan sarpras dan peralatan tercapai 122,16%. Keberhasilan dari Indeks dukungan sarpras dan peralatan ini merupakan fakta keberhasilan dari kegiatan pembinaan siklus logistik yang secara komplementer berkontribusi dalam penguatan modernisasi sarpras dan peralatan yang harus dimiliki Polda Lampung, sesuai dengan tantangan dinamika lingkungan strategis sebagaimana yang telah ditargetkan dalam Renstra Polda Lampung 2020-2024. dinamika indeks dukungan sarpras dan peralatan per triwulan, sebagai berikut:

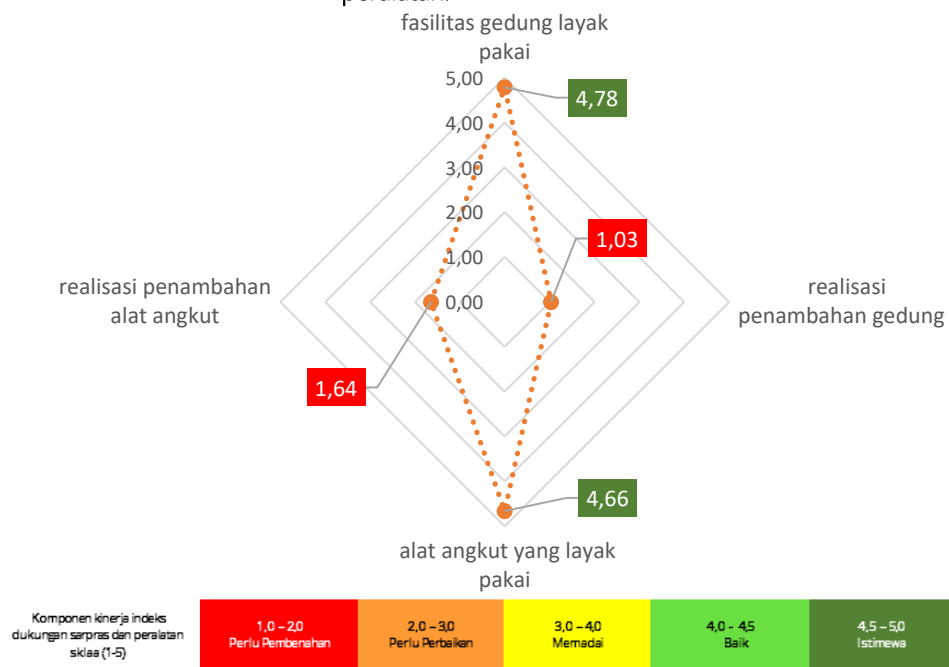
Gambar 18. Dinamika indeks dukungan sarpras dan peralatan pada TAB 2021.



Dari gambar di atas, terlihat bahwa grafik dinamika indeks dukungan sarpras dan peralatan TAB 2021 berjalan perlahan menurun dari TW I sampai ke TW IV walaupun penurunannya masih di atas angka indeks 73 target TAB 2021 dengan realisasi sebesar angka indeks 84,90. Target Indikator kinerja pendukung pada tahun pertama Renstra 2020-2024 ini merupakan IKP mandiri yang dibuat sendiri untuk mengukur proses dukungan sarpras dan peralatan yang berkelanjutan sebagai proses pembelajaran dan pertumbuhan dari siklus logistik yang harus dimiliki oleh Polda Lampung melalui peran tugas pokok fungsi logistik di lingkungan Polda Lampung, hal ini diukur untuk mendukung kelancaran dalam mensukseskan sasaran strategis pada peta strategi yang di

atasnya yaitu *internal process business perspective*, *costumer perspective* dan *stakeholder perspective*. Kemudian untuk melihat kontribusi dari kinerja komponen penyusun indeks profesionalitas SDM yang terdiri dari persentase gedung layak pakai, penambahan gedung, alat angkut layak pakai dan penambahan alat angkut sebagai sarana dan prasarana yang vital, dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 19. Kontribusi kinerja komponen indeks dukungan sarpras dan peralatan.



Komponen penyusun dari indeks dukungan sarpras dan peralatan, terlihat penambahan alat angkut dan penambahan gedung berdasarkan skala *likert* 1-5 berada rendah pada konversi kinerja 1,03-1,64 artinya penambahan baik faslitas gedung dan alat angkut perlu diberi atensi untuk mendapatkan prioritas dalam pengadaan alat angkut dan fasilitas gedung, mengingat tantangan lingkungan strategis yang dinamis. Tidak hanya mengandalkan realisasi dari kesatuan induk, tetapi dapat melalui pendekatan pembangunan dengan pemerintahan daerah, khusus dalam pengelolaan situasi kamtibmas yang menuntut fasiltas pendukung yang memadai.

Secara umum kotribusi kelayakan gedung dan alat angkut merupakan upaya memperpanjang usia pakai dengan pemeliharaan yang tepat guna, sehingga **keberhasilan** dari Indeks dukungan sarpras dan alat angkut adalah dari komitmen bersama Polda Lampung dalam transformasi organisasi menuju peralatan kepolisian yang modern yang siap menghadapi tantangan tugas pada masa yang akan datang. Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi pemenuhan dukungan fasilitas barang tidak bergerak, adalah pada kebutuhan yang mendesak dan prioritas, proses usulan yang harus lengkap dan memenuhi kriteria

untuk dibangun, mulai dari status lahan, kondisi lahan dan dukungan satuan tingkat atas. Oleh karena itu upaya yang telah, sedang dan akan dilakukan Polda Lampung dalam pemenuhan dukungan fasilitas sarana dan prasarana operasional kepolisian melalui kegiatan inventarisasi dan verifikasi barang milik negara. Disamping itu mengupayakan penambahan fasilitas ini melalui pendapat hibah baik dari pemerintahan daerah maupun dari pihak-pihak yang konsen terhadap tupoksi kepolisian, melalui mekanisme ketentuan yang berlaku.

IKP-5 Indeks sistem Pemerintahan berbasis elektronik

Pada indikator kinerja pendukung ini penilaian didasari pada berupa tata kelola yang meliputi: kelembagaan, strategi dan perencanaan, teknologi informasi dan komunikasi, layanan yang meliputi, administrasi pemerintahan dan pelayanan publik, dan kebijakan yang meliputi: tata kelola dan layanan. Adapun konsep tingkat kematangan SPBE meliputi tingkat kematangan kapabilitas proses yang terdiri dari lima tingkat yaitu rintisan, terkelola, terstandarisasi, terintegrasi dan terukur, optimum, selanjutnya tingkat kematangan pada kapabilitas fungsi teknis terdiri dari lima tingkat yaitu informasi, interaksi, transaksi, kolaborasi dan optimalisasi.

Untuk mendapat nilai dari SPBE berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tanggal 9 Januari 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pada proses penilaian terdiri dari tiga domain yaitu kebijakan internal SPBE, tatakelola SPBE dan layanan SPBE, dengan tujuh aspek dan tiga puluh lima indikator. Adapun capaian dari indikator kinerja ini sebagai berikut:

Tabel 10. Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKP Indeks sistem Pemerintahan berbasis elektronik.

SS-4 Modernisasi pelayanan kepolisian yang berkelanjutan.						
IKU-5 Indeks sistem Pemerintahan berbasis elektronik.						
Realisasi 2020	2021			kenaikan dari 2020-2021 (%/tahun)	% capaian dengan target jangka menengah	
	target	realisasi	capaian		Target 2022 (2,3)	Target 2023 (2,4)
2,15	2,2	2,29	104,10%	6,51%	99,56%	95,42%

Apabila dilihat dari realisasi TAB 2021, maka capaian indeks SPBE tercapai 104,10%. Keberhasilan dari Indeks SPBE ini merupakan fakta keberhasilan dari kegiatan pembinaan pemanfaatan teknologi yang secara komplementer berkontribusi dalam penguatan tata kelola, kelembagaan, strategi dan perencanaan, teknologi informasi dan komunikasi, layanan administrasi pemerintahan dan administrasi publik, yang harus dimiliki Polda Lampung, sesuai dengan kebijakan

modernisasi peralatan Polri yang telah ditargetkan dalam Renstra Polda Lampung 2020-2024. Bersama ini hasil evaluasi mandiri SPBE satker yang dijadikan sebagai nilai indeks SPBE, sebagai berikut:

Tabel 11. Rekapitulasi nilai indeks SPBE satker di Polda Lampung.

NO.	SATKER	INDEKS SPBE	KATEGORI
1	Spripim	2,13	cukup
2	Itwasda	2,14	baik
3	Birorena	2,75	baik
4	Birooperasi	2,07	cukup
5	Biro SDM	2,68	baik
6	Birolog	2,26	cukup
7	Bidpropam	2,48	cukup
8	Bid TIK	2,73	baik
9	Biddokkes	1,65	kurang
10	Bidkeu	1,95	cukup
11	Bidkum	2,00	cukup
12	Bidhumas	1,85	cukup
13	Yanma	2,05	cukup
14	SPN	2,03	cukup
15	Ditintelkam	1,80	cukup
16	Ditreskrimum	2,31	cukup
17	Ditreskrimsus	2,12	cukup
18	Ditresnarkoba	2,18	cukup
19	Ditsamapta	1,70	kurang
20	Ditlantas	2,43	cukup
21	Ditbinmas	2,09	cukup
22	Ditpolairud	2,46	cukup
23	Ditpamobvit	1,92	cukup
24	Satbrimob	2,02	cukup
26	Polresta Bandar Lampung	2,72	baik
27	Polres Lampung Selatan	2,24	cukup
28	Polres Metro	2,48	cukup
29	Polres Lampung Utara	2,57	cukup
30	Polres Lampung Barat	2,58	cukup
31	Polres Tulang Bawang	2,45	cukup
32	Polres Tanggamus	2,42	cukup
33	Polres Lampung Timur	2,61	cukup
34	Polres Way Kanan	3,23	baik
35	Polres Lampung Tengah	2,71	baik
36	Polres Mesuji	3,07	baik
37	Polres Pesawaran	2,39	cukup
38	Polres Pringsewu	2,33	cukup
39	Polres Tubaba	2,24	cukup
	Rata-rata nilai SPBE	2,29	cukup

Dari tabel tersebut di atas terdapat delapan satker yang pengelolaannya sudah dimasukkan ke dalam kategori baik, sedangkan satker umumnya masuk dalam kategori cukup, berada pada kisaran nilai indeks 2,0-2,3 dan yang kurang adalah Ditsamapta. Dalam tata kelola SBPE satker ini, umumnya satker masih belum familiar dengan kebijakan pemerintah tentang SPBE, sehingga pengetahuannya juga menjadi kendala tersendiri. Terlihat tingkat kematangan SPBE yang meliputi tingkat kematangan kapabilitas proses, yang terdiri dari lima tingkat yaitu rintisan, terkelola, terstandardisasi, terintegrasi dan terukur, optimum juga belum dipahami dengan baik oleh satker. Apalagi tentang tingkat

kematangan pada kapabilitas fungsi teknis yang terdiri dari lima tingkat yaitu informasi, interaksi, transaksi, kolaborasi dan optimalisasi, belum optimal dipahami oleh satker.

Oleh karena itu dengan penentuan target kategori cukup, Polda Lampung berharap, secara bertahap satker-satker mengerti dan memahami dan mengaplikasi SPBE sebagai suatu tuntutan dalam pemerintahan republik Indonesia, termasuk di dalamnya terdapat institusi Polri dan Polda Lampung sebagai salah satu satuan kewilayahannya. Kendala umum dari penerapan kebijakan SPBE adalah adalah proses yang belum terintegrasi, ditandai masih rendahnya budaya berbagi data dan informasi antar satker terlebih antar instansi pemerintah; infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) belum menjangkau seluruh satker dan pengelolaan keamanan informasi juga masih lemah karena belum memahami dengan baik, dapat hampir di seluruh satker maupun instansi pemerintah. Kendala lainnya berupa Sumber daya manusia yang mumpuni dalam upaya penerapan digitalisasi pemerintahan, masih menjadi persoalan pelik yang dialami satker. Terutama SDM yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi. Saat ini Polda Lampung sedang berupaya memecahkan masalah tentang bagaimana penerapan SPBE ini diharapkan meningkatkan kinerja, tidak membebani kinerja. Adapun upaya yang telah sedang dan akan dilakukan Polda Lampung adalah tetap secara berkelanjutan melakukan sosialisasi penguatan SPBE, kegiatan asistensi, bimteks, koordinasi, *benchmarking* dengan instansi di daerah Lampung atau dengan kesatuan kewilayahannya.

IKP-6 Nilai pengelolaan informasi dan pemberitaan.

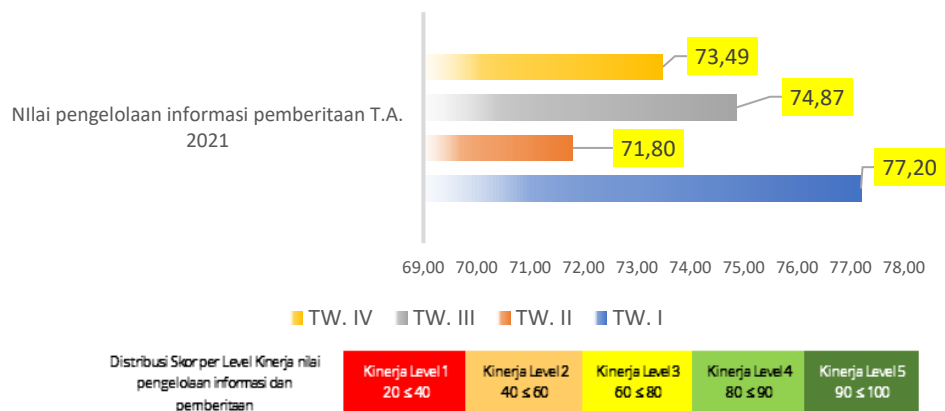
Pada indikator kinerja ini merupakan indikator dalam mengelola media informasi sebagai *evidence*/bukti pendukung dalam mengetahui *outcome*/hasil dari pelaksanaan tupoksi Polda Lampung yang terdokumentasikan baik di internal dan di masyarakat melalui media *online*, sehingga menjadi alat ukur dari ekspektasi masyarakat atas kepercayaan atas aktualisasi Polda Lampung dari kegiatan legalitas menjadi sebuah legitimasi dari masyarakat. Adapun penilaian didasari pada dimensi kegiatan intelijen media management, dimensi produksi *release* berita dan ekspos serta serta dimensi kegiatan peliputan, dokumentasi dan monitoring pemberitaan media pemberitaan. Adapun capaian dari indikator kinerja pendukung ini sebagai berikut:

Tabel 12. Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKP Nilai pengelolaan informasi dan pemberitaan.

SS-4 Modernisasi pelayanan kepolisian yang berkelanjutan.						
IKU-6 Nilai pengelolaan informasi dan pemberitaan						
Realisasi 2020	2021			kenaikan dari 2020-2021 (%/tahun)	% capaian dengan target jangka menengah	
	target	realisasi	capaian		Target 2022 (52)	Target 2023 (52,5)
74,34	51	73,49	120,00%	-1,14%	120,00%	120,00%

Apabila dilihat dari realisasi TAB 2021, maka capaian Nilai pengelolaan informasi dan pemberitaan tercapai 120,00%. Keberhasilan dari Nilai pengelolaan informasi dan pemberitaan ini merupakan fakta keberhasilan dari kegiatan pengelolaan informasi dan pemberitaan yang secara komplementer berkontribusi dalam penguatan manajemen media yang harus dimiliki Polda Lampung, sesuai dengan tantangan dinamika lingkungan strategis sebagaimana yang telah ditargetkan dalam Renstra Polda Lampung 2020-2024. Dinamika nilai pengelolaan informasi dan pemberitaan per triwulan, sebagai berikut:

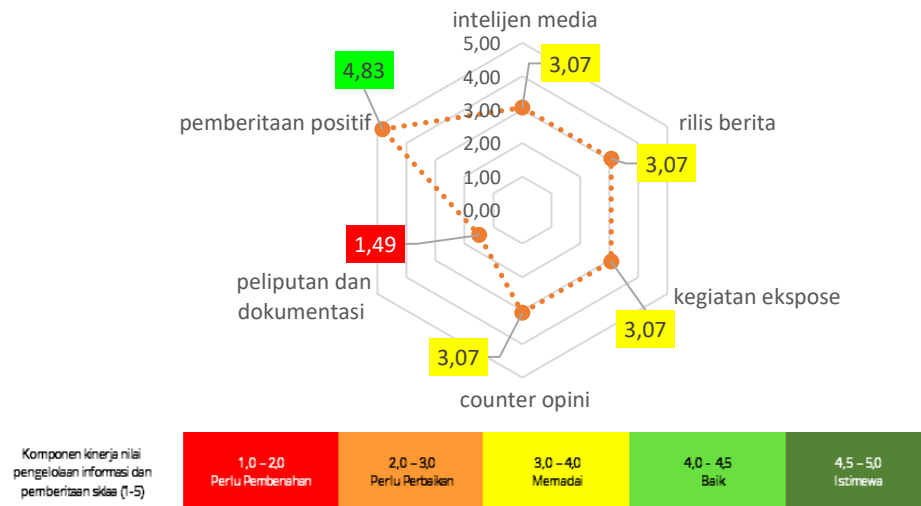
Gambar 20. Dinamika nilai pengelolaan informasi dan pemberitaan pada TAB 2021.



Dari gambar di atas, terlihat bahwa grafik dinamika nilai pengelolaan informasi dan pemberitaan TAB 2021 berjalan perlahan cenderung naik turun dari TW I sampai ke TW IV walaupun naik turunnya masih di atas angka indeks 51 target TAB 2021 dengan realisasi sebesar angka indeks 73,49. Target Indikator kinerja pendukung pada tahun kedua Renstra 2020-2024 ini merupakan IKP mandiri yang dibuat sendiri untuk mengukur proses pengelolaan informasi dan pemberitaan yang responsif sebagai proses pembelajaran dan pertumbuhan dari manajemen media yang harus dimiliki oleh Polda Lampung melalui peran tugas pokok fungsi humas di lingkungan Polda Lampung, hal ini diukur untuk mendukung kelancaran dalam menyukkseskan sasaran strategis pada peta strategi yang di atasnya yaitu *internal process business perspective*, dan *stakeholder perspective*. Kemudian untuk melihat kontribusi dari kinerja komponen penyusun nilai pengelolaan informasi

dan pemberitaan yang terdiri dari intelijen media, pemenuhan rilis berita, ekspos kinerja, *counter* opini, kegiatan peliputan dokumentasi dan pemberitaan positif yang merupakan kegiatan vital fungsi humas, dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 21. Kontribusi kinerja komponen nilai pengelolaan informasi dan pemberitaan.



Komponen penyusun dari nilai pengelolaan informasi dan pemberitaan, terlihat kinerja peliputan dan dokumentasi berdasarkan skala *likert* 1-5 berada paling rendah dalam konversi kinerja 1,0-2,0 artinya kegiatan peliputan dan dokumentasi perlu diberi dilakukan penguatan, agar setiap dinamika operasional kepolisian yang mengandung informasi dan berita dapat diliput dan didokumentasikan dengan seksama, setiap satker dalam kegiatan operasionalnya agar selalu melibatkan fungsi humas, dalam rangka mengoptimalkan manajemen media.

Secara umum kontribusi komponen nilai pengelolaan informasi dan pemberitaan efektif untuk mencapai target untuk TAB 2021, sehingga **keberhasilan** dari nilai pengelolaan informasi dan pemberitaan dapat mengiring opini positif bagi organisasi Polda Lampung dan menjadi bekal dalam komitmen Polda Lampung melaksanakan transformasi organisasi Polri yang presisi, siap menghadapi tantangan tugas di masa yang akan datang.

Kendala dan hambatan yang dihadapi terhadap mengelola pemberitaan yang negatif, adanya keterlambatan dalam menanggapi baik melalui hak jawab ataupun memberikan konfirmasi kepada media, hal ini ada beberapa faktor yang menjadi tantangan diantaranya; belum terbiasanya melakukan hak jawab, kerja sama yang dibangun antara fungsi humas dengan satker-satker di lingkungan Polda Lampung dengan ketiga media koran tersebut belum optimalnya. Secara personal juga pemberitaan negatif timbul akibat sosok personel Polri yang melakukan perilaku yang kontra produktif dengan tupoksi kepolisian

Hal lain yang harus digarap serius adalah adanya media *online*, yang mudah diakses dimana dan kapan saja oleh masyarakat digital. Untuk saat ini pemberitaan *online* menjadi lebih baik dibanding media *mainstream*. Oleh karena itu pemberitaan tentang Polri harus dikelola dengan baik. Keberadaan aplikasi intelijen manajemen media (IMM) harus dioptimalkan memberikan *feed back* kepada pimpinan tentang *trending topic* yang sedang berkembang pada media *online*. Di samping itu penggunaan media sosial juga dapat menjadi corong dalam mengekspose berita positif.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengefektifkan personel pada setiap satker, khususnya Satuan kewilayah/Polres/ta adalah dengan mengadakan pelatihan/*workshop* tentang *public speaking* setiap tahunnya, disamping membangun kemitraan dengan para akademisi atau kalangan profesional untuk dijadikan corong Polda Lampung dalam memberikan ulasan *outcome* atas kinerja positif yang telah dilakukan Polda Lampung dan jajaran dan memperbanyak melakukan ekspos atas keberhasilan kinerja yang dilakukan sepanjang tahun.

5. Sasaran Strategis (SS5)

Manajemen pengawasan kepolisian yang akuntabel.

Sasaran ini memberikan gambaran tentang sejauh mana kegiatan bisnis proses yang dilakukan Polda Lampung dalam mengimplementasikan kebijakan pimpinan Polri, dengan memanfaatkan sumberdaya secara efektif mengelola tupoksi organisasi melalui peningkatan kapabilitas dan kapasitas organisasi, guna mengetahui potensi kelemahan dan keunggulan serta mengetahui cara mengatasi dan memperbaikinya.

Kegiatan bisnis proses internal ini dilakukan oleh Satker pembina fungsi dalam SOTK mulai unsur pengawas dan pembantu pimpinan (Inspektorat, Biro dan Bidang) dan unsur pelaksana tugas pokok (Direktorat dan Satuan Brimob). Sehingga pengelolaan kapasitas dan kapabilitas organisasi dapat meningkatkan kinerja. implementasi penguatan kapabilitas dan kapasitas ini berorientasi pada keberhasilan pencapaian *stakeholder perspective* dan *costumer perspective* sebagai sebuah proses untuk meningkatkan kemampuan individu, unit, organisasi untuk menganalisa objek tupoksi, mengidentifikasi masalah-masalah, kebutuhan-kebutuhan, kendala, hambatan, kesempatan dan peluang-peluang yang diformulasikan menjadi langkah/usaha/ strategi-strategi untuk mengatasi masalah-masalah, kebutuhan-kebutuhan, serta memanfaatkan peluang dan kesempatan yang relevan, merancang ide/gagasan dan rencana aksi untuk digunakan secara efektif atas dasar sumber daya yang berkesinambungan yang diimplementasikan secara

nyata, dimonitor dan dievaluasi serta memanfaatkan umpan balik sebagai pelajaran.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah dimensi penguatan kapabilitas dan dimensi penguatan kapasitas organisasi. Ruang lingkup dalam penguatan kapabilitas menyangkut kemampuan satker pembina fungsi memberikan petunjuk dan arahan dalam bentuk surat, surat telegram, aturan dalam bentuk keputusan, peraturan dan penyelenggaraan MoU untuk meningkatkan kemampuan. Sedangkan penguatan kapasitas organisasi menyangkut peningkatan daya tampung kemampuan organisasi melalui sosialisasi, asistensi, supervisi, bimbingan teknis dan rapat teknis.

IKP-7 Indeks penguatan implementasi kebijakan.

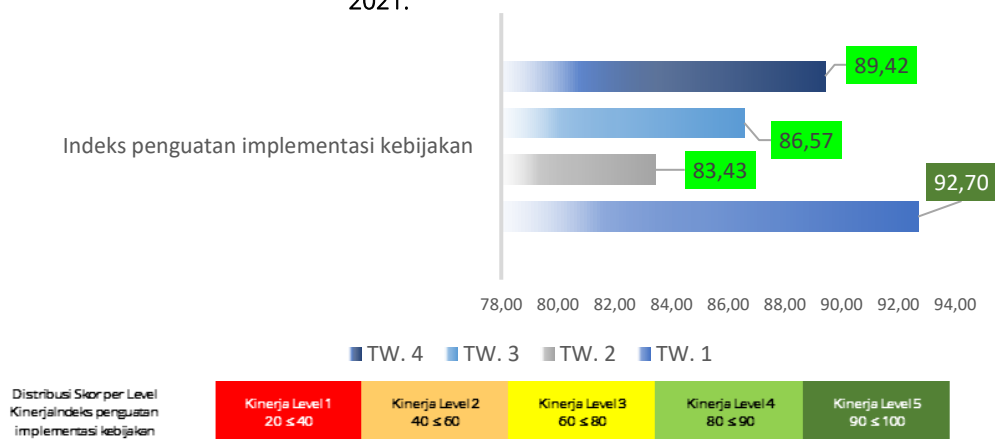
Pada indikator kinerja pendukung ini penilaian didasari pada penguatan organisasi melalui implementasi kemampuan dalam memberikan petunjuk arahan dan daya kemampuan organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan pimpinan Polri sebagai suatu bisnis proses internal yang dijalankan satker pembina fungsi kepolisian mulai dari unsur pengawas dan pembantu pimpinan (Inspektorat, Biro dan Bidang), unsur pelaksana tugas Pokok (Direktorat dan Satuan Brimob), agar kapabilitas dan kapasitas organisasi menjadi efektif dan optimal melalui rekapitulasi jumlah kegiatan kapabilitas dan kapasitas organisasi yang efektif selama TAB. Adapun capaian dari indikator kinerja ini sebagai berikut :

Tabel 13. Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKP Indeks penguatan implementasi kebijakan.

SS-5 Manajemen pengawasan kepolisian yang akuntabel.						
IKU-7 Indeks penguatan implementasi kebijakan						
Realisasi 2020	2021			kenaikan dari 2020-2021 (%/tahun)	% capaian dengan target jangka menengah	
	target	realisasi	capaian		Target 2022 (73)	Target 2023 (74)
79,41	72	89,42	120,00%	12,60%	120,00%	120,00%

Apabila dilihat dari realisasi TAB 2021, maka capaian indeks penguatan implementasi kebijakan tercapai 120,00%. Keberhasilan dari Indeks penguatan implementasi kebijakan ini merupakan fakta yang menunjukkan bahwa keberhasilan kegiatan penguatan kapabilitas dan penguatan kapasitas organisasi yang dilakukan satker unsur pembantu/pengawas dan unsur pelaksana tupoksi, secara komplemen berkontribusi dalam penguatan implementasi kebijakan, sesuai dengan target yang telah ditentukan dalam Renstra Polda Lampung 2020-2024. Bersama ini dinamika nilai kinerja indeks penguatan implementasi kebijakan per triwulan, sebagai berikut:

Gambar 22. Dinamika indeks penguatan implementasi kebijakan T.A. 2021.



Dari gambar di atas, terlihat bahwa grafik dinamika indeks penguatan implementasi kebijakan TAB 2021 berjalan naik turun dari TW I ke TW II dan dari TW II ke TW III mengalami penurunan dan dari TW IV menjadi naik kembali sampai melebihi dari target TAB 2021 pada angka indeks 72, dengan realisasi sebesar angka indeks 89,42 dari skala 1-100. Target Indikator kinerja pendukung pada tahun kedua Renstra 2020-2024 ini merupakan IKP mandiri yang dibuat sendiri untuk mengukur proses bisnis internal yang diselenggarakan satker unsur pengawas/pembantu pimpinan dan unsur pelaksana tugas pokok Polda Lampung. Proses bisnis ini diukur untuk mendukung kelancaran dalam menyelesaikan sasaran strategis pada peta strategi *internal process perspective* dan *stakeholder perspective*.

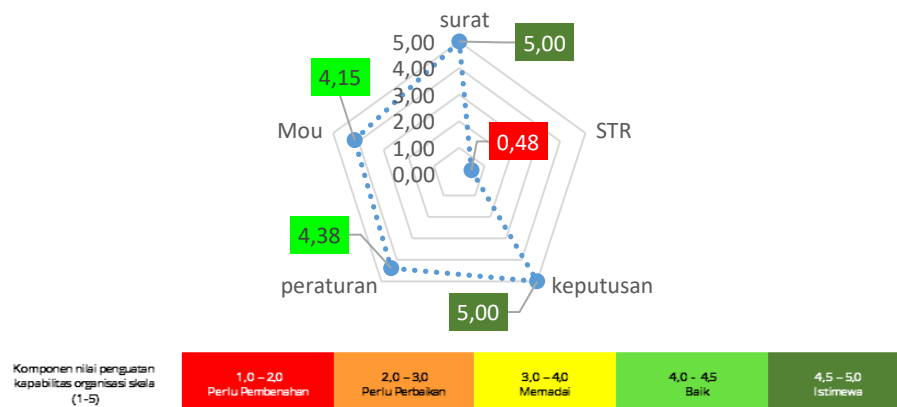
Kemudian untuk melihat kontribusi dari kinerja komponen penyusun indeks penguatan implementasi kebijakan yang terdiri dari nilai penguatan kapabilitas organisasi dan nilai penguatan kapasitas organisasi, dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 23. Kontribusi penyusun indeks penguatan implementasi kebijakan TAB 2021.



Terlihat bahwa komponen penyusun indeks penguatan implementasi kebijakan yaitu nilai penguatan kapasitas organisasi grafik performa kinerjanya mengalami naik turun setiap triwulannya. Hal ini dikarenakan penguatan kapasitas organisasi menyesuaikan dengan dinamika penanganan pandemi *covid19*, kegiatan mengumpulkan personel dan pertemuan dalam suatu ruangan dibatasi dan diganti dengan memperbanyak kegiatan virtual dengan memanfaatkan sarana video conference, tetapi kegiatan penguatan kapasitas organisasi secara *virtual* perlu ditingkatkan dalam hal materinya, oleh karena itu solusi untuk mempertahankan kinerja pada tahun yang akan datang tetap dilakukan tatap muka pertemuan, tetapi dibatasi dengan menyiapkan materi yang tepat, baik itu kegiatan sosialisasi, asistensi, supervisi, latihan teknis/bimtek dan rapat terbatas. Selanjutnya untuk melihat realisasi kinerja kontribusi dari masing-masing penyusun nilai penguatan kapabilitas dan penguatan kapasitas organisasi selama TAB 2021 sebagai berikut:

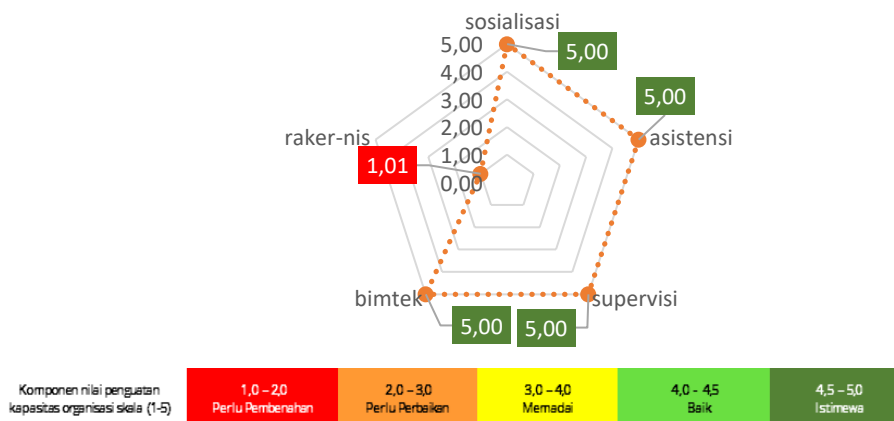
Gambar 24. Kontribusi kinerja penyusun nilai penguatan kapabilitas organisasi TAB 2021



Komponen penyusun nilai penguatan kapabilitas organisasi adalah berupa penerbitan petunjuk arah dalam bentuk surat, surat telegram, keputusan, peraturan dan penyelenggaraan MoU. Adapun perhitungan yang dilakukan adalah menggunakan skala *likert* dengan mengkonversi realisasi kinerja kedalam skala 1-5. Terlihat pada TAB 2021 kinerja penguatan kapabilitas organisasi melalui penerbitan surat dan keputusan, lebih menonjol dibandingkan dengan komponen lainnya. Hal ini menunjukan kemampuan satker pembina fungsi mengeluarkan jukrah sesuai dengan situasi yang berkembang dalam mendukung pencapaian target perspektif di atasnya pada peta strategi Polda Lampung. Semetera untuk komponen surat telegram nilai kinerja kecil karena jumlah petunjuk dan arahan hanya berdasarkan sumber direktif yang terbitkan Mabes Polri dan Polda Lampung pada TAB 2021. Sementara penyelenggaraan Mou dan pembentukan peraturan berada pada level kinerja baik, karena sebagai mana amanat Perkap Nomor 2

tahun 2018 tentang tata cara pembentukan peraturan di lingkungan Polri, mengeluarkan mengeluarkan baik peraturan Kapolda, maupun peraturan Kapolres. Kemudian untuk melihat konversi realisasi kinerja nilai penguatan kapasitas organisasi selama TAB 2021 sebagai berikut:

Gambar 25. Kontribusi penyusun nilai penguatan kapasitas organisasi TAB 2021



Adapun komponen-komponen yang dibutuhkan dalam nilai penguatan kapasitas organisasi bersumber dari unsur pengawas dan pembantu pimpinan (Inspektorat, Biro dan Bidang), unsur pelaksana tugas pokok (Direktorat dan Satuan Brimob) melalui penyelenggaraan sosialisasi, asistensi, supervisi, latihan fungsi, rapat teknis. Capaian kinerja dari nilai penguatan kapasitas organisasi umumnya sudah efektif, hanya kegiatan rakernis yang mengalami penurunan yang perlu pembenahan, Hal ini dikarenakan kegiatan tersebut terkendala dengan situasi pandemi covid19, kegiatan tersebut memerlukan ruang besar untuk mengumpulkan, mengingat upaya memutus mata rantai penyebaran virus covid19, oleh karena itu kegiatan rakernis dialihkan dengan kegiatan lainnya.

IKP-8 Indeks Tatakelola Kepolisian

Pada indikator kinerja ini penilaian didasari pada Instrumen untuk mengukur kinerja dan capaian program reformasi birokrasi Polri. ITK menjadi landasan bagi pengambilan kebijakan berdasarkan bukti dan alat perbandingan kinerja yang objektif, adil dan akurat, berdasarkan tujuh prinsip *good governance* setiap tahun anggaran berjalan.

Gambar 26. tujuh prinsip dalam penilaian ITK



➢ Diadopsi dari Prinsip Good Governance kemudian diturunkan serangkaian *actionable indicators*
 ➢ Terdapat kurang lebih 900 indikator pada Satker Polda dan 350 indikator pada Satker Polres

Adapun yang menjadi dasar dalam perhitungan ini adalah Perkap Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengukuran Tata Kelola Polri. Terdapat total lebih dari 900 indikator pertanyaan yang harus dijawab dan dilengkapi data dukungannya yang selanjutnya diunggah ke dalam aplikasi *web* ITK-O. Selanjutnya tim pokja tingkat Polda melakukan verifikasi terhadap data indikator ITK-O tersebut, dan apabila terdapat catatan perbaikan maka dikembalikan kembali ke Polres/satker untuk diperbaiki dan dilakukan upload ulang dan mendapat approval/persetujuan tingkat Polda. Kemudian secara *virtual* pada *web* aplikasi ITK-O tersebut tim Pokja Mabes Polri melakukan verifikasi dan penilaian bersama eksternal. Berikut ini *timeline* kegiatan pengukuran ITK sebagai berikut:

Gambar 27. *Timeline* kegiatan penilaian ITK.

KEGIATAN	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PENGAJUAN SPRINT ITK-O	√											
RAPAT INTERNAL	√											
PENJELASAN KEPADA PJU	√											
PELATIHAN TEKNIS ITK-O MELALUI VICON OLEH MABES		√										
PELATIHAN TEKNIS ITK-O DI POLDA		√										
PELAKSANAAN UPLOAD ITK-O			√	√	√							
PENGUMPULAN DATA PERSEPSI					√	√						
VERIFIKATOR DATA					√	√						
ANALISA DATA ITK							√	√				
SKOR ITK									√	√		
LAUNCHING HASIL ITK-O POLDA											√	√

Untuk jenis indikator dalam penilaian ITK ini masing-masing terdapat indikator umum, yang merupakan indikator yang ada pada semua satker, dan digunakan untuk mengukur seluruh satker dan terdapat 25 indikator generik pada satker Polda. Sedangkan indikator penilaian lainnya yang spesifik yaitu yang hanya berlaku pada satker/satfung tertentu saja sesuai tupoksi.

Adapun untuk penilaian ITK TAB 2021 merupakan penilaian mandiri yang dilakukan oleh seluruh Polres di Polda Lampung. Selanjutnya hasil capaian dari indikator kinerja pendukung ini sebagai berikut:

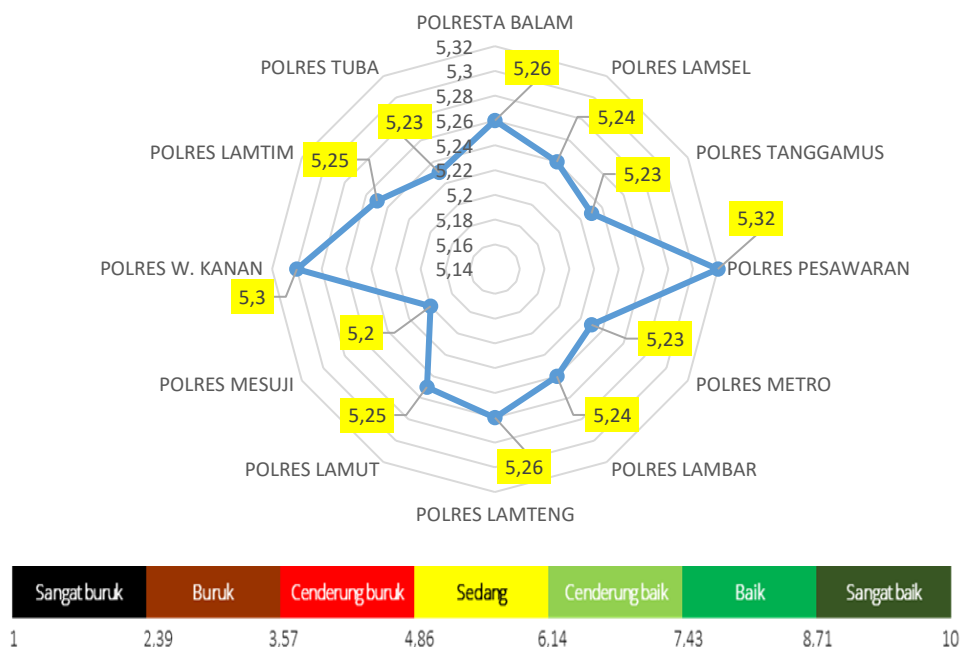
Tabel 14. Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKP Indeks tatakelola Kepolisian TAB 2021.

SS-5 Manajemen pengawasan kepolisian yang akuntabel.						
IKU-8 Indeks Tatakelola Kepolisian						
Realisasi 2020	2021			kenaikan dari 2020-2021 (%/tahun)	% capaian dengan target jangka menengah	
	target	realisasi	capaian		Target 2022 (5,3)	Target 2023 (5,4)
5,73	5,2	5,25	100,96%	-8,38%	99,06%	97,22%

Hasil dari realisasi kinerja indeks tata kelola kepolisian Polda Lampung yang dilakukan penilaian terhadap 42 Polres dengan hasil skor rata-rata ITK adalah 5,25. Realisasi kinerja ini telah melebihi dari target kinerja ITK 5,2, sehingga persentase capaian sebesar 100,96% dan apabila dibandingkan dengan realisasi 2020 skor 5,73 maka terdapat penurunan sebesar 8,38%.

Keberhasilan kinerja ini tentunya berkat upaya pemahaman bersama terhadap implementasi indeks tatakelola kepolisian sebagai fondasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Polri. Fungsi RBP Rorena Polda Lampung dalam rangka menggiatkan tatakelola kepolisian ini perlu terus melakukan penguatan dalam implementasinya. Karena terdapat indikator-indikator pertanyaan yang harus detail dilengkapi berikut dengan data dukungannya, hal ini guna menambah skor penilaian. Penilaian disini menggunakan metodologi AHP (*analitical Hierarchy process*) berdasarkan atas pemilihaan-pemilihan analisa dalam penilaiannya menyangkut tujuh prinsip (kompetensi, keadilan, perilaku, transparansi, efektivitas, responsif dan akuntabilitas) yang harus ada pada satker yang dinilai, yang didalamnya terdapat indikator pengukuran dengan isu delapan area perubahan reformasi birokrasi, indikator tentang SDM, sarpras, anggaran, pengawasan, sistem dan metode, inovasi dan sistem pelaporan. Berikut ini disajikan gambar sebaran skor hasil penilaian ITK TAB 2021 sebagai berikut:

Gambar 28. Sebaran skor ITK pada 14 Polres Polda Lampung TAB 2021.



Terlihat hasil skor penilaian ITK pada empat belas Polres berada kisaran skor 5 dengan kategori sedang dalam sistem penilaian indeks tatakelola kepolisian. Selanjutnya dalam mengimplementasikan tatakelola kepolisian ini diperlukan komitmen bersama baik dari unsur pimpinan

maupun seluruh personel, untuk bersama-sama memperbaiki pelaksanaan tugas melalui tujuh prinsip tata kelola.

IKP-9 Indek kepuasan pelayanan kepolisian

Indikator kinerja ini memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan administrasi kepolisian di lingkungan Polda Lampung dan jajaran, dalam mengakomodir layanan dasar publik (pelayanan yang umumnya dibutuhkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Personel Polri yang profesional dan kepuasan masyarakat merupakan pondasi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kepolisian secara umum. Personel Polri yang prediktif, responsibilitas, transparan berkeadilan yang didukung dengan sarana prasarana yang memadai menjadi harapan masyarakat yang mendapatkan pelayanan yang paripurna. Hal ini sejalan dengan program Kapolri transformasi Polri menuju presisi program yang keempat yaitu transformasi pelayanan publik, manajemen mutu pelayanan, status WBK WBBM, pelayanan yang terintegrasi, pemanfaatan teknologi, penguatan sistem komunikasi, kehumasan dan penguatan kapasitas sumberdaya dan kemitraan. Hal inilah yang diharapkan dari IKU ini adalah adanya ekspekstasi yang baik dan positif dari masyarakat atas pelayanan administrasi kepolisian khususnya pelayanan pada fungsi SPKT, pelayanan satpas SKCK dan pelayanan satpas SIM, pelayanan satu atap terhadap STNK dan BPKB. Indikator kinerja ini diukur melalui penyebaran kuisiner Indeks Kepuasan Masyarakat pada 54 sentra pelayanan administrasi Kepolisian, yang meliputi SPKT, Satpas SKCK, Satpas SIM dan Samsat. Berikut ini tabel analisa dan evaluasi capaian kinerja indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan administrasi kepolisian sebagai berikut:

Tabel 15. Analisa dan evaluasi capaian kinerja IKP indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan administrasi kepolisian.

SS-5 Manajemen pengawasan kepolisian yang akuntabel.						
IKU-9 Indeks kepuasan layanan kepolisian						
Realisasi 2020	2021			kenaikan dari 2020-2021 (%/tahun)	% capaian dengan target jangka menengah	
	target	realisasi	capaian		Target 2022 (81)	Target 2023 (82)
80,91	80	96,19	120%	18,88%	118,75%	117,30%

Capaian kinerja dari IKU indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan administrasi kepolisian tahun 2021 adalah kategori sangat baik dari hasil realisasi kinerja sebesar 80,91, dan apabila dibandingkan dengan realisasi 2019 maka mengalami kenaikan sebesar 1,17%. Secara internal hasil IKM ini sangat bermanfaat bagi unit pelayanan administrasi kepolisian untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada masa yang akan datang. Kegiatan survei terhadap kepuasan pelayanan kepolisian ini

telah dilakukan Polda Lampung intensif sejak Renstra 2015-2019 dan dilanjutkan sampai dengan sekarang.

Pada indikator kinerja ini, Polda Lampung memandang bahwa Kepolisian harus secara berkelanjutan meningkatkan pelayanan sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Polri dalam melakukan pelayanan prima. Berikut ini hasil pengolahan IKM TAB 2021 sebagai berikut:

Tabel 16. Hasil Kajian IKM Polda Lampung T.A. 2021.

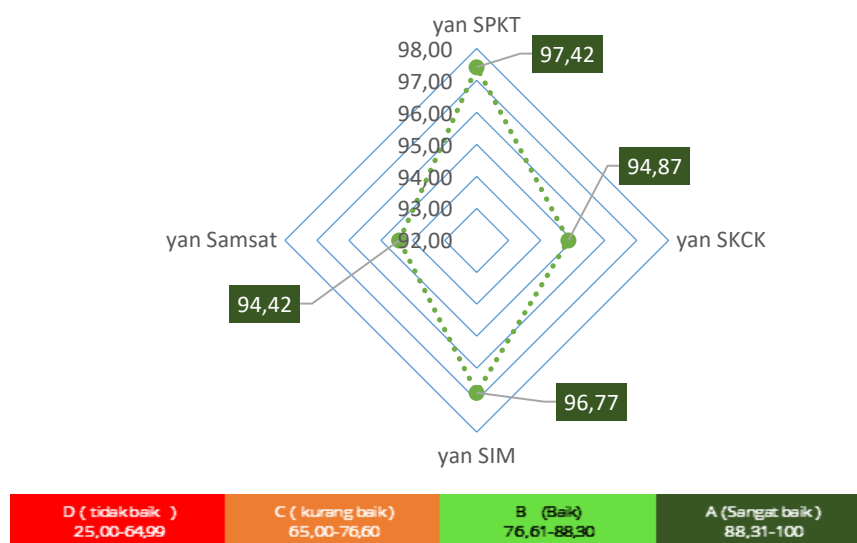
NO	SATKER	NILAI IKM				NILAI IKM SATKER	NILAI MUTU IKM (kinerja unit pelayanan)
		SPKT	SKCK	SIM	STNK/BPKB		
1	SPKT Polda Lampung	98,58				98,58	A (sangat baik)
2	Ditintelkam		96,67			96,67	A (sangat baik)
3	Ditlantas				92,02	92,02	A (sangat baik)
4	Polresta Balam	97,54	96,64	98,07		97,42	A (sangat baik)
5	Polres Lamsel	98,15	96,87	98,71	92,29	97,91	A (sangat baik)
6	Polres Lamtim	98,88	99,38	98,88	90,91	99,05	A (sangat baik)
7	Polres Metro	97,51	96,18	97,49	91,73	97,06	A (sangat baik)
8	Polres Lamteng	96,24	81,80	92,45	92,45	90,17	A (sangat baik)
9	Polres Tuba	98,99	98,78	96,83	98,84	98,20	A (sangat baik)
10	Polres Mesuji	99,14	97,17	98,27	98,27	98,19	A (sangat baik)
11	Polres Lamut	94,44	97,40	96,58	97,12	96,14	A (sangat baik)
12	Polres Waykanan	98,63	86,77	99,05	97,61	94,82	A (sangat baik)
13	Polres Lambar	98,04	98,09	96,83	96,75	97,65	A (sangat baik)
14	Polres Tanggamus	97,46	92,17	96,45	92,29	95,36	A (sangat baik)
15	Polres Pesawaran	91,85	96,57	92,39	93,13	93,61	A (sangat baik)
16	Polres Pringsewu	97,27	93,57	94,39	95,66	95,08	A (sangat baik)
17	Polres Tubaba	98,54	94,96	98,34	92,83	97,28	A (sangat baik)
	Nilai IKM per jenis yan	97,42	94,87	96,77	94,42	96,19	A (sangat baik)
Nilai IKM Polda Lampung 2021						96,19	A (sangat baik)

Dari hasil kajian IKM diperoleh realisasi kinerja IKM Polda Lampung TAB 2021 adalah sebesar 90,19 atau dengan nilai mutu kategori A (sangat baik). Secara umum menunjukkan bahwa indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan administrasi kepolisian pada TAB mampu mempertahankan dan meningkatkan nilai kinerja dari target yang telah ditentukan.

Pelayanan administrasi kepolisian berada pada interval nilai konversi IKM antara 90-99. Sehingga apabila dibandingkan dengan kegiatan IKM 2020, maka mengalami peningkatan sebesar nilai 18,88%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan hasil penelitian pelayanan publik yang diselenggarakan Puslitbang tahun 2021 di Polda Lampung dengan nilai hasil sebesar 86,42 kualitasnya lebih rendah dibandingkan dengan hasil survei mandiri. Terdapat selisih hasil sebesar 9,77%. Perbedaan mungkin terjadi karena perbedaan dalam metode penelitian. Tetapi apapun hasilnya hal ini menunjukkan hasil yang sama dengan kategori sangat baik. Selanjutnya apabila dilihat secara terperinci berdasarkan jenis pelayanan administrasi kepolisian, maka pelayanan SPKT

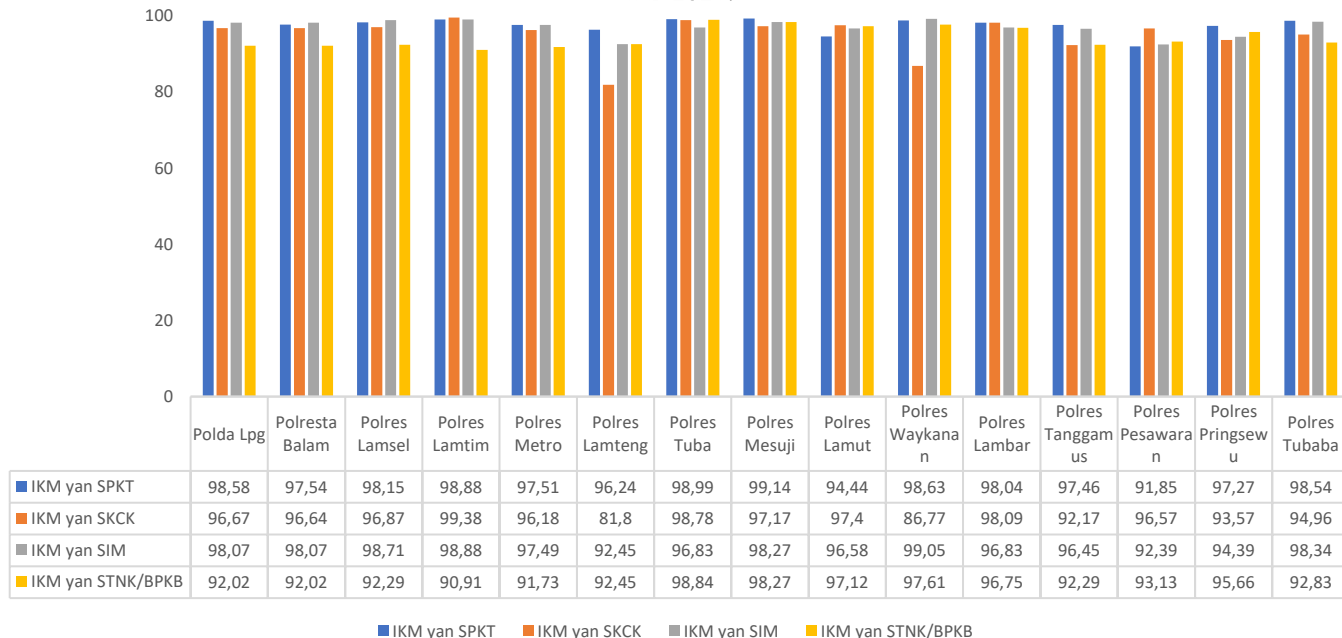
menunjukkan kinerja yang paling besar dari pelayanan kepolisian lainnya, dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 29. Sebaran kinerja indeks pelayanan kepolisian Polda Lampung TAB 2021.



Terlihat bahwa keberhasilan IKM pelayanan administrasi kepolisian pada TAB mengalami peningkatan dari tahun 2020, terlihat rata-rata pelayanan pada semua unit pelayanan sudah masuk dalam kategori sangat baik dibanding tahun 2020. Hal ini karena terdapat upaya perbaikan dan peningkatan mulai aspek personel menyangkut kompetensi, responsif dan perilaku, kemudian aspek sarpras menyangkut ruang kerja dan almatsus pendukung pelayanan. Sedangkan aspek sistem dan metode menyangkut efektivitas, transparansi, keadilan dan akuntabilitas, telah adanya upaya peningkatan dalam mengimplementasikan standar pelayanan yang jelas sebagaimana yang diamanatkan dalam UU pelayanan publik. Selanjutnya perbandingan IKM pelayanan kepolisian tahun 2021.

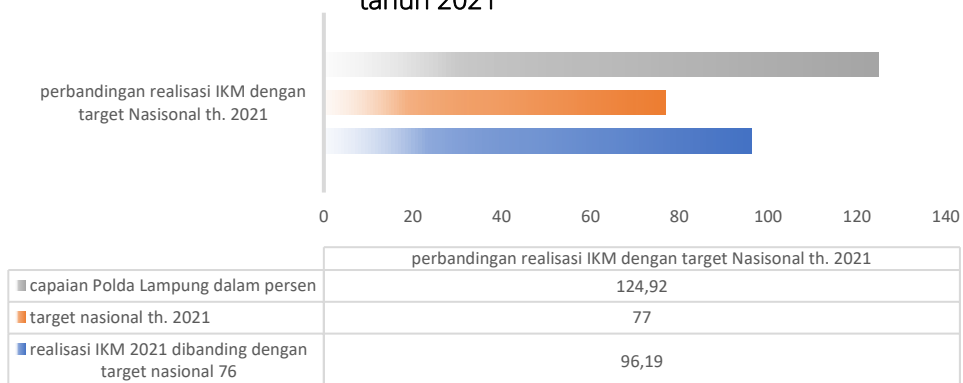
Gambar 30. Perbandingan IKM pelayanan administrasi kepolisian satker TAB 2021.



Dalam rentang tahun 2021 skor IKM tertinggi untuk pelayanan SPKT, SKCK, SIM dan pelayanan Samsat dipegang oleh Polres Lampung Timur, disusul Polres Mesuji, Lampung Utara dan Polres Metro mendapat skor yang terbesar hal ini sejalan pula dengan hasil penelitian dari Puslitbang Polri terkait penelitian yang sama dengan skor 86,42. Sedangkan skor IKM terendah adalah pelayanan STNK/BPKB di Polres Lampung Timur sebesar 90,91. Dari data ini Polres Lampung Timur dengan adanya maka perlu segera meningkatkan kualitas pelayanan STNK dan BPKB yang bekerja sama dengan pemerintahan daerah dalam meningkatkan pelayanan satu atap tersebut.

Selanjutnya realisasi kepuasan masyarakat atas pelayanan kepolisian Polda Lampung apabila dibandingkan dengan target nasional 2021 sebesar nilai 77, maka hasil capaiannya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 31. Pencapaian realisasi IKM dibanding target nasional tahun 2021



Dari gambar di atas apabila realisasi IKM Polda Lampung tahun 2021 dibandingkan dengan target nasional, maka diperoleh capaian sebesar 124,92%. Keberhasilan ini dimungkinkan terjadi dikarenakan, pertama perbedaan metode yang digunakan Polda Lampung dalam memperoleh nilai IKM dengan mengadopsi Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik, sedangkan Mabes Polri menggunakan metode tersendiri melalui Puslitbang Polri. Tetapi dalam kenyataan realisasinya tidak menunjukkan perbedaan realisasi hasil penelitian berada pada kategori baik.

Pada tahun kedua Renstra 2020-2024 Polda Lampung telah melakukan sinkronisasi dan harmonisasi terhadap nilai skor IKM sebagai mana Perpol Nomor 4 Tahun 2018 dan Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik dengan aspek-aspek dari UU RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik dan PP RI Nomor 96 Tahun 2012 sebagai peraturan pelaksanaannya, khususnya untuk memenuhi

ketentuan yang diamanatkan pada Pasal 21 UU RI Nomor 25 Tahun 2009. Dimana pada Pasal tersebut diterangkan, bahwa yang menjadi komponen dasar dalam standar pelayanan publik sekurang-kurangnya memuat tentang dasar, persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, sarana dan prasarana/fasilitas, kompetensi petugas, pengawas internal, penanganan pengaduan/saran dan masukan, jumlah petugas, jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan sesuai dengan prosedur, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko dari keragu-raguan, dan terdapat evaluasi kinerja terhadap petugas pelaksana pelayanan.

IKP-10 Persentase penanganan pengaduan masyarakat.

Pada indikator kinerja pendukung ini penilaian didasari pada penanganan penyelesaian pengaduan masyarakat atas ketidakpuasan pelayanan/kinerja Polda Lampung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selama TAB yang dilakukan monitoring oleh Itwasda di dalam sistem pengendali instansi pemerintahan (SPIP) di Polda Lampung untuk ditindaklanjuti oleh satuan kerja yang diadakan masyarakat. Adapun capaian dari indikator kinerja ini sebagai berikut:

Tabel 17. Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKP Persentase penanganan pengaduan masyarakat.

SS-5 Manajemen pengawasan kepolisian yang akuntabel.						
IKU-10 Persentase penanganan pengaduan masyarakat						
Realisasi 2020	2021			kenaikan dari 2020-2021 (%/tahun)	% capaian dengan target jangka menengah	
	target	realisasi	capaian		Target 2022 (67)	Target 2023 (70)
91,65%	63%	78,82%	120%	-13,99%	117,64%	112,60

Adapun komponen-komponen yang dibutuhkan dalam penilaian persentase penanganan pengaduan masyarakat pada TAB adalah banyak register surat yang masuk ke Polda Lampung melalui inspektorat yang berisikan pengaduan masyarakat atas kinerja Satker di lingkungan Polda Lampung, kemudian oleh Itwasda disalurkan kepada satker tersebut untuk ditindaklanjuti untuk diselesaikan menurut peraturan yang berlaku. kemudian dalam setiap proses penyelesaiannya dilakukan monitoring dan verifikasi atas langkah penyelesaian tersebut, sehingga langkah penyelesaian dumasikan tersebut dapat menjelaskan dan menjawab terhadap objek aduan dalam surat tersebut, yang selanjutnya disampaikan kepada pengadu melalui surat jawaban dumasikan sesuai alokasi waktu yang sesingkat-singkatnya. Capaian kinerja dari Persentase penanganan pengaduan masyarakat pada TAB adalah sebesar 120% dan dalam realisasi tahun 2021 dibanding 2020

mengalami penurunan sebesar 13,99%. Berikut ini disajikan gambar Dinamika realisasi persentase penanganan dumas dan konversi kinerja penanganan dumas setiap triwulannya sebagai berikut:

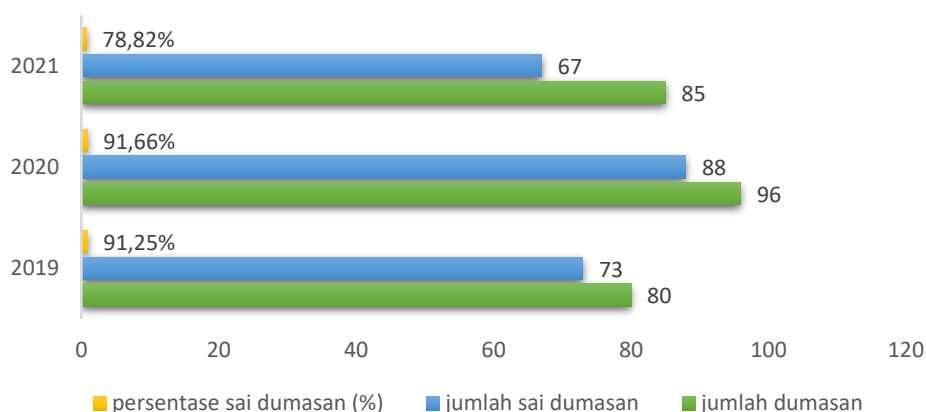
Gambar 32. Dinamika realisasi persentase penanganan dumas dan konversi kinerja penanganan dumas TAB 2021.



Dari gambar di atas, terlihat bahwa grafik dinamika persentase penanganan dumas TAB 2021 dari TW I sampai ke TW IV angka indeks berada pada kisaran 70-80%, walaupun terdapat kecenderungan menurun tetapi performa kerjanya menunjukkan kinerja level 4. Target Indikator kinerja pendukung pada tahun pertama Renstra 2020-2024 ini merupakan IKP mandiri yang dibuat sendiri untuk mengukur proses bisnis internal, khususnya menyangkut pengelolaan pengawasan dan pengendalian kinerja yang antisipatif yang diselenggarakan satker Itwasda selaku Apip. Pada dasarnya IKP ini harus mendukung proses bisnis guna kelancaran kinerja pada perspektif *customer* dan *stakeholder* perspektif.

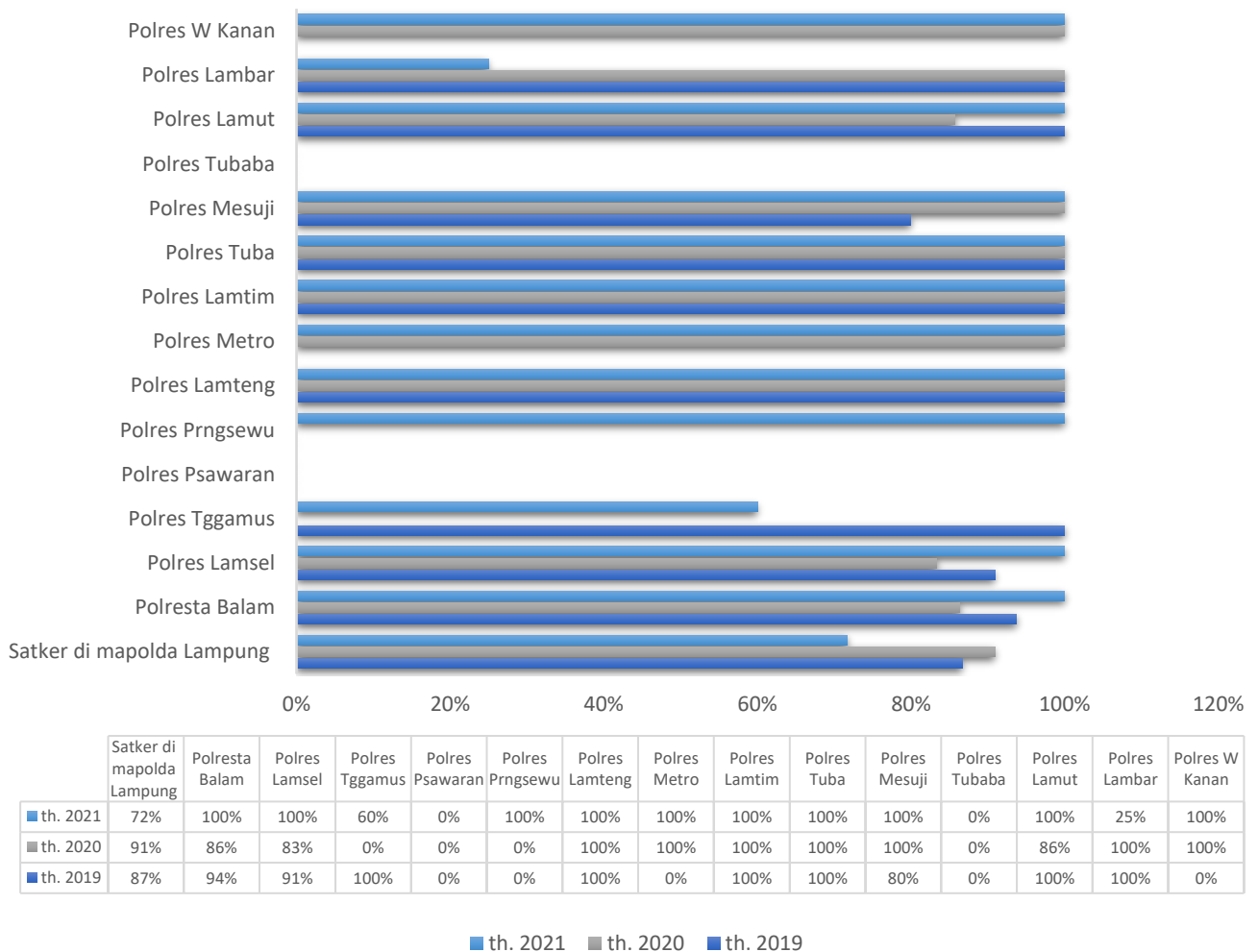
Kemudian untuk melihat kontribusi perbandingan persentase penanganan pengaduan selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 33. Perbandingan penanganan/penyelesaian dumas dalam tiga tahun terakhir.



Berdasarkan gambar tersebut di atas maka selama tiga tahun terakhir dumasian tahun 2021 mengalami penurunan 11,45% dari tahun 2020, dan untuk penyelesaian tahun 2021 juga mengalami penurunan sebesar 14%. Menurunnya dumasian menunjukkan profesionalisme kinerja terus ditingkatkan mengingat masyarakat makin kritis terhadap kinerja Polri, khususnya Polda Lampung, oleh karena pengawasan dan pengendalian yang antisipatif mutlak diperlukan dengan membangun sinergi antar satker dengan fungsi Apip. Prinsip transparansi yang berkeadilan dalam menjalankan fungsi kepolisian khususnya pelayanan kepada masyarakat yang mencari keadilan harus terus dilakukan penguatan. Selanjutnya perbandingan jumlah dumasian dengan jumlah penyelesaian dumasian setiap Satker pada dua tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 34. Perbandingan persentase penyelesaian dumasian pada satker dan Polres selama tiga tahun terakhir



Terlihat bahwa realisasi kinerja persentase penyelesaian dumasian selama tiga tahun berturut-turut yang tidak ada dumasian yaitu Polres Pesawaran, Polres Tubaba, dan Pringsewu. Selanjutnya selama 2020-2021 yang masih belum tuntas 100% adalah satker di Mapolda Lampung yakni Ditreskrim, Ditreskrimsus dan Bidpropam, disusul

Polres Tanggamus dan Polres Lampung Barat. Adapun materi dumasannya umumnya menyangkut ketidakadilan yang dirasakan pengadu/masyarakat, atas pelayanan penyidikan Polda Lampung dan jajaran, pengaduan tersebut dapat bersumber dari surat pengaduan melalui lembaga Kopolnas, Kemenkumham, Sekretaris Negara, LSM maupun lembaga lainnya dan perorangan.

Pada tahun 2021 penyelesaian dumasannya dapat diakselerasi oleh fungsi Itwasda melalui kegiatan monev yang berkelanjutan dan antisipatif selama TAB, sehingga mempercepat dalam penyelesaiannya. Penanganan dumasannya dapat ditekan dengan membangkitkan rasa dan karsa dalam dedikasi kerja yang baik, disamping kesadaran rasa solidaritas internal yang terus dikembangkan sebagai suatu gerakan moral. Kapolda Lampung Irjenpol Drs. Hendro Sugiatno, M.M. telah mengeluarkan kebijakan dalam memimpin Polda Lampung, bahwa dalam pelaksanaan tugas agar mempedomani perilaku organisasi jiwaku penolong. Kebijakan ini harus menjadi *best practice* dan *baseline* perilaku personel dalam menjalani tupoksi.

Fakta keberhasilan dalam penanganan dumasannya ini menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2021, dumasannya yang disalurkan Itwasda kepada Satker yang diadukannya, yang umumnya menyangkut penanganan perkara fungsi Reskrim. Adapun upaya yang telah, sedang dan terus dilakukan guna mengefektifkan penanganan dumasannya adalah membangun komunikasi yang *intens* antar fungsi pengawas pada Satker di lingkungan Polda Lampung, disamping mengakselerasi personel yang ditugaskan dalam menangani objek aduan tersebut. Upaya lainnya adalah dengan memetakan dumasannya yang masuk dan Satker mana saja yang bertanggungjawab atas objek dumasannya tersebut secara berkelanjutan. Langkah upaya ini bersifat antisipatif dalam rangka menekan dumasannya tidak menjadi meluas dapat ditangani secara sektoral.

IKP-11 Persentase penyelesaian pelanggaran personel.

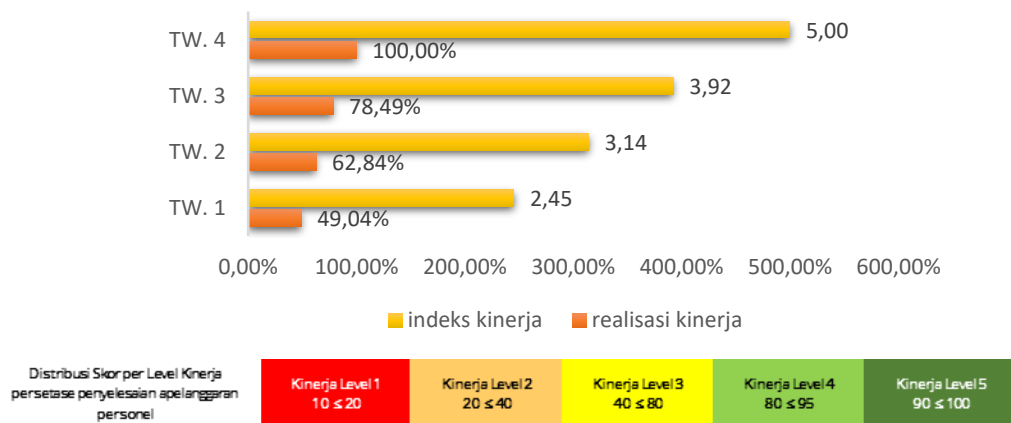
Pada indikator kinerja ini penilaian didasari pada penyelesaian pelanggaran personel di lingkungan Polda Lampung yaitu pelanggaran disiplin dan Kode Etik Profesi Polri pada setiap TAB, guna menjamin kepastian hukum dan terpeliharanya etos kerja, dedikasi dan loyalitas terhadap organisasi. Adapun capaian dari indikator kinerja ini sebagai berikut:

Tabel 18. Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKP Persentase pelanggaran personel

SS-5 Manajemen pengawasan kepolisian yang akuntabel.						
IKU-11 Persentase penyelesaian pelanggaran personel						
Realisasi 2020	2021			kenaikan dari 2020-2021 (%/tahun)	% capaian dengan target jangka menengah	
	target	realisasi	capaian		Target 2022 (83)	Target 2023 (84)
94,98%	82%	100%	120%	26,34%	120%	119,05%

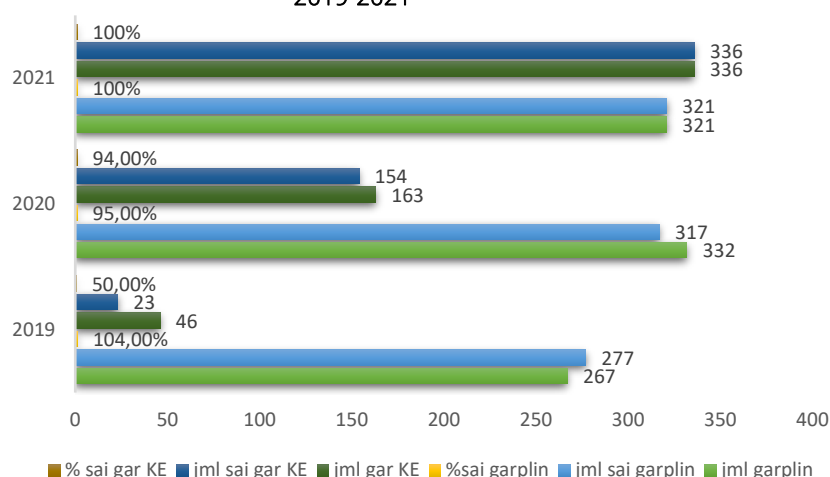
Adapun komponen-komponen yang dibutuhkan dalam pengukuran kinerja persentase penyelesaian pelanggaran personel adalah jumlah penyelesaian pelanggaran disiplin dengan jumlah penyelesaian pelanggaran kode etik profesi pada TAB dibagi jumlah total pelanggaran disiplin dan Kode Etik pada TAB, kemudian dipersentasekan. Realisasi kinerja dari persentase penyelesaian pelanggaran personel pada TAB adalah sebesar 100% melebihi target, dengan capaian 120%. Sementara itu kenaikan realisasi tahun 2021 dibanding 2020 adalah sebesar 26,34%. Selanjutnya dinamika kinerja persentase penyelesaian masalah hukum setiap triwulan dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 35. Dinamika realisasi kinerja persentase penyelesaian pelanggaran personel TAB 2021



Dari gambar di atas, terlihat bahwa grafik dinamika realisasi kinerja dengan indeks kinerja berdasarkan skala likert 1-5, maka performa kinerja TW I sampai dengan TW III berada level kinerja 3 dan selanjutnya kinerja pada TW IV berada pada level 5. Kinerja pada TAB ini terdapat kecenderungan meningkat dan naik pesat pada TW IV, faktor peningkatan yang aktual adalah menurunnya pandemi covid19 meningkatkan kegiatan dalam penyelesaian pelanggaran personel, disamping itu berbagai petunjuk dan arahan dalam protokol kesehatan dioptimalkan. Kemudian untuk melihat perbandingan persentase penyelesaian pelanggaran personel selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 36. Perbandingan penyelesaian jenis pelanggaran personel 2019-2021



Terlihat bahwa pada TAB 2021, kuantitas pelanggaran personel mengalami peningkatan baik jumlah pelanggaran maupun penyelesaian pelanggaran personel. Melihat fakta ini maka kegiatan pembinaan disiplin dan kode etik ini perlu terus untuk dilakukan penguatan melalui pembinaan pada masing-masing satker, sehingga secara tidak langsung diharapkan dapat menurunkan pelanggaran personel. Demikian pula diiringi dengan peningkatan kemampuan personel fungsi Propam dalam proses penyelesaian pelanggaran, dengan memperbanyak latihan dan bimtek penanganan pelanggaran disiplin dan kode etik Polri, di samping itu mitigasi terhadap pelanggaran personel harus direspon dengan baik. Selanjutnya data jumlah pelanggaran dan penyelesaian pelanggaran personel TAB 2021 secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 19. Data perbandingan jumlah pelanggaran dengan jumlah penyelesaian pelanggaran personel persatker pada TAB

No	Satker	Jml gar disiplin	Jml sai gar disiplin	Jml gar kode etik	Jml sai gar kode etik
1.	Bidpropam	49	49	58	58
2.	SPN	1	1	23	23
3.	Ditpolair	2	2	6	6
4.	Satbrimob	7	7	3	3
5.	Polresta Balam	23	23	32	32
6.	Polres Lamsel	28	28	15	15
7.	Polres Tanggamus	25	25	11	11
8.	Polres Pesawaran	6	6	6	6
9.	Polres Pringsewu	12	12	13	13
10.	Polres Lamteng	17	17	22	22
11.	Polres metro	16	16	15	15
12.	Polres Lamtim	22	22	26	26
13.	Polres Tuba	6	6	9	9
14.	Polres Mesuji	37	37	17	17
15..	Polres Tubaba	15	15	11	11
16.	Polres Lamut	25	25	23	23
17.	Polres Lambar	16	16	17	17
18.	Polres Waykanan	14	14	29	29
	JUMLAH	307	307	336	336

Dari data tersebut di atas dapat dianalisa, bahwa sepanjang tahun 2021 kontribusi pelanggaran disiplin personel didominasi personel di satker Mapolda sebanyak 49 pelanggaran, disusul garplin personel Polres Mesuji sebanyak 37 pelanggaran dan untuk jumlah pelanggaran kode etik didominasi dilakukan personel satker Mapolda dan Polresta Bandar Lampung. Kepada satker tersebut perlu penguatan dalam pembinaan disiplin dan kode etik dan perlu digali yang menjadi akar stimulan terjadinya pelanggaran. Selanjutnya jumlah total penyelesaian terhadap pelanggaran personel TAB adalah sebanyak 643 pelanggaran. Dari fakta-fakta tersebut di atas ini menunjukkan bahwa persentase penyelesaian pelanggaran personel di Polda Lampung jajaran dapat memberikan kontribusi terhadap pengendalian dan pengawasan yang antisipatif dengan memberikan hukuman yang tepat kepada personel yang melanggar. Penyelesaian pelanggaran personel optimal memberikan kepastian hukuman terhadap personel yang melanggar di tahun 2021. Hal ini disebabkan aktifnya fungsi Propam melakukan proses pemeriksaan yang ditambah lagi dengan fungsi ankum berperan secara optimal, adapun upaya hukum dalam pembinaan personel, memberikan implikasi pada meningkatnya keadilan dan kepastian hukum bagi personel yang melanggar.

Walaupun demikian masih terdapat kendala dan hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian pelanggaran baik disiplin maupun kode etik, yakni masih terdapatnya adanya pemikiran Ankum yang mempertimbangkan kembali terhadap berkas perkara pelanggaran personelnnya, sehingga proses penyelesaian pelanggaran personel menjadi lama dan kadang tidak tuntas memberikan kepastian hukum. Terlebih untuk penyelesaian pelanggaran kode etik, seminimal mungkin menghindari maladminstrasi sehingga tidak dapat membuka peluang terperiksa untuk mengajukan gugatan TUN. Selanjutnya kelemahan yang lain dikarenakan lemahnya dalam proses pemeriksaan yang menyebabkan hasil proses persidangan terperiksa dinyatakan tidak terbukti.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengefektifkan tata cara penyelesaian pelanggaran personel adalah; pada proses pemeriksaan dilakukan gelar perkara pelanggaran dan dikomunikasikan dengan ankum, pada proses persidangan kode etik dimonitor oleh fungsi Bidkum dan Itwasda. Hal ini dalam rangka untuk meminimalisir terjadinya maladministrasi, termasuk juga pada proses penerbitan hukuman kode etik, sebelumnya dilakukan pemeriksaan/verifikasi administrasi oleh fungsi Bidkum. Upaya selanjutnya adalah melakukan penyegaran personel yang mengawaki pada bidang fungsi Propam yang diiringi dengan peningkatan kapasitas organisasi melalui intensitas

kegiatan asistensi, bimtek, sosialisasi dan rakernis pengembangan fungsi Propam jajaran Polda Lampung.

IKP-12 Persentase penyelesaian masalah hukum

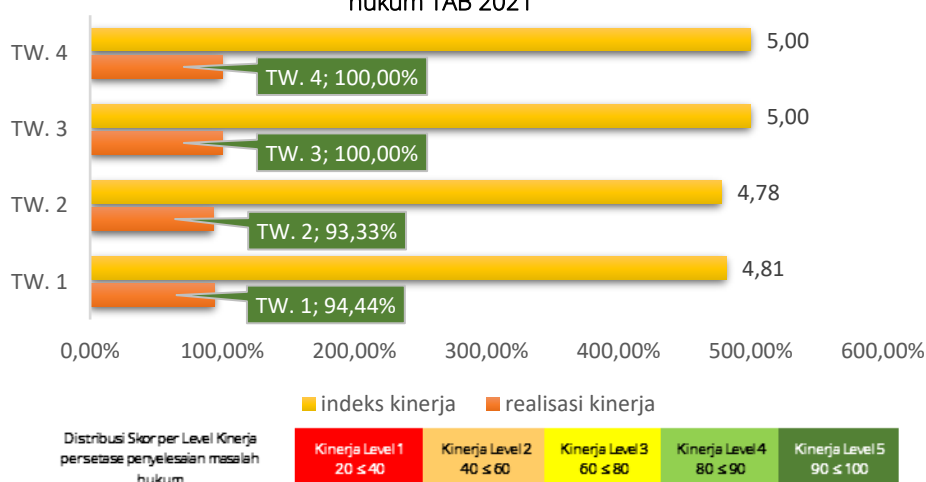
Pada indikator kinerja ini penilaian didasari pada terjadinya gugatan (pra peradilan/perdata/TUN) kepada Polda Lampung dan satker dibawahnya, atas tindakan maladministrasi yang telah dilakukan satker dan Polda Lampung pada TAB. Diharapkan dari hasil kinerja Polda Lampung personelnnya mampu menunjukkan kompetensi yang prediktif, responsibiitas dan transparasi berkeadilan, apabila mendapat gugatan peradilan. Selanjutnya hasil dari proses peradilan gugatan tersebut, dimenangkan Polri/Polda Lampung sebagai capaian dari indikator kinerja ini sebagai berikut:

Tabel 20. Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKP Persentase penyelesaian masalah hukum.

SS-5 Manajemen pengawasan kepolisian yang akuntabel.						
IKU-12 Persentase penyelesaian masalah hukum						
Realisasi 2020	2021			kenaikan dari 2020-2021 (%/tahun)	% capaian dengan target jangka menengah	
	target	realisasi	capaian		Target 2022 (91,6)	Target 2023 (91,8)
95,00%	91,4	100%	109,41%	5,26%	109,17%	108,93%

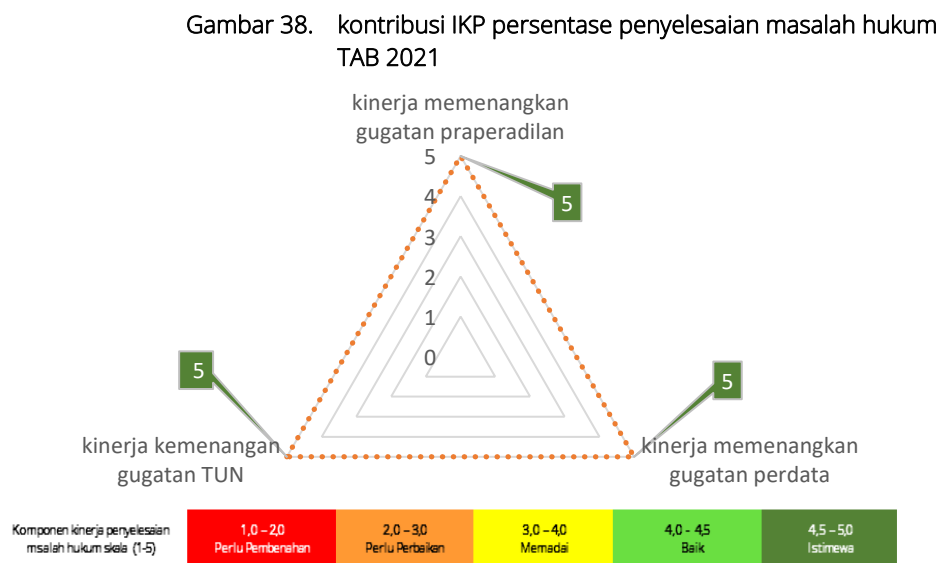
Adapun komponen-komponen yang dibutuhkan dalam penilaian Persentase penyelesaian masalah hukum adalah rekapitulasi kegiatan pemberian bantuan hukum kepada satker dan personel Polda Lampung yang mendapat gugatan baik praperadilan, perdata maupun gugatan TUN baik dari masyarakat maupun dari gugatan TUN dari personel Polda Lampung. Perhitungan persentase gugatan baik yang dimenangkan Polri maupun yang kalah dibatasi pada hasil putusan pengadilan pada TAB. Selanjutnya dinamika kinerja persentase penyelesaian masalah hukum setiap triwulan dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 37. Dinamika realisasi kinerja persentase penyelesaian masalah hukum TAB 2021



Dari gambar di atas, terlihat bahwa grafik dinamika realisasi kinerja dengan indeks kinerja berdasarkan perhitungan *skala likert 1-5*, maka performa kinerja TW I pada skala 4,81, kemudian pada TW II berada level kinerja 4,78 dan selanjutnya kinerja pada TW III dan IV kembali pada kinerja pada level 5. Kinerja pada TAB ini terdapat kecenderungan berada pada kinerja level 5. Apabila dibandingkan dengan target nasional persentase penanganan masalah hukum sebesar 75%, maka capaian kinerja Polda Lampung adalah sebesar 133,33%. Fakta selama perkembangan menurunnya pandemi *covid19* tidak membatasi kegiatan dalam proses peradilan semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan tersebut optimal menggunakan protokol kesehatan. Polda Lampung selaku tergugat dalam proses peradilan tersebut optimal menyajikan bukti hukum sesuai objek hukum yang disengketakan. Upaya hukum yang disusun fungsi Bidkum sesuai dengan materi dalam persidangan tersebut, sehingga dapat meyakinkan para pihak bahwa proses administrasi penyidikan, dan administrasi penyelenggaraan negara dan proses sidang kode etik telah sesuai dengan aturan yang ada. Fungsi Bidkum optimal dalam melakukan penguatan kapabilitas dan kapasitas organisasi, sehingga dalam bisnis proses pengendalian dan pengawasan kinerja yang antisipatif dapat terselenggara dengan baik.

Selanjutnya untuk melihat sejauh mana kontribusi dari penyusun IKP persentase penyelesaian masalah hukum pada TAB 2021 yang terdiri dari komponen persentase kemenangan gugatan praperadilan, persentase kemenangan gugatan perdata dan persentase kemenangan gugatan TUN, maka dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Terlihat komponen kinerja persentase menang gugatan praperadilan, persentase menang gugatan perdata dan TUN berada pada level 5.

Level kinerja komponen persentase penyelesaian masalah hukum ini merupakan nilai yang menentukan, karena berhubungan pencapaian dari sasaran strategis “pengendalian dan pengawasan kinerja yang antisipatif”, walaupun level kinerja persentase kemenangan gugatan ini berada pada performa yang optimal, tetapi perlu kewaspadaan untuk masa yang akan datang, karena proses peradilan ini akan terus berjalan sampai tuntas ditemukannya keadilan, pada tahap berikutnya yaitu pada tahap kasasi. Dan apabila ditarik mundur kepada klausul terjadinya gugatan praperadilan ini karena pada tahap proses penyidikan pada fungsi reskrim terdapat celah hukum yang lemah, sehingga dijadikan bahan untuk upaya hukum oleh pihak terpidana/pelaku untuk melakukan perlawanan melalui praperadilan. Sehingga diperlukan upaya yang optimal, tertib dan prinsip kehati-hatian dengan berpedoman pada aturan yang sudah ada, di samping jalinan sinergi koordinasi, konsultasi, sinkronisasi, harmonisasi dan konsolidasi yang dibangun antara fungsi reskrim dengan fungsi bidkum yang produktif, responsibilitas dan berkeadilan terus dibangun dan diimplementasikan. Selanjutnya data jumlah gugatan peradilan tahun 2021 secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 21. Data jumlah masalah hukum pada satker yang terjadi TAB 2021.

No	Satker	Jumlah gugatan			Jumlah menang gugatan			Jumlah kalah gugatan		
		pra peradilan	Perdata	TUN	pra peradilan	Perdata	TUN	pra peradilan	perdata	TUN
1.	Ditreskrim	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Ditreskrimsus	3	0	0	2	0	0	1	0	0
3.	Ditresnarkoba	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Ditpolair	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Satker Mapolda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Polresta Balam	4	0	0	4	0	0	0	0	0
7.	Polres Lamsel	2	0	0	1	0	0	1	0	0
8.	Polres Tanggamus	1	0	0	1	0	0	0	0	0
9.	Polres Pesawaran	1	0	0	1	0	0	0	0	0
10.	Polres Pringsewu	1	0	0	1	0	0	0	0	0
11.	Polres Lamteng	1	0	0	1	0	0	0	0	0
12.	Polres Metro	1	0	0	0	0	0	1	0	0
13.	Polres Lamtim	0	0	1	0	0	0	0	0	0
14.	Polres Tuba	3	0	0	3	0	0	0	0	0
15.	Polres Mesuji	0	1	0	0	1	0	0	0	0
16.	Polres Tubaba	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Polres Lamut	3	0	0	3	0	0	0	0	0
18.	Polres Lambar	1	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Polres W. Kanan	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	Jumlah total	22	1	0	18	1	0	3	0	0

Dari data tersebut diatas dapat dianalisa, bahwa sepanjang tahun 2021 jumlah gugatan praperadilan yang dimenangkan Polri sebanyak 18 dari total 22 gugatan sehingga realisasi gugatan praperadilan sebesar 83%. Sementara gugatan perdata satu perkara dan dimenangkan 100% dan gugatan TUN pada TAB ini tidak ada, artinya proses administrasi yang

dijalankan pada proses penyelesaian pelanggaran kode etik khususnya pada proses pemberhentian anggota Polri dapat berjalan sesuai aturan, tidak terdapat hal yang menjadikan gugatan tata usaha negara, semua realisasinya 100% dimenangkan Polri.

Fakta ini menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2021, administrasi penanganan tindak pidana yang dilakukan jajaran fungsi reskrim Polda Lampung masih terdapat hal-hal yang belum optimal, sehingga menimbulkan celah hukum bagi terlapor untuk melakukan upaya hukum melalui praperadilan tetapi hal ini memang dijamin dalam undang-undang. Adapun celah hukum tersebut menyangkut ketidakcermatan dalam administrasi penyidikan, tidak optimalnya fungsi tim penyidik dalam melakukan penanganan kasus, sedangkan disisi lain mengenai perkembangan dalam penyidikan terdapat perkembangan hukum yang semakin menuntut profesionalitas dari penyidik, diantaranya terdapat keputusan MK Nomor 21 tahun 2014 tentang perluasan objek praperadilan. Ditambah lagi pada saat ini telah ditetapkan Keputusan MK Nomor 130 tahun 2015 tentang penyidik wajib mengirimkan SPDP kepada JPU, pelapor dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah surat perintah menyidikan.

Kendala dan hambatan yang dihadapi dalam memberikan bantuan hukum bagi Satker yang digugat, secara umum fungsi Bidkum selaku kuasa hukum, terdapat hal yang menjadi kendala terutama menyangkut koordinasi dengan Satker/Satwil selaku pihak termohon, dalam hal ini termohon kurang terbuka/jujur dengan fungsi Bidkum selaku kuasa hukum sehingga menimbulkan kesulitan dalam melakukan pembelaan.

Maka patut diperhatikan dalam upaya mengeliminir gugatan adalah dengan mengedepankan transformasi menuju Polri yang presisi; selalu prediktif dalam menangani perkara, resposibilitas terhadap perkara yang disedang dihadapi dan mengedepankan transparansi yang berkeadilan, disamping itu peningkatan kapasitas dan kapabilitas penyidik, penguatan pengawasan penyidikan, asistensi, sosialisasi, supervisi, *coaching clinic*, pertemuan teknis dan menjalin koordinasi yang sinergis dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam penanganan tindak pidana. Demikian pula kegiatan advokasi yang digelar oleh Bidkum Polda Lampung dalam menghadapi gugatan praperadilan, perdata dan TUN, mengedepankan koordinasi, komunikasi, konsolidasi, guna menemukan sinkronisasi dan harmonisasi terhadap pokok perkara yang sedang dihadapi, sehingga terdapat kesamaan persepsi terhadap kelemahan-kelemahan hukum baik dari pihak sendiri maupun dari pihak lawan dengan ketepatan bukti hukum dalam persidangan guna memberikan keyakinan kepada hakim.

IKP-13 Nilai Kinerja Anggaran

Penilaian indikator kinerja pendukung ini didasari proses untuk menghasilkan suatu capaian kinerja anggaran pada setiap indikator kinerja pendukung, dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Nilai kinerja anggaran ini diperoleh dari data *input* dan *output* yang dimasukkan oleh 39 satker Polda Lampung ke dalam aplikasi SMART Kemenkeu yang berbasis *website*. Adapun capaian dari indikator kinerja ini sebagai berikut:

Tabel 22. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja IKP Nilai Kinerja Anggaran.

SS-5 Manajemen pengawasan kepolisian yang akuntabel.						
IKU-13 Nilai Kinerja Anggaran						
Realisasi 2020	2021			kenaikan dari 2020-2021 (%/tahun)	% capaian dengan target jangka menengah	
	target	realisasi	capaian		Target 2022 (76)	Target 2023 (78)
87,10	74	85,10	115,00%	-0,02%	111,97%	109,10%

Adapun komponen-komponen yang dibutuhkan dalam penilaian indikator ini adalah berdasarkan PMK No. 249/PMK/02/2011 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L berdasarkan perhitungan:

- Penyerapan Anggaran (P), dilakukan dengan membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran seluruh satker dengan akumulasi pagu anggaran seluruh satker.
- Konsistensi (K) antara perencanaan dan implementasi, dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan yaitu dengan membandingkan antara akumulasi dan akumulasi realisasi anggaran bulanan seluruh satker rencana penarikan dana bulanan seluruh satker dengan jumlah bulan.
- Pencapaian Keluaran (PK), dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata realisasi Indikator kinerja keluaran dengan target indikator kinerja keluaran.
- Tingkat efisiensi (NE), dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran pada setiap satker, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volume keluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran.

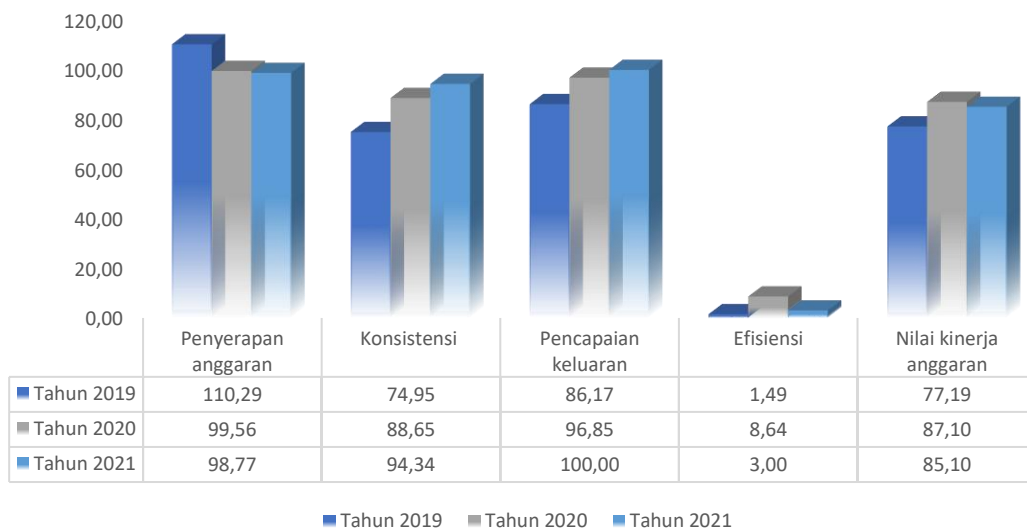
Adapun kategori nilai kinerja anggaran sebagai berikut:

- >90% - 100 % : Sangat baik
- > 80 % - 90 % : Baik
- > 60 % - 80 % : Cukup
- > 50 % - 60 % : Kurang

e) $\leq 50\%$: Sangat kurang

Selanjutnya dari hasil perhitungan aplikasi SMART tertanggal 30 Januari 2021 sebagai berikut: bahwa Target Nilai Kinerja Anggaran TAB adalah nilai 74, lalu realisasi nilai kinerja anggaran Polda Lampung sebesar 85,10 atau tercapai 115,10%, jika dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 yang besarnya 87,10, terjadi penurunan sebesar 0,02%. Berikut ini disajikan gambar perbandingan nilai kinerja anggaran Polda Lampung selama tiga tahun terakhir sebagai berikut:

Gambar 39. Perbandingan nilai kinerja anggaran Polda Lampung periode 2019-2021.



Berdasarkan gambar tersebut di atas, nilai kinerja anggaran tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 0,02%, adapun komponen penyusun nilai kinerja anggaran; Penyerapan anggaran mengalami penurunan dari 99,56 tahun 2020 menjadi 98,77 pada TAB turun sebesar 0,79% dan nilai konsistensi mengalami peningkatan dari 88,65 menjadi 94,34 dengan besaran kenaikan 6,42%, kemudian dengan komponen pencapaian keluaran naik dari 96,85 menjadi 100 dengan besaran peningkatan 3,19%. Selanjutnya perbandingan nilai kinerja anggaran satker pada lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 23. Perbandingan nilai kinerja anggaran tiga tahun terakhir.

No.	Satker	Nilai Kinerja anggaran		
		Tahun 2019	Tahun 2020	2021
1.	Spripim	81,28	84,35	57,81
2.	Itwasda	81,69	99,81	60,79
3.	Roops	85,83	73,08	73,61
4.	Bidkum	64,55	88,80	65,74
5.	Bidhumas	67,54	92,01	41,29
6.	Rorena	85,44	87,43	64,86
7.	Ro Sdm	89,21	95,77	2,98
8.	Rolog	67,82	69,22	50,72
9.	Bidpropam	51,20	91,88	65,00
10.	Bid Ti	75,36	83,95	59,05
11.	Bidokkes	78,89	70,47	59,05
12.	Bidkeu	76,68	86,50	95,02
13.	Yanma	83,92	93,11	70,70

No.	Satker	Nilai Kinerja anggaran		
		Tahun 2019	Tahun 2020	2021
14.	Spn	76,79	85,30	74,67
15.	Ditintelkam	98,00	99,99	47,38
16.	Ditreskrimum	59,86	92,78	73,31
17.	Ditreskrimus	73,52	89,52	50,47
18.	Diresnarkoba	74,33	93,77	66,02
19.	Ditsabhara	80,94	83,12	49,64
20.	Ditlantas	87,58	95,84	53,16
21.	Ditbinmas	92,84	87,72	82,13
22.	Ditpolair	69,48	88,91	59,78
23.	Ditpamobvit	94,70	97,68	68,06
24.	Satbrimob	94,14	87,30	65,51
25.	Rumkit Bhy	40,08	93,05	85,57
26.	Polresta Balam	47,94	85,03	85,39
27.	Polres Lamsel	82,23	87,66	85,79
28.	Polres Metro	80,99	85,77	86,14
29.	Polres Lamut	74,70	86,23	85,61
30.	Polres Lambar	73,64	86,11	85,36
31.	Polres Tuba	84,02	90,92	84,30
32.	Polres Tanggamus	85,54	84,78	89,49
33.	Polres Lamtim	85,51	87,11	85,35
34.	Polres Way Kanan	78,08	82,41	84,43
35.	Polres Lamteng	72,40	91,29	85,03
36.	Polres Mesuj	47,08	83,79	86,00
37.	Polres Pesawaran	33,43	93,44	86,35
38.	Polres Tubaba	0	67,90	81,37
39.	Polres pringsewu	0	73,08	50,33

Terlihat bahwa tahun 2021 nilai kinerja anggaran satker yang memenuhi target Polda Lampung adalah sebanyak 16 satker dari 39 satker atau sebesar 41,20%. Selanjutnya apabila nilai kinerja anggaran satker tahun 2021 ini dibandingkan dengan target nasional 93,50 terdapat satu satker yang telah memenuhi target dimaksud dengan persentase sebesar 2,56% yaitu satker Bidkeu.

Fakta keberhasilan pencapaian target nilai kinerja anggaran ini menunjukkan bahwa sepanjang TAB 2021, pengelolaan anggaran sudah menjadi perhatian penuh semua satuan kerja, karena dengan hasil nilai kinerja anggaran 85,10% termasuk pada kategori baik secara umum. Dalam TAB ini terdapat dua puluh tiga Satker yang belum mencapai target Polda, hal ini dikarenakan sebagai berikut; terdapat proses penarikan anggaran tidak sesuai waktu sehingga berpengaruh terhadap nilai kinerja; terdapat adanya salah satu output anggaran yang tidak diserap sehingga berpengaruh terhadap capaian kinerja anggaran. Untuk tahun yang akan datang, Polda Lampung berusaha untuk memperbaiki pengelolaan program anggaran dengan memberi *stressing* pada program prioritas nasional, dengan melakukan monev secara holistik, guna mendukung operasional kepolisian di lapangan.

Kendala dan hambatan dalam pengelolaan anggaran, umumnya menyangkut pengetahuan pengelolaan anggaran yang berbasis TIK (teknologi, informasi dan komunikasi), sehingga diperlukan manajemen pengetahuan dari satker pembina fungsi, dalam hal ini fungsi Rorena Polda Lampung. Melalui upaya sosialisasi, asistensi, supervisi,

bimbingan teknis, tutorial di samping menjalin sinergit antar pengembangan fungsi perencanaan satker yang intensif.

C. Realisasi Anggaran

Perbandingan DIPA Polda Lampung selama tiga tahun terakhir 2019-2021, dalam perkembangan pagu dan realisasi Polda Lampung sebagai berikut:

Tabel 24. Perbandingan pagu dan realisasi anggaran Polda Lampung 2019-2021.

DIPA POLDA LAMPUNG	Tahun		
	2019	2020	2021
Pagu awal (Rp.)	1.165.371.110.000,-	1.166.502.186.000,-	1.271.995.008.000,-
Pagu akhir (Rp)	1.235.379.331.000,-	1.277.172.925.000,-	1.310.263.308.000,-
Realisasi (Rp.)	1.331.208.573.710,-	1.273.342.063.000,-	1.308.313.262.802,-
% realiasi	107,8 %	99,70%	99,85%

Selanjutnya dari lima program anggaran yang menjadi tanggung jawab Polda Lampung, maka dibawah ini adalah rincian pelaksanaan realisasi anggaran T.A. 2021 sebagai berikut :

Tabel 25. Program Anggaran Polda Lampung T.A. 2021

NO	NAMA PROGRAM	PAGU AKHIR	REALISASI	% REALISASI	SISA	% SISA
1.	Profesionalisme SDM	33.702.925.000	32.474.485.000	99,65	113.666.628	0,35
2.	Lidik sidik	101.108.144.000	86.666.758.000	99,75	212.399.762	0,25
3.	Modernisasi almatsus	202.857.464.000	194.209.466.000	99,67	637.783.705	0,33
4.	Harkamtibmas	284.520.595.000	316.929.700.000	99,82	577.819.511	0,18
5.	Dukungan manajemen	649.995.880.000	679.982.899.000	99,94	488.376.592	0,06
JUMLAH		1.310.263.308.000	1.308.313.262.802	99,85	1.950.045.198	0,15

Sumber Data: Aplikasi OM SPAN Kemenkeu R.I. Per 31 Desember 2021

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Polda Lampung berusaha mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan melakukan efisiensi anggaran dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. mulai dari total pagu awal Polda Lampung T.A. 2021 sebesar Rp. 1.271.995.008.000,- berdasarkan Surat Asrena Kapolri nomor: B/522/I/REN.3.1/2021/Srena, tentang *refocussing* Anggaran Polda Lampung Tahap I sebesar Rp.59.196.078.000,- yang terdiri dari; Belanja Barang sebesar Rp.45.262.194.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp.13.934.884.000,-.
- b. Selanjutnya terdapat penambahan anggaran dari Sumber Hibah sebesar Rp. 50,024,243,000,- yang terdiri atas:
 - 1) Bidkeu Polda Lampung sebesar Rp.5.606.513.000,- (pengadaan ran R₄, generator set 400 KVA rumkit,

pembangunan gedung *ct scan* rumkit, pemeliharaan gedung kelas SPN, pengadaan peralatan kantor, Pam giat PPKM dan giat opsional lainnya;

- 2) Rolog Polda Lampung sebesar Rp.15.350.000.000,- (rehab gedung SPN dan pengadaan meubelair mapolda baru);
- 3) Sat Brimobda Lampung sebesar Rp.300.000.000,- (giat latihan dalam rangka harkamtibmas);
- 4) Polres Pringsewu sebesar Rp.900.000.000,- (giat Pilkakon Pringsewu, makan tahanan, lidik sidik narkoba & pengadaan Laptop dan komputer);
- 5) Polresta Bandar Lampung sebesar Rp.2.498.500.000,- (giat Ops Ketupat, Har CCTV program SPIS, Ops Lilin dan giat antisipasi C₃);
- 6) Polres Lampung Timur sebesar Rp. 3300.000.000,- (giat Ops Ketupat, giat Harkamtibmas dan Pengadaan peralatan Gedung pelayanan satu atap);
- 7) Polres Lampung Selatan sebesar Rp.1.475.000.000,- (giat pam lantik Bupati terpilih Pilkada th. 2020 dan giat harkamtibmas lainnya);
- 8) Polres Lampung Barat sebesar Rp.260.000.000,- (Pembangunan pagar Mako Polres Lambar dan giat Operasional Polres);
- 9) Polres Metro sebesar Rp.777.000.000,- (giat Harkamtibmas, giat cegah dan tanggulangi *Covid-19*, lidik sidik narkoba)
- 10) Polres Pesawaran sebesar Rp.1.000.000.000,- (giat Harkamtibmas Polres Pesawaran).
- 11) Polres Tanggamus sebesar Rp.5.874.905.000,- (giat harkamtibmas, bangun mako Polsek Wonosobo, Talang Padang, gedung Poliklinik, Jalan Satpas SIM, meubelair & gedung Endra Dhrmalaksana, pengadaan laptop, *sound system*, *printer* Polres dan alsintor Polsek Pulau Panggung).
- 12) Polres Tulang Bawang sebesar Rp.2.200.000.000,- (dukungan giat harkamtibmas, aksinasi massal, ops Lilin 2021);
- 13) Polres Way Kanan sebesar Rp.650.000.000,- (giat pilkacam serentak dan giat Ops Ketupat & Lilin);
- 14) Polres Lampung Utara sebesar Rp.3.600.000.000,- (giat Pam Pilkades, giat harkamtibmas, bangun gedung vicon dan bangun gedung pelayanan terpadu)

- 15) Polres Mesuji sebesar Rp.1.625.000.000,- (Pengadaan Meubelair dan Gedung Patsus, Meubelair dan Gedung Barbuk, pengadaan sumur bor, makan tahanan, Giat Ops Ketupat Krakatau 2021, Giat Harkamtibmas Polres, Meubelair dan Interior ruang kerja Bag dan Sat Polres, giat Ops Lilin 2021).
 - 16) Polres Lampung Tengah sebesar Rp.2.965.325.000,- (dukungan giat Harkamtibmas dan giat Pos Pam PPKM Darurat);
 - 17) Polres Tuba Barat sebesar Rp.1.642.000.000,- (dukungan Giat Harkamtibmas dan Rehab gedung Samapta, Polsek Tuba Tengah dan gedung pelayanan terpadu).
- c. Kemudian pada TAB 2021 ini terjadi lagi revisi anggaran sebagai berikut:
- 1) Revisi Anggaran Giat Pelatihan pada Satker SPN Polda Lampung yang dialihkan ke satker Lemdiklat Polri sebesar Rp.554.800.000,-
 - 2) Revisi penambahan anggaran Giat Diktukba Polri T.A. 2021 pada satker SPN Polda Lampung Rp.1.704.828.000,- sumber RM.
 - 3) Berdasarkan surat Asrena Kapolri nomor: B/4763/MII/REN.3.1/ 2021/SRENA, *refocussing* Anggaran Polda Lampung Tahap III sebesar Rp.1.926.125.000,- yang seluruhnya merupakan Belanja Barang sumber Rupiah Murni.
 - 4) Penambahan gar jasa Pamobvit untuk satker Ditpamobvit dan Polres jajaran (14 Polres) dari PNPB sebesar Rp.3.558.404.000,-
 - 5) Revisi Pagu Minus menyebabkan penambahan gar Belanja Pegawai sebesar Rp.39.574.331.000,- yang terdiri dari pengurangan Belanja Barang sebesar Rp.432.400.000,- dan ditambah anggaran dari Mabes Polri sebesar Rp. 39.141.931.000,-

Untuk rincian realisasi penyerapan anggaran pagu akhir pada masing-masing satker di lingkungan Polda Lampung dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 26. Realisasi anggaran persatker Polda Lampung T.A. 2021.

	SATKER	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI	%	SISA
1	Ditresnarkoba	13.295.154.000	12.575.642.000	12.575.628.647	100,00	13.353
2	Ditreskrimum	19.517.382.000	18.482.656.000	18.482.587.231	100,00	68.769
3	Satbrimob	69.592.800.000	74.511.481.000	74.509.479.258	100,00	2.001.742
4	Ditreskrimsus	12.345.329.000	11.358.765.000	11.358.098.560	99,99	666.440

	SATKER	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI	%	SISA
5	Ditintelkam	24.907.915.000	23.038.689.000	23.034.098.401	99,98	4.590.599
6	Bidpropam	8.485.186.000	8.988.140.000	8.986.215.818	99,98	1.924.182
7	Roops	16.890.037.000	16.584.923.000	16.579.075.334	99,96	5.847.666
8	Itwasda	3.816.791.000	4.267.906.000	4.265.789.385	99,95	2.116.615
9	Bidkeu	2.661.329.000	7.923.729.000	7.919.617.850	99,95	4.111.150
10	Bidkum	3.412.499.000	3.465.080.000	3.463.267.839	99,95	1.812.161
11	Ditlantas	23.163.142.000	26.070.081.000	26.055.415.434	99,94	14.665.566
12	Sripim	7.209.094.000	7.816.554.000	7.811.582.123	99,94	4.971.877
13	Rolog	77.871.554.000	85.353.527.000	85.293.304.861	99,93	60.222.139
14	Ro SDM	8.221.034.000	8.331.558.000	8.324.597.754	99,92	6.960.246
15	DITSAMAPTA	19.586.929.000	22.101.293.000	22.082.210.506	99,91	19.082.494
16	Bid TIK	4.737.844.000	4.809.031.000	4.803.262.668	99,88	5.768.332
17	Yanma	8.397.189.000	7.937.164.000	7.924.942.336	99,85	12.221.664
18	Bidhumas	4.532.203.000	5.137.296.000	5.122.538.074	99,71	14.757.926
19	Rorena	4.481.222.000	4.558.101.000	4.544.443.317	99,70	13.657.683
20	Ditpolairud	20.220.180.000	21.038.802.000	20.968.195.945	99,66	70.606.055
21	SPN	26.694.715.000	24.984.388.000	24.857.774.106	99,49	126.613.894
22	Ditbinmas	5.413.631.000	5.716.348.000	5.686.916.757	99,49	29.431.243
23	Rumkit	27.853.690.000	33.829.459.000	33.537.333.773	99,14	292.125.227
24	Ditpamobvit	10.035.673.000	11.440.851.000	11.317.141.449	98,92	123.709.551
25	Biddokkes	13.425.413.000	15.211.477.000	15.020.994.864	98,75	190.482.136
26	Polres Lamtim	86.204.230.000	90.908.074.000	90.908.067.511	100,00	6.489
27	Polres Lamsel	66.762.375.000	68.681.202.000	68.681.196.566	100,00	5.434
28	Polres Tubaba	35.651.490.000	38.740.912.000	38.739.188.356	100,00	1.723.644
29	Polres Metro	51.523.977.000	55.244.190.000	55.233.604.844	99,98	10.585.156
30	Polres Lamut	64.620.823.000	68.764.192.000	68.750.639.918	99,98	13.552.082
31	Polres Way Kanan	50.781.529.000	54.683.068.000	54.667.870.782	99,97	15.197.218
32	Polresta Balam	105.834.792.000	112.167.723.000	112.103.284.081	99,94	64.438.919
33	Polres Tuba	43.083.720.000	45.646.472.000	45.589.816.732	99,88	56.655.268
34	Polres Mesuji	34.254.599.000	36.332.748.000	36.281.061.591	99,86	51.686.409
35	Polres Lamteng	78.974.903.000	81.283.555.000	81.164.345.499	99,85	19.209.501
36	Polres Lambar	57.494.979.000	60.344.920.000	60.248.299.494	99,84	96.620.506
37	Polres Tanggamus	74.997.774.000	53.897.238.000	53.795.014.448	99,81	102.223.552
38	Polres Pesawaran	38.158.132.000	41.258.229.000	41.150.642.91	99,74	107.586.409
39	Polres Pringsewu	6.883.750.000	36.777.844.000	36.475.718.099	99,18	302.125.901
	JUMLAH TOTAL	1.271.995.008.000	1.310.263.308.000	1.308.313.262.802	99,85	1.950.045.198

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa selama TAB, total realisasi anggaran Satker jajaran Polda Lampung sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 mencapai 99,85%. Sisa anggaran sebesar Rp. 1.950.045.198,- atau 0,15%, merupakan sisa dari revisi pagu minus belanja pegawai.

Selanjutnya dalam upaya meningkatkan pengelolaan anggaran di lingkungan Polda Lampung pada tahun anggaran berikutnya, selain melakukan penguatan kapabilitas melalui petunjuk dan arahan, juga melakukan penguatan kapasitas dengan melakukan sosialisasi, asistensi supervisi, hal ini secara berkala dalam rangka percepatan realisasi anggaran, dengan penekanan sebagai berikut:

- a. Setiap awal tahun anggaran Kasatker selaku KPA agar menetapkan pejabat pengelola keuangan satker (PPK, PPSPM dan bensatker) dan menyampaikan kepada KPPN sebagai dasar pencairan DIPA, dalam hal tidak ada penggantian pejabat dimaksud cukup menyampaikan surat pemberitahuan;
- b. melaksanakan sosialisasi DIPA dan menyusun rencana kegiatan dan rencana penarikan dana (RPD) secara akurat dan realistis

sesuai kondisi terkini berdasarkan pelaks kegiatan satker yang telah ditetapkan dan menyampaikan kepada KPPN dalam rangka mengatasi penumpukan pencairan dana pada akhir tahun anggaran dan antrian layanan yang panjang di KPPN yang dalam pelaksanaan berpedoman pada Permenkeu Nomor 277/PMK.05/2014;

- c. melakukan pembayaran terhadap kegiatan/pekerjaan yang telah diselesaikan, terutama yang berkaitan dengan melalui UP/TUP dan segera melakukan *revolving up* jika penggunaannya minimal telah mencapai 50%, sedangkan yang melalui pembayaran langsung (LS) selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah ditanda tangani berita acara pemeriksaan penyelesaian pekerjaan (BAPP), berita acara serah terima pekerjaan (BASTP) dan berita acara pembayaran (BAP) disampaikan kepada KPPN yang dalam pelaksanaan berpedoman pada Permenkeu Nomor 190/PMK.05/2012;
- d. menyampaikan data perjanjian/kontrak yang telah ditandatangani kepada KPPN selambat-lambatnya 5 hari kerja untuk dicatatkan ke dalam kartu pengawasan kontrak KPPN dan didaftarkan pada aplikasi SPAN yang berkaitan dengan pencairan DIPA;
- e. memastikan data supplier/rekanan yang didaftarkan ke KPPN telah benar dengan mengacu pada data yang telah dilakukan pembayaran sebelumnya untuk menghindari penolakan pembayaran oleh KPPN;
- f. pejabat pengelola keuangan satker agar melakukan anev terhadap daya serap anggaran DIPA satker, untuk belanja barang dan belanja modal sekurang-kurangnya setiap triwulan;
- g. Bensatker melakukan pemungutan pajak sesuai ketentuan perpajakan dan selalu kordinasi dengan Bidkeu dan KPPN jika mengalami kendala dalam pencairan DIPA satker;
- h. Dalam hal diperlukan revisi DIPA, segera ajukan revisi dengan berpedoman pada Permenkeu tentang tata cara revisi DIPA;
- i. Menjadikan Itwasda sebagai mitra dalam proses pelaksanaan DIPA satker dan dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi;
- j. Penyusunan administrasi Perwabkeu dalam pelaksanaan Dipa satker agar mempedomani Perkap No. 22 Tahun 2011 dan Perkap No. 4 Tahun 2014;
- k. mengevaluasi penyerapan anggaran satker serta melakukan penyesuaian/revisi dokumen anggaran sebagai antisipasi terhadap perubahan kondisi di lapangan;
- l. menyusun rencana penyerapan anggaran sesuai jadwal kegiatan

- yang dirinci setiap bulan sebagai alat pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pencapaian target kinerja satker;
- m. mempercepat pencapaian terget kinerja, meningkatkan efektifitas dan kualitas belanja serta optimalisasi anggaran yang terbatas;
 - n. mempedomani jadwal kegiatan dan rencana penyerapan anggaran dalam pelaksanaannya;
 - o. mempercepat proses pengajuan pembayaran termin ke KPPN agar dapat segera disalurkan pada pihak Penyedia Jasa dan segera melaksanakan percepatan proses pembangunan sehingga angka realisasi anggaran khususnya belanja modal dapat mencapai target yang telah ditentukan dan membantu percepatan kemajuan perkembangan fisik bangunan sehingga pekerjaan konstruksi dapat selesai tepat pada waktunya.

D. Regulasi dan Kelembagaan

- a. Selama TAB dalam rangka mengimplementasikan program prioritas Kapolri pemenuhan satu kecamatan satu polsek secara bertahap, terhadap usulan pembentukan 12 Polsek baru telah mendapat keputusan persetujuan dari Kapolri dan selanjutnya terhadap 12 Polsek baru tersebut telah diresmikan secara serentak oleh Kapolda Lampung, masing-masing lima Polsek di Polres Lampung Utara; dua Polsek di Polresta Bandar Lampung dan Polres Lampung Tengah; dan masing-masing satu Polsek di Polres Lampung Barat, Way Kanan dan Mesuji.
- a. Kemudian implementasi program prioritas Kapolri yang lain berupa mengubah kewenangan polsek pada daerah tertentu hanya untuk harkamtibmas (tidak melakukan penyidikan) telah mendapat keputusan Kapolri menetapkan 16 Polsek harkamtibmas di lingkungan Polda Lampung.
- b. Terbit 396 Keputusan Kapolda Lampung terkait penguatan kapasitas dan kapabilitas organisasi Polda Lampung.
- c. Berlaku 22 Mou antara Polda Lampung dengan *stakeholder* dalam penguatan dinamika operasional tupoksi.

E. Penghargaan dan Apresiasi

- a. Penghargaan dan apresiasi terhadap komitmen dan dedikasi dalam menyukseskan pengamanan mudik hari raya 1442 H dari Kemenpan RB.
- b. Penghargaan dan apresiasi dari Kemenkum Ham atas perhatian dan bantuan yang telah diberikan dalam penanganan *covid19* di

Lapas kelas I Bandar Lampung.

- c. Penghargaan dan apresiasi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas peran aktif dalam melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan keanekaragaman hayati di Provinsi Lampung (Oktober 2021)
- d. Penghargaan dan apresiasi dari Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu atas kerja sama yang baik di bidang pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2021 sebagai terbaik Pertama (kategori *peer collaboration*).

IV. Penutup

Laporan Kinerja Polda Lampung tahun 2021 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis, sebagai tahun kedua Renstra 2020-2024 dan perkembangan perencanaan dari tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Pendukung. Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan hasil yang signifikan, meskipun masih ada agregat komponen penyusun indikator kinerja yang belum menunjukkan level kinerja yang memadai, tetapi masih dapat dilapisi dengan agregat komponen penyusun indikator kinerja yang level kinerja di atas memadai, sehingga pencapaian target dapat terpenuhi. Capaian kinerja Polda Lampung T.A. 2021 secara keseluruhan berhasil mencapai target, ditandai dengan nilai pencapaian sasaran strategis berada pada kisaran antara 104%-120%. Semua indikator kinerja tercapai 100%. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis capaian kinerja Polda Lampung T.A. 2021, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan dan disarankan sebagai berikut:

1. Kesimpulan

- a. Secara umum Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Polda Lampung T.A. 2021 sebesar 117,85%. Semua Sasaran Strategis, capaiannya antara 110%-120% dari keseluruhan jumlah Sasaran Strategis yang telah ditetapkan, sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

Tabel 27. Sasaran Strategis Polda Lampung.

Kode SS	Nama SS	NSS
<i>SSimpack</i>	Keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.	120,00%
SS1	Harkamtibmas yang partisipatif	120,00%
SS2	Penegakan hukum yang berkeadilan.	120,00%
SS3	Sumber daya manusia yang profesional	110,99%
SS4	Modernisasi pelayanan kepolisian yang berkelanjutan.	114,70%
SS5	Manajemen pengawasan kepolisian yang akuntabel	115,05%

- b. Dari 14 (empat belas indikator kinerja baik Indikator *Impack*, indikator kinerja Utama maupun indikator kinerja pendukung, capaian antara 104%-120% sebagai berikut:

Tabel 28. IKU dan IKP Polda Lampung.

NO	INDIKATOR KINERJA	Target 2021	Realisasi	Capaian
1.	IKU-0 Indeks keamanan dan ketertiban	3,2	4,69	120,00%
2.	IKU-1 Indeks pemeliharaan kamtibmas.	72	97,54	120,00%
3.	IKU-2 Indeks penegakan hukum.	67	89,18	120,00%
4.	IKP-3 Indeks profesionalitas personel.	74	82,13	110,99%
5.	IKP-4 Indeks dukungan sarpras dan peralatan.	70	82,27	117,53%
6.	IKP-5 Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik.	2,2	2,29	104,10%
7.	IKP-6 Nilai pengelolaan informasi dan pemberitaan.	51	73,49	120,00%
8.	IKP-7 Indeks penguatan implementasi kebijakan.	72	89,42	120,00%
9.	IKP-8 Indeks Tatakelola Kepolisian.	5,2	5,25	100,96%
10.	IKP-9 Indeks kepuasan pelayanan kepolisian.	80	96,19	120,00%
11.	IKP-10 Persentase penanganan pengaduan masyarakat.	63,00%	78,82%	120,00%
12.	IKP-11 Persentase penyelesaian pelanggaran personel.	82,00%	100,00%	120,00%
13.	IKP-12 Persentase penyelesaian masalah hukum.	91,40%	100,00%	109,41%
14.	IKP-13 Nilai kinerja anggaran.	74	85,10	115,00%

- c. Bahwa ke-14 (empat belas) indikator kinerja Polda Lampung tersebut, dapat dicapai oleh segenap sumber daya Polda Lampung dengan mengerahkan kapasitas dan kapabilitas kemampuan melalui semangat, soliditas kerja sama dan kerja keras seluruh personel Polda Lampung yang mengedepankan perilaku organisasi; *jiwaku penolong* dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta perannya masing-masing dalam mengimplementasikan program kerja T.A. 2021 yang disesuaikan dengan agenda nasional dan kewilayahan, khususnya dalam menyukseskan dan mengawal pembangunan nasional yang berada di daerah Lampung.
- d. Berdasarkan hasil capaian kinerja Polda Lampung tahun kedua Renstra 2020-2024 ini, terhadap komponen penyusun indikator kinerja pendukung, yang realisasi kinerja dan level kinerjanya belum memadai/optimal, akan dilakukan perbaikan melalui konsolidasi, sinkronisasi, revitalisasi organisasi dengan peningkatan kapasitas dan kapabilitas organisasi pada satuan kerja di lingkungan Polda Lampung.
- e. Selanjutnya menyangkut mekanisme pencapaian kinerja satuan kerja di lingkungan Polda Lampung, akan selalu dimonitor dan dipacu, dengan upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas organisasi melalui asistensi, sosialisasi, bimbingan teknis, rapat teknis, koordinasi, konsolidasi, sinkronisasi dan harmonisasi hubungan tata cara kerja baik pada satker, subsatker maupun hubungan personal antar personel, sehingga terjalin *networking*

dan *framework* yang satu pemahaman terhadap visi dan misi Polda Lampung dalam merealisasikan program, kebijakan dan strategi menjadi kegiatan Satker, mendorong Satker pelaksana program untuk memahami dan mengaktualisasikan tugas, fungsi dan peran dalam organisasi Polda Lampung, sehingga setiap tahun anggaran setiap indikator kinerja dapat diperoleh capaian kinerja yang optimal.

2. Saran

- a. Berdasarkan hasil kinerja tahun kedua Renstra 2020-2024 ini, Polda Lampung harus berupaya mempertajam implementasi dari visi Polri, yakni mewujudkan Indonesia yang aman dan tertib, secara umum berupaya melaksanakan tupoksi sesuai dengan amanat undang-undang Kepolisian, di samping itu tetap konsisten berupaya meraih dukungan dan kepercayaan masyarakat. Secara khusus berupaya menjadi kebanggaan masyarakat provinsi Lampung, dengan lebih fokus pada percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilandasi gerakan revolusi mental, melalui kebijakan internal, bahwa semua personel Polda Lampung dalam melaksanakan tugasnya mampu memerankan fungsi kepolisian dengan mengembangkan prinsip perilaku organisasi *jiwaku penolong*, sebagai suatu semangat yang mendasar dalam setiap pelaksanaan tugas.
- b. Adapun kebijakan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., dengan agenda transformasi menuju Polri yang Presisi, maka Polda Lampung telah mengimplementasikannya sesuai dengan rencana aksi dan tanggung jawab kewenangan lokalitas kewilayahan, dengan dilandasi semangat kerja sama dengan satuan fungsi Mabes Polri dalam mengsinkronkan dan harmonisasi untuk menuju Polri yang presisi.
- c. Khusus dalam teknis terhadap pemantauan capaian kinerja, Polda Lampung beserta seluruh satuan kerja secara berkelanjutan, setiap triwulan melaksanakan kegiatan diseminasi capaian kinerja, guna mengetahui dan mengevaluasi dari realisasi dan capaian target kinerja tahun anggaran berjalan. Di samping itu meningkatkan jalur koordinasi dan konsolidasi dalam mengimplementasikan kebijakan Polri sebagai fokus bersama semua satuan kerja Polda Lampung, untuk berkomitmen melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Polda Lampung T.A. 2021 disusun, kiranya dapat digunakan Pimpinan Polri sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan pada tahun anggaran berjalan dan tahun berikutnya, serta bagi para Kasatker agar dapat digunakan sebagai bahan introspeksi untuk peningkatan pelaksanaan tugas dalam Rencana Strategis 2020-2024, khususnya pada Rencana Kerja T.A. 2022.

Bandar Lampung, Februari 2022

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG



Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA
POLDA LAMPUNG T.A. 2021



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.
Pangkat : INSPEKTUR JENDERAL POLISI
Jabatan : KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG
selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. LISTIO SIGIT PRABOWO, M.Si.
Pangkat : JENDERAL POLISI
Jabatan : KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua :

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.
JENDERAL POLISI

Bandar Lampung, Maret 2021
Pihak Pertama
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG



Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
 KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
0.	Keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.	Indeks keamanan dan ketertiban.	3,2
1.	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang partisipatif.	Indeks pemeliharaan kamtibmas.	72
2.	Penegakan hukum yang berkeadilan.	Indeks penegakan hukum.	67
3.	Sumber daya manusia yang profesional.	Indeks profesionalitas SDM.	74
4.	Modernisasi pelayanan kepolisian yang berkelanjutan	a. Indeks dukungan sarpras dan peralatan.	70
		b. Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik.	2,2
		c. Nilai pengelolaan informasi dan pemberitaan.	51
5.	Manajemen pengawasan Kepolisian yang akuntabel.	a. Indeks penguatan implementasi kebijakan.	72
		b. Indeks tatakelola Kepolisian.	5,2
		c. Indeks kepuasan layanan Kepolisian.	80
		d. Persentase penanganan pengaduan masyarakat.	63%
		e. Persentase penyelesaian pelanggaran personel.	82%
		f. Persentase penyelesaian masalah hukum.	91,4%

g. Nilai

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		g. Nilai kinerja anggaran.	74

Program

1. Profesionalisme SDM Polri
2. Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
3. Modernisasi Alamatsus dan Sarana Prasarana Polri
4. Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
5. Dukungan Manajemen

Anggaran

- Rp. 33.702.925.000,-
Rp. 101.108.144.000,-
Rp. 202.857.464.000,-
Rp. 284.520.595.000,-
Rp. 649.805.880.000,-

Keterangan

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.
JENDERAL POLISI

Bandar Lampung, Maret 2021

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG


Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Kep Kapolda Lampung Nomor :
Kep/467/VI/2020/ tanggal 30 Juni 2020
Perihal Penetapan IKU Polda Lampung
Tahun 2020-2024



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG
Nomor : Kep /467/VI/2020

tentang

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG

- Menimbang : bahwa dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Kapolri Nomor 18 tahun 2012 tentang Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Polri, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025;
2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Daerah;
3. Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;
4. surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/360/VI/2005 tanggal 10 Juni 2005, tentang Grand Strategis Polri 2005 – 2025;
5. Keputusan Kapolri Nomor: Kep/1132/V/2020, tanggal 29 Mei 2020 tentang Rencana Strategis Polri Tahun 2020-2024.
- Memperhatikan: Surat Perintah Kapolda Lampung Nomor : Sprin/1095/VI/ HUK.6.6./2019 tanggal, 21 Juni 2019 susunan tim kerja penyusunan Renja Polda Lampung Tahun 2020 dan Renstra Polda Lampung Tahun 2020-2024 dan penyusunan IKU Polda Lampung Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG.

1. penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Polda Lampung tahun 2020-2024, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra Polda Lampung tahun 2020-2024;
2. indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Kepolisian Daerah Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing satuan kerja untuk menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis, Rencana Kerja dan anggaran, Penetapan Kinerja dan Laporan Capaian Kinerja Polda Lampung, sebagaimana amanat dari Keputusan Kapolda Lampung Nomor: Kep/699/XII/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Polda Lampung;
3. dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep/698/XII/2097 tanggal 03 Desember 2019, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Kepolisian Daerah Lampung, dinyatakan tidak berlaku lagi; dan
4. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Bandar Lampung
pada tanggal: 30 Juni 2020

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG



Drs. PURWADI ARIANTO, M.Si.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Kepada Yth :

Distribusi A, B dan C Polda Lampung.

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG

1. Nama Unit Organisasi / Satker : Kepolisian Daerah Lampung
2. Tugas : melaksanakan tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat; dan melaksanakan tugas – tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polda, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
 - a. pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, permintaan bantuan atau pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri dan pelayanan surat-surat izin atau keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian dan intelijen teknologi, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas, maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polda dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri;
 - c. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi, laboratorium forensik lapangan, pembinaan dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta pengawasan proses penyidikan;
 - d. pelaksanaan sabhara kepolisian, yang meliputi kegiatan patroli mencakup pengaturan, penjagaan, pengawalan, pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek khusus yang meliputi *Very Very Important Person* (VVIP), *Very Important Person* (VIP), tempat pariwisata dan objek vital khusus lainnya;
 - e. pelaksanaan

- e. pelaksanaan lalu lintas kepolisian, yang meliputi kegiatan Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli (turjawali) lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, serta Registrasi dan Identifikasi (regident) pengemudi dan kendaraan bermotor, dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas);
- f. pelaksanaan kepolisian perairan, yang meliputi kegiatan patroli termasuk penanganan pertama tindak pidana, pencarian dan penyelamatan kecelakaan/*Search and Rescue* (SAR) di wilayah perairan, pembinaan masyarakat pantai atau perairan dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan;
- g. pembinaan masyarakat, yang meliputi Perpolisian Masyarakat (Polmas), pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum, tumbuh kembangnya peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban, terjalinnya hubungan Polri dengan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas kepolisian, serta pembinaan teknis dan pengawasan kepolisian khusus termasuk satuan pengamanan; dan
- h. pelaksanaan fungsi-fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Indikator Kinerja Utama

INDIKATOR

INDIKATOR KINERJA UTAMA
RENSTRA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG TAHUN 2020 – 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	SATKER PENGEMBAN PROGRAM
1	2	3	4	5	6
0.	Keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.	Indeks keamanan dan ketertiban	Seluruh program anggaran yang menjadi tanggung jawab Polda Lampung	Seluruh kegiatan Polda Lampung yang berdampak pada situasi keamanan dan ketertiban di daerah hukum	Seluruh Satker di Polda Lampung
1.	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang partisipatif.	Indeks pemeliharaan kamtibmas.	04-Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	3133-Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lantas 5076-Pembinaan Potensi Keamanan 3130-Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara 3134-Penyelenggaraan Kepolisian Perairan	Ditlantas dan Polres Ditbinmas dan Polres Ditsamapta dan Polres Roops dan Satker pelaksana operasi kepolisian

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	SATKER PENGEMBAN PROGRAM
1	2	3	4	5	6
				3131-Penyelenggaraan Pengamanan Objek Vital	Ditpamobvit dan Polres
				5087-Penanggulangan Keamanan Dalam Negeri	Satbrimob
				3114- Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Politik	- Ditintelkam dan Polres
				3115-Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Ekonomi	- Ditintelkam dan Polres
				3116-Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Sosial Budaya	- Ditintelkam dan Polres
				3117-Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang	- Ditintelkam dan Polres

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	SATKER PENGEMBAN PROGRAM
1	2	3	4	5	6
				Keamanan Negara	
				3112-Analisis Keamanan	- Ditintelkam dan Polres
				3120-Kerjasama Keamanan dan Ketertiban K/L	- Roops dan Polres
2.	Penegakan hukum yang berkeadilan.	Indeks penegakan hukum.	05-Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	3137-Dukungan Manajemen dan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	- Ditreskrimum, Ditreskrimsus, Ditresnarkoba dan Polres
				3140-Penyelenggaraan Identifikasi Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	- Ditreskrimum, Ditreskrimsus, Ditresnarkoba dan Polres
				3142-Penindakan Tindak Pidana Umum	- Ditreskrimum, Ditlantas, Ditpolairud dan Polres
				3143-Penindakan Tindak Pidana Terorisme	- Ditreskrimum, dan Polres

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	SATKER PENGEMBAN PROGRAM
1	2	3	4	5	6
				3144-Penindakan Tindak Pidana Narkoba	- Ditresnarkoba dan Polres
				3145-Penindakan Tindak Pidana Ekonomi Khusus	- Ditreskrimsus, dan Polres
				3146-Penindakan Tindak Pidana Korupsi	- Ditreskrimsus, dan Polres
				5082-Pembinaan Operasional Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	- Ditreskrimum, Ditreskrimsus, Ditresnarkoba dan Polres
				5083-Penindakan Tindak Pidana Tertentu	- Ditreskrimsus, dan Polres
				5086-Pengawasan Penyidikan	- Ditreskrimum, Ditreskrimsus, Ditresnarkoba dan Polres
				3151-Penindakan Tindak Pidana siber	- Ditreskrimsus, dan Polres

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	SATKER PENGEMBAN PROGRAM
1	2	3	4	5	6
3.	Sumber daya manusia yang profesional.	Indeks profesionalitas personel.	03-Program Profesionalisme SDM Polri	3107-Pengendalian Pegawai Polri	- Ro SDM
				3108-Pembinaan Karier Personel Polri	- Ro SDM
				3105-Peyelenggaraan Administrasi Perawatan Pegawai Polri	- Ro SDM
				3110-Pelayanan Psikologi Anggota Polri	- Ro SDM
				3100-Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Polri	- SPN
				5069-Pembinaan Pendidikan dan Latihan Polri	- SPN
4.	Modernisasi pelayanan kepolisian yang berkelanjutan.	a. indeks dukungan sarpras dan peralatan.	02-Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri	5062-Pengembangan Fasilitas dan Kontruksi Polri	- Rolog dan Polres
				3084-Pengembangan Peralatan Polri	- Rolog dan satker

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	SATKER PENGEMBAN PROGRAM
1	2	3	4	5	6
		b. Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).	01-Program Dukungan Manajemen	3071-Penyelenggaraan Teknologi Informasi	- Bid TIK dan satker
				5052-Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Polri	- Rorena dan Rorena
		c. Nilai pengelolaan informasi pemberitaan.	01-Program Dukungan Manajemen	3070-Penerangan Masyarakat	- Bidhumas
				5056-Pengelola Informasi Dan Dokumentasi	- Bidhumas
5.	Manajemen pengawasan kepolisian yang akuntabel	a. Indeks penguatan implementasi kebijakan.	01-Program Dukungan Manajemen	5051-Penyusunan Kebijakan Polri	- Rorena dan satker pembina fungsi kepolisian terkait
				b. Indeks Tata kelola Kepolisian (ITK).	01-Program Dukungan Manajemen
	3088-Pertanggung jawaban Profesi	- Bidpropam dan Polres			
	3090-Penegakan Tata tertib dan Disiplin Polri	- Bidpropam dan Polres			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	SATKER PENGEMBAN PROGRAM
1	2	3	4	5	6
				3091-Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan	- Itwasda dan Polres
			02-Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri	5062-Pengembangan Fasilitas dan Kontruksi Polri	- Rolog dan Polres
				5059-Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras	- Rolog dan Polres
			03-Program Profesionalisme SDM Polri	3105-Peyelenggaraan Administrasi Perawatan Pegawai Polri	- Ro SDM dan Polres
				3108-Pembinaan Karier Personel Polri	- Ro SDM dan Polres
			04-Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	0002 Dukungan Manajemen Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat.	- Ditintelkam, Ditbinmas, Dilantas, Ditsamapta dan Polres
				5080-Pengendalian Operasi Kepolisian	- Roops

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	SATKER PENGEMBAN PROGRAM
1	2	3	4	5	6
			05-Program Penyidikan Tindak Pidana	3137-Dukungan Manajemen dan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	- Pembina fungsi Reskrim dan Polres
		c. Indeks Kepuasan layanan kepolisian.	01-Program Dukungan Manajemen	5053-Reformasi Birokrasi Polri	- Rorena dan Polres
			04-Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	5051-Penyusunan Kebijakan Polri	- Rorena dan Polres
			01-Program Dukungan Manajemen	3072-Pelayanan Kesehatan Polri	- Rumkit bhayangkara
			04-Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	5080-Pengendalian Operasi Kepolisian	- SPKT dan Polres
				0002 Dukungan Manajemen Pemeliharaan Keamanan Dan	- Dintelkam, Ditlintas, Ditreskrim, Ditreskrimsus

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	SATKER PENGEMBAN PROGRAM
1	2	3	4	5	6
				Ketertiban Masyarakat	dan Diresnarkoba
			03-Program Profesionalisme SDM Polri	3107-Pengendalian Pegawai Polri	- Ro SDM
		d. Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat.	01-Program Dukungan Manajemen	3091-Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan	- Itwasda dan Polres
		e. Persentase penyelesaian pelanggaran personel	01-Program Dukungan Manajemen	3090-Penegakan Tata tertib dan Disiplin Polri	- Bidpropam dan Polres
				3088-Pertanggung jawaban Profesi	- Bidpropam dan Polres
				3089-Penyelenggaraan Pengamanan Internal Polri	- Bidpropam dan Polres
		f. Persentase penyelesaian masalah hukum	01-Program Dukungan Manajemen	3154-Pemberian Bantuan dan Nasehat Hukum	- Bidkum dan Polres
				3155-Penyusunan dan Penyuluhan Hukum	- Bidkum dan Polres

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	SATKER PENGEMBAN PROGRAM
1	2	3	4	5	6
		g. Nilai kinerja anggaran.	01-Program Dukungan Manajemen	5054-Manajemen Anggaran	- Rorena

Ditetapkan di: Bandar Lampung
 pada tanggal: 30 Juni 2020

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG

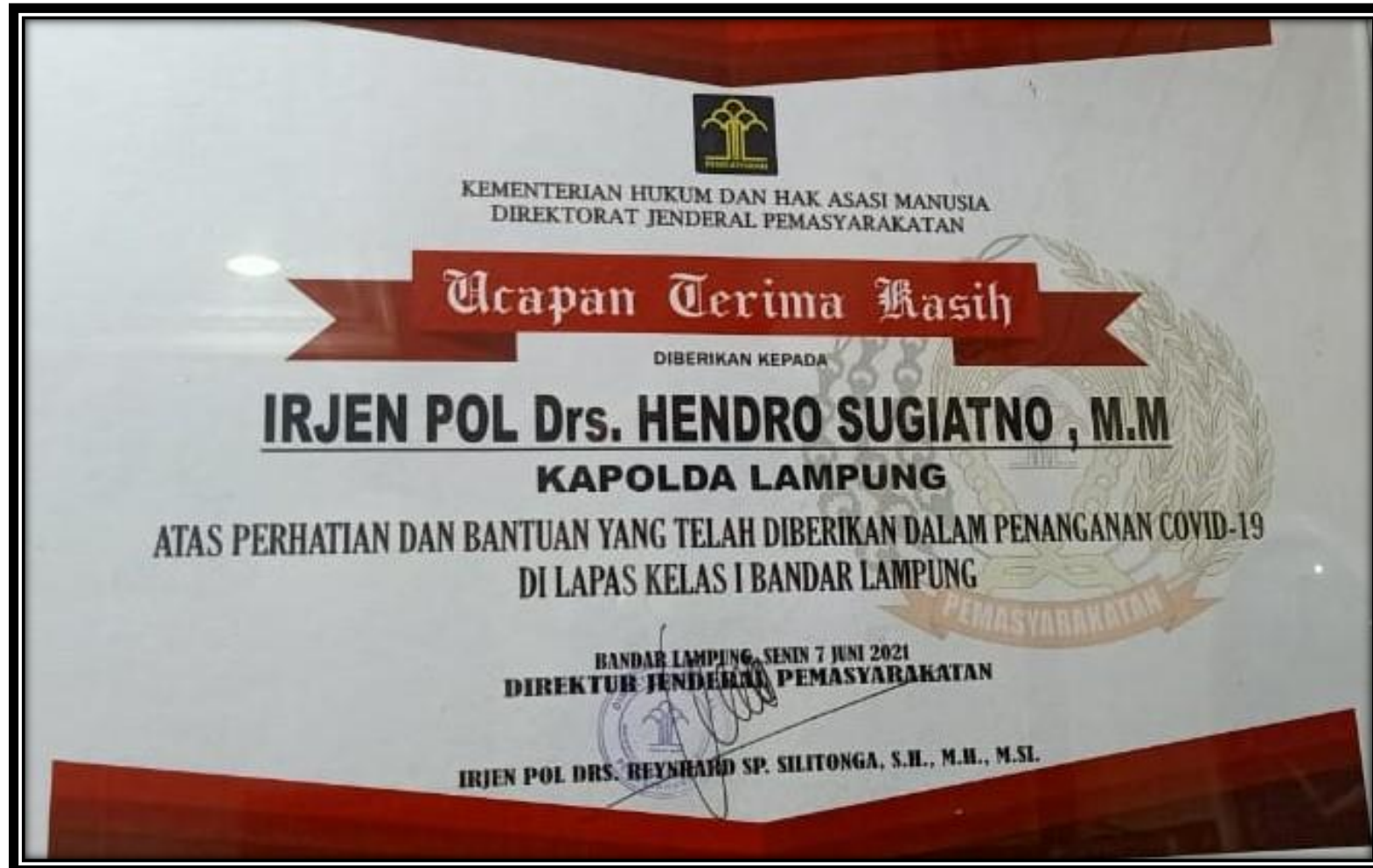

 Drs. PURWAD ARIANTO, M.Si.
 INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Penghargaan dan dukungan kepada
Polda Lampung T.A. 2021

PIAGAM PENGHARGAAN DARI MUSEUM REKOR DUNIA-INDONESIA
ATAS REKOR VIDEO IMBAUAN TERTIB LALU LINTAS OLEH KEPALA SEKOLAH SMA-SMK TERBANYAK
(912 KEPALA SEKOLAH)



PIAGAM PENGHARGAAN DARI KEMENKUMHAM DIRJEN PEMASYARAKATAN
ATAS PERHATIAN DAN BANTUAN YANG TELAH DIBERIKAN DALAM PENANGANAN COVID-19
DI LAPAS KELAS I BANDAR LAMPUNG



PIAGAM PENGHARGAAN DARI MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
ATAS KOMITMEN, DEDIKASI SERTA SUKSES DALAM PENGAMANAN MUDIK HARI RAYA IDUL FITRI 1442 H
DAN IKUT MENEKAN LAJU PENINGKATAN KASUS PANDEMI COVID-19 DI DAERAH



PIAGAM PENGHARGAAN DARI MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
ATAS PERAN AKTIF DALAM MELAKUKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
KEJAHATAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DI PROVINSI LAMPUNG



PIAGAM PENGHARGAAN DARI KEPALA KANTOR WILAYAH DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU
ATAS KERJASAMA YANG BAIK DI BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2021
SEBAGAI TERBAIK PERTAMA KATEGORI *PEER COLLABORATION*





**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG**

📍 Jl. Terusan Ryacudu Jati Agung 35365

✉ birorenalampung@gmail.com

📷 @rorenapoldalampung